



**Melakukan Investigasi
Kayu Ilegal**
Panduan bagi Aktivis dan Masyarakat

Daftar Isi

3	Pendahuluan
5	Bab 1: Penebangan liar dan respon dari negara-negara konsumen
5	1.1 Apa yang dimaksud dengan penebangan liar?
6	1.2 Respon terhadap penebangan liar di pasar-pasar besar
9	1.3 Bagaimana masyarakat sipil bisa membantu membasmi kayu illegal
12	Bab 2: Bagaimana cara mendeteksi dan mendokumentasikan penebangan liar dan perdagangan yang terkait dan menelusuri rantai pasok
12	2.1 Pendahuluan
13	2.2 Pemanenan
38	2.3 Pengangkutan, pemrosesan dan perdagangan
51	2.4 Penelusuran maju hingga konsumen akhir
60	Bab 3: Memanfaatkan bukti
60	3.1 Mengkaji bahan bukti
63	3.2 Membagikan informasi mengenai bahan bukti
66	3.3 Kesimpulan: Tetap semangat dan selalu hati-hati
67	Catatan Akhir

Ucapan terimakasih

Buku panduan ini ditulis oleh Tom Johnson dan Sam Lawson, dengan dibantu penelitian tambahan dan pengeditan oleh Tara Ganesh. Desain dibuat oleh Enso. Earthsight ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak eksternal yang sudah membantu mengkaji, menterjemahkan dan memeriksa ulang hingga diterbitkannya buku panduan ini. Buku panduan dan websitenya telah dihasilkan dengan dukungan pendanaan dari Ford Foundation. Berbagai pandangan yang diekspresikan sepenuhnya merupakan pandangan para pengarang dan sama sekali tidak mencerminkan pandangan pihak-pihak penyantun dana.

Pendahuluan

Penebangan liar yang merajalela telah menciptakan berbagai dampak yang sangat destruktif terhadap kehidupan liar, masyarakat dan iklim global. Pemerintah dari berbagai negara yang menghadapi masalah penebangan liar dan perdagangan yang terkait dengannya telah mengalami kerugian dari hilangnya pemasukan hingga mencapai milyaran dolar, sementara masyarakat adat dan komunitas lokal yang bergantung pada hutan kehilangan lahan dan mata pencaharian mereka. Penebangan liar telah melemahkan supremasi hukum, mendorong korupsi dan di beberapa kejadian bahkan berkontribusi terhadap konflik bersenjata.

Sebagian besar dari kayu dan produk-produk kayu yang dihasilkan secara ilegal, dari hutan Amazon sampai dengan Asia Tenggara, pada akhirnya dijual di pasar yang sangat menguntungkan di Eropa dan Amerika Serikat. Menanggapi krisis ini, dan untuk mengatasi keterlibatan kedua pasar tersebut dalam permasalahan ini, pemerintah Uni Eropa (UE) dan AS telah mengesahkan legislasi yang melarang kayu ilegal untuk diperjual-belikan. Meskipun legislasi tersebut berhasil menciptakan sedikit dampak, sejauh ini peraturan-peraturan tersebut belum berhasil menghentikan mayoritas impor kayu yang berasal dari sumber yang ilegal hingga mencapai pasar. Diperkirakan bahwa AS terus mengimpor kayu yang berasal dari sumber ilegal yang bernilai mencapai \$3 milyar setiap tahunnya¹, selain itu kajian resmi dari EUTR menemukan bahwa implementasi peraturan tersebut hingga saat ini masih lemah.²

Satu alasan mengapa peraturan tersebut belum sepenuhnya berlaku efektif adalah, meskipun banyak informasi mengenai penebangan liar di negara-negara yang mengeksport kayu, belum ada bukti yang cukup memadai yang berhasil mencapai lembaga-lembaga yang ditugaskan untuk menegakkan peraturan ini di Eropa dan AS. Panduan ini bertujuan untuk menutup celah pada informasi tersebut.

Panduan ini ditujukan untuk membantu masyarakat sipil untuk mengidentifikasi kayu ilegal, melacak kayu ilegal yang beredar di pasar UE dan AS, dan mengumpulkan bukti-buktinya kepada otoritas yang relevan. Dengan mengambil contoh dari beberapa studi kasus di seluruh dunia, panduan ini merangkum berbagai perangkat, metode dan teknologi mutakhir untuk melakukan investigasi independen terhadap legalitas penebangan, perdagangan, ekspor dan untuk

melacak kayu yang dipasok dengan melanggar hukum melalui rantai pasok yang rumit hingga mencapai konsumen akhir.

Panduan ini diharapkan bisa membantu setiap orang dan kelompok-kelompok yang saat ini terlibat dalam penelitian yang relevan, selain juga memberikan inspirasi dan memberdayakan masyarakat lainnya untuk bergabung dengan mereka. Dengan semakin banyaknya orang yang dibantu untuk membeberkan kasus-kasus penebangan liar dan perdagangan yang terkait dengannya, buku panduan ini diharapkan bisa membantu memperbaiki implementasi hukum yang relevan dan, pada akhirnya, mengurangi penebangan liar dan dampak kerusakannya terhadap masyarakat dan lingkungan.



Pembukaan hutan di Sarawak, Malaysia ©EarthSight

Untuk siapa buku panduan ini?

Buku Panduan ini pada intinya ditujukan untuk digunakan oleh masyarakat sipil, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas lokal dan kelompok pemuda, dan para aktivis. Buku ini juga bisa menjadi buku yang menarik bagi para jurnalis investigatif. Anda bisa saja seorang anggota komunitas adat yang ingin mencari tahu siapa pihak yang sedang melakukan penebangan di lahan anda dan apakah yang mereka lakukan merupakan hal yang legal. Anda bisa saja sebuah LSM lokal atau aktivis independen yang ingin memeriksa legalitas perizinan pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, dan melacak kemana perginya kayu-kayu yang dihasilkan. Anda bisa juga seorang jurnalis investigatif di suatu negara bagian dari Uni Eropa yang ingin menghasilkan cerita mengenai kayu ilegal yang digunakan untuk perabot taman.

Informasi dalam panduan ini relevan bagi setiap negara yang menghadapi berbagai tindakan pelanggaran hukum terkait penebangan atau pembukaan hutan dan perdagangan kayu yang terkait, dan bagi semua negara yang mengimpor kayu dari negara-negara ini. Meskipun panduan ini terutama fokus pada kasus-kasus yang berkaitan dengan rantai pasok ke UE dan AS, sebagian besar dari metode-metode yang dijelaskan dapat diterapkan di berbagai kasus lain dimana kayu dikirim ke negara-negara lain maupun dikonsumsi secara domestik. Bahkan pada peristiwa yang tidak melibatkan produksi kayu: meskipun sebagian besar dari panduan ini berkaitan dengan produksi kayu, sebagian besar perangkat dan metode-metodenya cukup relevan untuk digunakan dalam kegiatan investigasi pelanggaran hukum melalui pembukaan hutan (seperti untuk perkebunan komersil), dimana tidak terdapat produksi kayu.



Kayu Afrormosia di DRC ©Greenpeace

Informasi yang terdapat dalam buku panduan ini juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dan perusahaan. Lembaga-lembaga penegak hukum bisa memanfaatkan buku ini untuk penelitian mereka sendiri, atau untuk meningkatkan pemahaman terhadap informasi yang diberikan kepada mereka oleh rekan-rekan dari LSM. Para pembeli produk kayu bisa memanfaatkan beberapa metode yang ada di buku panduan ini untuk memeriksa legalitas kayu yang mereka beli. Penegak hukum dan pembeli produk kayu bisa memperoleh manfaat dari informasi kontekstual yang disajikan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai fungsi pelanggaran hukum dalam sektor yang rumit ini.

Bagaimana cara memanfaatkan buku panduan ini?

Kemungkinan tidak semua informasi dalam buku panduan ini relevan bagi suatu kasus atau seorang pembaca tertentu. Para pembaca diharapkan memanfaatkan buku panduan ini sebagai sebuah sumber bacaan, dengan menyerap hanya bagian-bagian yang paling relevan bagi kebutuhan mereka, dan merujuk kembali kepada buku ini secara bertahap seiring perkembangan

penelitian yang dilakukan. Buku panduan ini dibagi menjadi tiga bab, yang meliputi pembahasan-pembahasan berikut:

- **Bab Satu** memberikan suatu gambaran umum mengenai hukum yang telah disahkan di UE dan AS sebagai respon terhadap penebangan liar yang merajalela di dunia, dan mengkaji bagaimana informasi dari masyarakat sipil bisa mendukung implementasi dari undang-undang tersebut.
- **Bab Dua** menguraikan bagaimana pelanggaran hukum berfungsi dalam sektor tersebut, dari hutan ke pasar, dan memberikan panduan secara terperinci mengenai bagaimana seseorang atau lembaga bisa melakukan investigasi di berbagai tahapan rantai pasok.
- **Bab Tiga** menjelaskan mengenai bagaimana informasi yang diperoleh selama investigasi bisa dimanfaatkan untuk mendukung implementasi hukum, meningkatkan berbagai kebijakan dan menutup pasar bagi kayu ilegal.

Buku panduan ini dipublikasikan bersama dengan situs terkait (www.timberinvestigator.info) yang memuat berbagai sumber informasi tambahan. Situs tersebut akan diperbarui secara teratur dengan informasi baru termasuk berbagai perubahan pada hukum, perkembangan teknologi-teknologi yang relevan dan studi kasus baru. Situs tersebut juga akan memuat berbagai informasi mengenai kontak otoritas yang relevan di UE dan AS yang terus diperbarui.

EarthSight, penerbit buku panduan ini, juga berupaya untuk mengembangkan kemitraan dengan LSM yang terlibat dalam penelitian yang relevan. EarthSight bisa menyediakan pendampingan pro-bono untuk membantu berbagai lembaga dan individu untuk membangun, mengumpulkan dan mempublikasikan kasus-kasus perdagangan kayu ilegal. Pendampingan bisa berupa dukungan untuk memperoleh atau menganalisa penggalan informasi secara terpisah (misalnya interogasi terhadap database catatan pengiriman), sampai dengan penelitian bersama secara mendalam, termasuk kegiatan lapangan. Informasi lebih lanjut mengenai kemitraan, termasuk bagaimana cara mengemukakan jika anda berminat, bisa dilihat di www.timberinvestigator.info.



Pemantauan hutan di Republik Demokratik Kongo ©REM

Bab 1: Penebangan liar, perdagangan yang terkait dan respon dari negara konsumen

1.1 Apa yang dimaksud dengan penebangan liar?

Di banyak negara penghasil kayu, mayoritas produksi kayu diperkirakan ilegal dalam berbagai cara. Pelanggaran hukum tersebar sangat luas dari hutan tropis di Amazon, Kongo dan Asia Tenggara, sampai dengan hutan boreal di Rusia. Secara keseluruhan, diperkirakan lebih dari 100 juta kubik meter kayu ditebangi secara ilegal setiap tahunnya: batang kayu dengan jumlah yang cukup untuk dibentangkan sebanyak sepuluh kali mengelilingi bumi.³

Dulu sebagian besar produksi kayu ilegal dihasilkan dari tebang pilih pohon-pohon yang bernilai tinggi, sementara sekarang terdapat peningkatan jumlah kayu ilegal yang berasal dari konversi seluruh wilayah hutan. Di Indonesia, 80 persen deforestasi untuk pertanian dan perkebunan kayu komersil merupakan hal yang melanggar hukum. Di hutan Amazon Brazil, angka ini mencapai 90 persen.⁴ Secara global, diperkirakan setidaknya separuh dari seluruh hutan tropis yang dibuka selama 12 tahun pertama pada abad ini dilakukan secara ilegal.⁵

'Penebangan liar' sering disalahartikan hanya sebatas penebangan pohon secara liar oleh para kriminal di hutan-hutan yang dilindungi. Pada kenyataannya, aktivitas yang sedemikian hanya mencakup sebagian kecil dari wajah penebangan liar yang sesungguhnya pada masa sekarang ini. Sebagian besar penebangan liar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan berlisensi pada hutan-hutan yang sudah dilengkapi perizinan, namun meskipun demikian masih melanggar satu atau berbagai rangkaian peraturan. Sebagian besar kayu yang bersumber dari praktik ilegal dicuci melalui rantai pasok 'resmi' atau yang tidak teridentifikasi sebagai ilegal dan karenanya diperdagangkan secara terbuka, bukan diselundupkan. Sering kali peraturan terpenting yang dilanggar adalah yang berkenaan dengan hak-hak komunitas

lokal. Sebagian besar kayu ilegal sekarang merupakan hasil tambahan dari pembukaan lahan secara ilegal untuk pertanian berskala besar dibandingkan dari tebang pilih tradisional.

Buku panduan ini menggunakan definisi umum penebangan liar, termasuk segala bentuk penebangan pohon, pemrosesan dan perdagangan kayu yang dilakukan bertentangan dengan legislasi atau peraturan nasional. Hal ini mencakup berbagai jenis tindak kriminal, termasuk (namun tidak terbatas) praktik-praktik seperti penerbitan izin pemanenan kayu secara ilegal, korupsi pada alokasi perizinan, pemanenan yang melebihi batas di dalam wilayah yang telah diberi izin, penghindaran pajak dan pelanggaran undang-undang perlindungan sosial. Yang terpenting, hal ini juga mencakup penebangan dan konversi hutan yang terjadi dengan melanggar hak-hak masyarakat lokal dan komunitas adat, yang seringkali bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka dan yang paling banyak mengalami penderitaan dari deforestasi.



Rakit kayu di sungai Seruyan di Indonesia ©EIA

1.2 Respon terhadap penebangan liar di pasar-pasar besar

Penebangan liar dipicu oleh penjualan kayu yang berasal dari tindakan pelanggaran hukum, yang banyak memasuki perdagangan internasional. UE dan AS merupakan kalangan importir dan konsumen kayu dan produk-produk kayu dari sumber ilegal yang terbesar di dunia. Sebagai suatu upaya untuk mengatasi keterlibatannya dalam krisis global ini, keduanya baru-baru ini telah mengesahkan legislasi yang bertujuan untuk mencegah impor dan perdagangan kayu yang berasal dari sumber ilegal. Implementasi yang efektif dari hukum-hukum tersebut - US Lacey Act dan European Union Timber Regulation (EUTR) – sangat penting bagi kesuksesan upaya yang lebih luas untuk menghentikan penebangan liar.

Meskipun tujuan khusus dari peraturan tersebut adalah untuk mengurangi hingga menghentikan impor kayu ilegal ke dalam pasar di masing-masing negara tersebut, sesungguhnya ia memiliki nilai yang jauh lebih besar. Peraturan tersebut fokus pada meningkatkan tekanan bagi negara-negara konsumen lainnya, seperti Cina dan Jepang, untuk mengesahkan legislasi serupa dan lebih jauh menekan pasar kayu ilegal. Di Eropa, EUTR merupakan komponen kritis dari suatu paket tindakan yang lebih luas yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola hutan. Beberapa langkah terpenting dalam hal ini adalah dikembangkannya perjanjian-perjanjian bilateral antara UE dengan banyak negara penghasil kayu terbesar di wilayah tropis.

Perjanjian-perjanjian ini, yang dikenal sebagai Voluntary Partnership Agreements (VPA) / Perjanjian Kemitraan Sukarela, memiliki berbagai dampak positif. Perjanjian-perjanjian tersebut mendorong pengembangan sistem-



Produk-produk yang diekspor dari Cina untuk Lumber Liquidators ©EIA

sistem verifikasi legalitas yang akan menutup akses seluruh pasar – termasuk pasar domestik – terhadap kayu ilegal. Yang terpenting, perjanjian-perjanjian tersebut menjangkau akar permasalahan penebangan liar dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, reformasi tata kelola yang bisa memiliki dampak positif jauh melampaui hutan. Tanpa EUTR yang ditegakkan dengan tepat, terdapat jauh lebih sedikit insentif bagi beberapa negara untuk mengimplementasikan perjanjian-perjanjian ini.

Atas alasan inilah, kesuksesan maupun kegagalan dari peraturan-peraturan ini memiliki implikasi yang lebih luas dari segi perjuangan untuk mengatasi penebangan liar dan peningkatan perlindungan atas hak-hak masyarakat yang bergantung pada hutan secara global. Penjelasan lebih terperinci mengenai peraturan-peraturan tersebut dan bagaimana peraturan tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengatasi penebangan liar dengan memanfaatkan informasi yang disediakan oleh masyarakat sipil bisa dilihat dibawah ini.

1.2.1 The US Lacey Act

Pada tahun 2008, AS menjadi negara pertama di dunia yang melarang impor kayu yang bersumber dari praktik ilegal dari negara lain. Negara tersebut melakukan hal ini melalui amandemen terhadap legislasi yang sudah ada sebelumnya (Lacey Act tahun 1900) yang sebelumnya hanya diterapkan terhadap hewan dan produk-produk hewani. Berdasarkan amandemen tersebut, impor, ekspor, mengangkut, menjual, menerima atau memperoleh tumbuhan apapun yang bersumber dari praktik ilegal merupakan tindak kejahatan. Meskipun peraturan ini diterapkan secara umum terhadap semua jenis tanaman dan yang dihasilkan secara domestik maupun asing, tujuan dan dampak amandemen tersebut adalah untuk melarang impor dan penjualan kayu ilegal dari luar negeri.

Lacey Act mendefinisikan kayu yang bersumber dari praktik ilegal sebagai kayu yang dipanen, diangkut atau dijual dengan melanggar hukum asing yang melindungi atau mengatur tentang pemanenan kayu, tanpa disertai pembayaran pajak negara yang relevan, atau bertentangan dengan langkah-langkah pengendalian ekspor terkait kayu. Potensi hukuman dibawah Lacey Act berkisar antara denda hingga penjara, tergantung dari tingkat pelanggaran dan sejauh apa perusahaan yang melanggar mengetahui (atau seharusnya mengetahui) tentang tindakan pelanggaran hukum tersebut. Produk-produk kayu yang diimpor dengan melanggar Undang-undang tersebut bisa disita sebarang tingkat pelanggaran yang dilakukan atau pengetahuan yang dimiliki.

Suatu ketentuan tambahan penting yang merupakan bagian dari amandemen Lacey Act tahun 2008 adalah deklarasi impor. Diterapkan secara bertahap, peraturan tersebut sekarang mewajibkan semua perusahaan yang mengimpor produk-produk kayu keras⁶ untuk mengumpulkan deklarasi formal (Deklarasi Produk Kayu / Plant Product Declaration) yang menyatakan spesies dan negara dimana kayu tersebut dipanen. Pengiriman yang sampai tanpa deklarasi yang akurat bisa disita, dan perusahaan-perusahaan yang diketahui sengaja memberikan informasi palsu dalam suatu deklarasi bisa diadili dan didenda.

Mulai bulan April 2016, ada beberapa kasus impor kayu ilegal besar yang diadili berdasarkan amandemen Lacey Act. Yang pertama melibatkan gitar Gibson, dan terkait dengan impor kayu eboni yang berasal dari Madagaskar. Meskipun sumber kayu yang ilegal merupakan faktor yang berkaitan dengan hal ini, kasus tersebut juga melibatkan berbagai tuduhan ekspor ilegal dari negara pihak ketiga (India) dan pemalsuan deklarasi impor ke dalam wilayah AS. Kasus yang kedua melibatkan suatu konsinyasi kayu gelondongan dari Peru yang tiba pada tahun 2009 dan disita berdasarkan ketentuan deklarasi dalam Lacey Act, dengan dasar kesengajaan dalam kesalahan penyebutan klasifikasi kayu tersebut sebagai produk kayu jadi. Terdapat juga bukti dimana eksportir tidak memiliki bukti resmi legalitas kayu tersebut.

Kasus yang paling terkini melibatkan bahan lantai yang diproduksi di Cina dari kayu yang dipotong di Timur Jauh Rusia dan Myanmar. Pada bulan Oktober 2015, perusahaan yang



Produk-produk yang diekspor dari Cina ke AS ©EIA

terlibat tersebut (ritel bahan lantai kayu AS, Lumber Liquidators) mengaku bersalah atas penyelundupan kayu ilegal ke wilayah AS, dan diwajibkan untuk membayar denda sejumlah lebih dari AS\$ 10 juta dan beberapa hukuman lainnya. Perusahaan tersebut mengaku bersalah atas lima pelanggaran terpisah, empat diantaranya melibatkan pernyataan palsu mengenai negara dimana kayu tersebut dipanen dan jenis spesies kayu sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Produk Tanaman.⁷

Kasus kayu gelondongan dari Peru dibongkar berdasarkan informasi rahasia yang diberikan oleh seorang pedagang. Kasus Gibson dan Lumber Liquidator dipicu oleh informasi yang dikumpulkan oleh LSM.

1.2.2 EUTR

Pada tahun 2010, Uni Eropa mengikuti langkah-langkah AS dengan mengesahkan legislasi kriminalisasi impor kayu yang bersumber dari tindakan yang melanggar hukum di negara asalnya. Legislasi tersebut, yang dikenal sebagai European Union Timber Regulation (EUTR) / Peraturan Kayu Uni Eropa, efektif berlaku pada bulan Maret 2014. Meskipun diberlakukan atas alasan yang sama, EUTR berbeda dengan Lacey Act dalam beberapa hal penting.

- Penerapan terhadap rantai pasok: EUTR hanya diterapkan terhadap perusahaan-perusahaan yang memanen atau mengimpor ("memasarkan") kayu yang berasal dari sumber ilegal, dan tidak diterapkan terhadap perusahaan-perusahaan lainnya di sepanjang rantai pasok.
- Cakupan Produk: EUTR hanya berlaku bagi produk-produk kayu yang berada di dalam daftar khusus. Ada beberapa pengecualian penting yang meliputi arang, instrumen musik, bingkai gambar, buku cetak dan beberapa jenis kayu perabot.
- Uji Tuntas (due diligence): Selain menerapkan kriminalisasi terhadap impor kayu yang bersumber dari praktik pelanggaran hukum ('larangan'), EUTR juga menerapkan suatu persyaratan hukum bagi para importir untuk melakukan 'uji tuntas' ketika membeli kayu. Kegagalan dalam melakukan uji tuntas juga merupakan pelanggaran hukum.
- Organisasi pemantau: Untuk membantu implementasi ketentuan uji tuntas, EUTR juga menyertakan beberapa peraturan terkait pengakuan resmi (dan pemeriksaan terhadap) 'Lembaga Pemantau' pihak ketiga yang bisa disewa oleh perusahaan untuk membantu mereka melakukan uji tuntas.

Perbedaan terbesarnya kemungkinan terdapat pada ketentuan uji tuntas. Hal ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan secara resmi diminta untuk mengikuti prosedur-prosedur tertentu untuk meminimalisir resiko dimana kayu yang mereka impor bersumber dari tindakan yang melanggar hukum. Kegagalan untuk melakukan hal ini merupakan pelanggaran hukum dengan sendirinya – pejabat resmi tidak perlu membuktikan bahwa kayu tersebut bersumber dari tindakan yang melanggar hukum. Ambang batas bukti yang diperlukan untuk mengajukan kasus dibawah EUTR karenanya jauh lebih rendah dibandingkan Lacey Act. Hal ini berarti bahwa serangkaian bukti yang lebih luas bisa digunakan untuk membantu implementasi dan penegakan.

Sama halnya dengan Lacey Act, EUTR hanya diterapkan bagi beberapa jenis pelanggaran hukum tertentu di negara asal pasokan. Dalam hal ini, pelanggaran hukum yang tercakup termasuk kayu yang melanggar legislasi yang mengatur mengenai hak-hak untuk memanen, proses-proses pemanenan (seperti kontrol lingkungan), pajak-pajak terkait pemanenan kayu, dan kontrol perdagangan dan bea cukai terkait sektor kehutanan. Berbeda dengan Lacey, EUTR juga secara spesifik mencakup pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum yang mengatur mengenai pemanfaatan dan hak-hak tenurial masyarakat lokal yang terdampak oleh penebangan.

Meskipun EUTR diterapkan bagi semua Negara Anggota Uni Eropa, merupakan tanggung-jawab setiap negara anggota untuk menerbitkan hukum nasional yang mendefinisikan hukumannya, mendirikan otoritas yang ditugaskan untuk mengimplementasikan hukum tersebut, dan menegakkannya dalam cakupan batas wilayah teritori masing-masing. Pada bulan Maret 2016, semua Negara Anggota terkecuali Hungaria sudah mengambil beberapa langkah dasar pada hukum dan peraturan masing-masing. Hal ini bukan berarti bahwa negara-negara lainnya sudah mengimplementasikan hukum tersebut secara efektif atau bahwa penalti yang diterapkan sudah berhasil menciptakan pelarangan, sebagaimana diatur dalam EUTR.

Meskipun hukuman maksimal yang bisa diterapkan berdasarkan EUTR merupakan hal yang sangat penting di banyak Negara Anggota, hingga saat ini belum pernah dilakukan penuntutan berdasarkan elemen larangan, dan tidak ada hukuman-hukuman signifikan yang dikenakan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan uji tuntas. Beberapa kasus menarik yang sedang berjalan berdasarkan elemen uji tuntas EUTR termasuk suatu kasus yang melibatkan perusahaan Belanda terkait impor kayu tropis gelondongan dari Kamerun, dan suatu perusahaan Swedia atas impor kayu jati yang berasal dari Myanmar dan diperdagangkan lewat Thailand. Kasus yang pertama berasal dari bukti yang diberikan oleh sebuah LSM.

Boks Satu: Rangkuman dan perbandingan Lacey Act dan EUTR (yang diterapkan bagi kayu yang bersumber dari luar negeri)

	Lacey	EUTR
Penerapan terhadap rantai pasok	Seluruh tahapan	Hanya bagi importir
Cakupan produk	Semua produk	Hanya produk-produk tertentu. Pengecualian penting meliputi arang, instrumen musik, bingkai gambar, buku cetak, dan beberapa jenis kayu perabot.
Deklarasi impor	Untuk produk-produk tertentu	Tidak diatur
Uji tuntas	Hanya relevan untuk menentukan hukuman ketika kayu sudah terbukti bersumber dari praktik ilegal	Ketentuan hukum terpisah, terlepas dari apakah kayu tersebut bersumber dari praktik ilegal atau bukan.
Pidana asal yang relevan	<ul style="list-style-type: none"> Hukum yang melindungi pohon atau mengatur pemanenannya Pajak terkait sektor kehutanan Hukum ekspor yang relevan dengan kayu 	<ul style="list-style-type: none"> Hak untuk memanen Praktek-praktek pemanenan (termasuk kontrol lingkungan) Pajak terkait sektor kehutanan Legislasi mengenai perdagangan/bea cukai khusus sektor kehutanan Pemanfaatan dan hak-hak tenurial pihak ketiga yang terdampak oleh pemanenan kayu

1.3 Bagaimana masyarakat sipil bisa membantu membasmi kayu ilegal

1.3.1 Pendahuluan

Bukti-bukti yang disajikan oleh LSM merupakan faktor penting yang meyakinkan para pembuat peraturan untuk mengamandemen Lacey Act dan mengesahkan EUTR. Bukti-bukti tersebut juga penting untuk memastikan kesuksesan legislasi-legislasi tersebut. Informasi yang disediakan oleh pihak ketiga merupakan hal yang penting untuk membantu penegakan; semua kasus yang paling signifikan yang diupayakan hingga saat ini berdasarkan Lacey dan EUTR berakar dari informasi yang disediakan oleh LSM. Informasi tersebut juga penting untuk meningkatkan implementasi dan kepatuhan terhadap peraturan tersebut dalam berbagai cara lain, memastikan bahwa hukum tersebut terus berlaku dan diperbaiki secara bertahap.

EUTR secara resmi mengenali pentingnya informasi yang disediakan oleh para anggota masyarakat. Suatu pasal dalam undang-undang tersebut secara khusus menyatakan bahwa pihak-pihak berwenang bisa melakukan pemeriksaan terhadap para pemanen domestik, importir kayu atau lembaga-lembaga pemantau dengan dasar "kekhawatiran berdasarkan bukti" yang disediakan oleh pihak ketiga terkait kepatuhan. Pembukaan peraturan ini menyatakan bahwa mereka harus "berupaya keras" untuk melaksanakan pemeriksaan dalam situasi yang sedemikian.

Otoritas EUTR di sebagian besar negara UE menyatakan bahwa mereka menggunakan informasi yang disediakan oleh pihak-pihak ketiga untuk membantu menentukan pemeriksaan apa saja yang akan dilakukan. Suatu kajian resmi EUTR pada bulan Februari 2016 menemukan kekhawatiran yang

disertai bukti secara luas dipergunakan selama dua tahun awal penerapan EUTR dan terbukti merupakan "alat yang efisien untuk mengidentifikasi produk-produk atau operator-operator yang akan diprioritaskan dalam melaksanakan pemeriksaan yang berdasarkan resiko".⁸

Informasi yang diberikan oleh masyarakat sipil bisa memiliki dampak yang luas terhadap perilaku industri, bahkan ketika informasi tersebut belum mencukupi untuk diadakannya suatu persidangan. Jika organisasi dan individual bisa mendemonstrasikan adanya resiko pelanggaran hukum yang cukup besar pada rantai pasok manapun, hal ini bisa menimbulkan 'efek segan' pada pasar. Hal ini bisa mendorong para pembeli untuk tidak mengambil resiko untuk melanggar hukum dan bisa menginformasikan uji tuntas mereka. Meskipun Lacey Act tidak menerapkan sanksi hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang gagal melakukan uji tuntas, sebagaimana yang dilakukan EUTR, perusahaan-perusahaan bisa dikenai hukuman yang lebih berat jika mereka sudah mengetahui bahwa suatu sumber kayu adalah ilegal. Para investigator masyarakat sipil bisa memastikan bahwa mereka mengetahui hal ini.

Dengan cara ini, mengalirkan serangkaian bukti kuat yang konsisten ke domain publik terkait penebangan liar dan perdagangan yang terkait dengannya akan meningkatkan kemungkinan tertangkapnya para pelanggar hukum atas pembelian kayu ilegal dan hukumannya akan bertambah jika mereka tertangkap.



Pemantauan penebangan liar melalui pesawat di Brazil ©Greenpeace

1.3.2 Jenis-jenis informasi yang bermanfaat

Spektrum pembuktian yang luas bisa bermanfaat dalam membantu mengimplementasikan dan menegakkan EUTR dan Lacey Act. Idealnya, bukti yang diberikan kepada petugas penegak hukum dengan sendirinya sudah cukup untuk menjamin bahwa akan ada langkah yang diambil. Keseluruhan rantai pasok akan terdokumentasikan dengan baik, dan bukti-bukti pelanggaran hukum yang tidak terelakkan yang jelas-jelas akan berada dibawah cakupan EUTR atau Lacey bisa diperoleh. Pada kenyataannya, hal ini jarang dilakukan. Di sebagian besar kasus, bukti yang dikumpulkan oleh pihak-pihak ketiga secara independen biasanya kurang lengkap; beberapa bukti bahkan mungkin berkaitan dengan produk-produk atau area-area hukum negara produsen yang berada di luar cakupan EUTR atau Lacey. Namun hal ini bukan berarti bahwa informasi tersebut tidak bisa dimanfaatkan untuk menimbulkan dampak.

Otoritas penegak hukum bisa bekerja berdasarkan bukti yang masih sebagian atau belum lengkap, dengan menggunakan otoritas mereka untuk melakukan pemeriksaan dan mengakses informasi pemerintah. Misalnya, bukti kuat mengenai tindakan pelanggaran hukum terkait kayu dari suatu pemasok tertentu dari luar negeri bisa mendorong para petugas untuk memeriksa database bea cukai untuk mencari tahu apakah perusahaan-perusahaan tertentu mengimpor dari pemasok tersebut.

Bahkan ketika hanya bisa ditunjukkan bahwa suatu produk kemungkinan namun belum pasti memiliki asal yang ilegal, hal ini mungkin sudah cukup untuk mengubah perilaku perusahaan, atau mendemonstrasikan kegagalan untuk berhati-hati jika nantinya ada bukti tambahan yang muncul. Bukti yang terkait dengan produk-produk atau area-area hukum negara asal yang tidak tercakup dalam legislasi yang

sekarang bisa menjadi tambahan informasi bagi amandemen-amandemen terhadap legislasi tersebut di masa yang akan datang. Komisi Eropa (European Commission), misalnya, sudah mempertimbangkan kemungkinan perluasan kategori-kategori produk yang tercakup dalam EUTR.

Boks 1 merangkum berbagai macam cara dimana informasi bisa mendukung implementasi hukum, memperluas hukum, dan mempengaruhi perilaku dan kebijakan. Berbagai kemungkinan penerapan yang tersedia bagi berbagai organisasi atau individu akan sangat bergantung pada bentuk informasi yang berhasil mereka kumpulkan. Misalnya, mereka mungkin bisa mengumpulkan intelijen terperinci mengenai suatu perusahaan, yang bisa memicu langkah penegakan. Sebagai alternatif, mereka mungkin tidak memiliki informasi terperinci mengenai satu perusahaan, namun memiliki bukti-bukti yang jauh lebih luas mengenai laju tindakan pelanggaran hukum secara keseluruhan dari suatu negara. Hal ini kemungkinan tidak akan memicu penegakan hukum terhadap suatu perusahaan tertentu, namun bisa digunakan untuk menghalangi perusahaan-perusahaan lain agar tidak mengambil sumber dari negara tersebut. Mereka bisa mengembangkan suatu bukti yang kokoh mengenai pelanggaran hukum yang terdapat dalam suatu produk tertentu yang pada saat ini berada di luar cakupan EUTR, sehingga bisa mendukung upaya-upaya perluasan EUTR agar mencakup hal tersebut.

Bab yang setelah ini menjelaskan secara terperinci berbagai cara dimana informasi yang relevan dan bukti bisa dikumpulkan oleh orang-orang di berbagai belahan dunia. Bab terakhir akan menjelaskan cara-cara terbaik untuk mengemas informasi ini, untuk memaksimalkan dampaknya.



Kayu-kayu dengan tanda label dan GPS di Indonesia ©EIA

Boks Dua: Cara-cara dimana bukti dari pihak-pihak ketiga bisa membantu mengimplementasikan Lacey dan EUTR

- **Mengarahkan secara langsung terhadap langkah penegakan.** Idealnya, bukti yang disediakan bagi para petugas penegakan hukum sudah memadai dengan sendirinya untuk menjamin bahwa akan ada langkah yang diambil, meskipun hal ini jarang.
- **Memberikan langkah awal.** Meskipun kurang lengkap, suatu bukti yang sudah terdokumentasikan dengan baik yang diberikan oleh LSM kepada otoritas penegakan hukum sudah bisa memberikan poin awal permulaan dimana mereka bisa mulai membangun suatu kasus.
- **Mempengaruhi prioritas penegakan.** Selain mendorong suatu langkah awal yang mendasari langkah-langkah pengembangan, bukti yang bagus namun kurang lengkap yang disediakan oleh LSM bisa membantu mempengaruhi berbagai keputusan yang dibuat oleh para petugas penegak hukum mengenai bagaimana memfokuskan sumber daya, termasuk memilih pengiriman, perusahaan atau rantai pasok produk mana saja yang perlu diperiksa.
- **Mendemonstrasikan pengetahuan awal.** Dibawah EUTR maupun Lacey, apakah suatu kasus akan ditindaklanjuti oleh pihak otoritas (dan tingkat hukuman yang diterapkan) sebagian tergantung pada seberapa banyak yang diketahui oleh suatu perusahaan, atau yang seharusnya telah diketahui, bahwa kayu tersebut ilegal atau

memiliki resiko pelanggaran hukum yang tinggi. LSM bisa membantu mendorong dilakukannya persidangan nantinya, dan menambah tingkat hukuman yang relevan, dengan menghubungi perusahaan-perusahaan yang ditemukan mengimpor atau menangani produk-produk yang berisiko tinggi dan memperingatkan mereka akan resiko yang terkandung.

- **Mempengaruhi perilaku sektor swasta.** Bahkan ketika bukti yang didapatkan oleh LSM belum menghasilkan langkah penegakan, hal ini tetap bisa menghasilkan perubahan-perubahan secara sukarela pada praktek-praktek pembelian oleh perusahaan-perusahaan. LSM bisa mengirimkan informasi secara langsung kepada para pembeli yang teridentifikasi, dan jika perlu juga memberikan tekanan dengan mempublikasikan temuan-temuan mereka.
- **Mempengaruhi kebijakan pemerintah.** Ketika bukti yang didapatkan oleh LSM belum digunakan dalam langkah penegakan karena bukti tersebut berkaitan dengan produk-produk yang tidak berada di dalam cakupan atau merupakan tindak pidana asal, atau karena pemerintah atau otoritas terkait telah gagal dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan implementasi dan penegakan layak, maka pengeksposan terhadap kasus tersebut bisa membantu mendorong implementasi yang lebih baik atau bahkan membantu mendorong berbagai amandemen legislasi sehingga cakupannya bisa diperluas.



Kayu ilegal yang disita di perbatasan Indonesia-Malaysia ©EIA

Bab 2: Bagaimana cara mendeteksi dan mendokumentasikan penebangan liar dan perdagangan yang terkait dan menelusuri rantai pasok

2.1 Pendahuluan

Mengidentifikasi dan melacak kayu ilegal hingga ke pasar membutuhkan pemeriksaan terhadap serangkaian dataset dan sumber informasi yang berbeda-beda di beberapa titik yang berbeda di sepanjang rantai pasok. Tidak ada satu pendekatan khusus yang bisa digunakan di semua kasus dalam investigasi perdagangan kayu, namun cenderung berupa rangkaian beberapa pedoman dan pendekatan yang berbeda-beda yang bisa diterapkan, dengan berbagai tingkat efektivitas yang berlainan pada kasus-kasus yang berbeda-beda.

Untuk memahami kedua jenis tindakan pelanggaran hukum dan sarana yang digunakan untuk mengidentifikasinya, rantai pasok bisa dibagi menjadi tiga tahapan umum:

Tahap 1: Pemanenan kayu

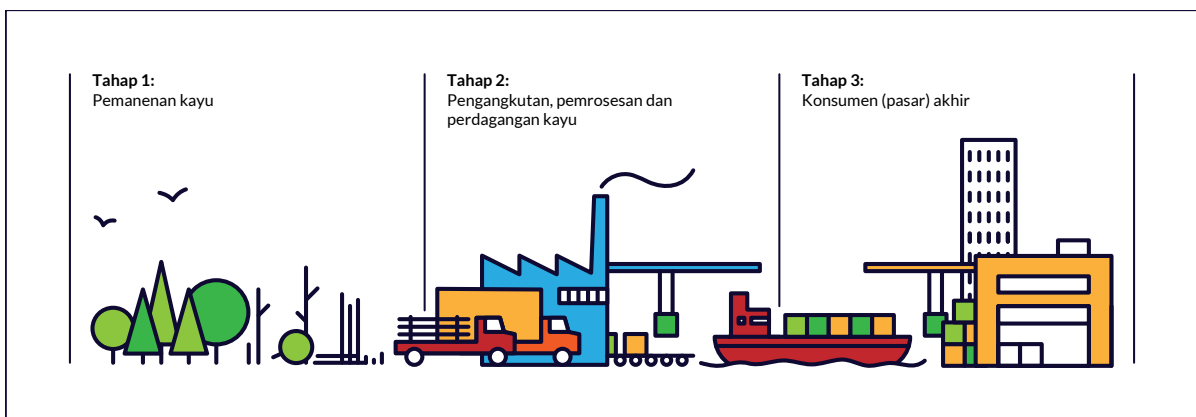
Tahap 2: Pengangkutan, pemrosesan dan perdagangan kayu, yang mencakup perdagangan sejak saat pemanenan hingga diekspor.

Tahap 3: Konsumen (pasar) akhir

Investigasi bisa mulai dilakukan pada tahap manapun di

sepanjang rantai pasok. Titik awal investigasi yang dipilih tergantung pada perpaduan dari kapasitas lembaga yang melaksanakan investigasi tersebut, lokasinya dan bukti awal yang tersedia. Misalnya, LSM yang berbasis di Inggris bisa melakukan penelusuran mundur pada suatu rantai pasok dari suatu produk yang berisiko tinggi yang dijual di dalam wilayah Inggris. Suatu LSM yang berbasis di kota-pelabuhan di Indonesia bisa berusaha untuk melakukan penelusuran suatu rantai pasok baik dengan cara mundur ke poin awal atau maju ke arah pasar. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 1, suatu investigasi sudah bermanfaat meskipun belum mencakup keseluruhan rantai pasok. Bahkan, ia tidak perlu mengidentifikasi dimana kayu tersebut dipanen atau menunjukkan bahwa kayu tersebut dipanen secara ilegal, jika ia bisa menunjukkan bahwa kayu tersebut diproses atau diperdagangkan dengan melanggar hukum.

Bab yang berikutnya akan memberikan suatu gambaran umum mengenai jenis-jenis tindakan yang melanggar hukum yang dapat terjadi di berbagai titik yang berbeda dalam rantai pasok, metode-metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasinya, dan cara-cara untuk menelusuri dari panen sampai ke pasar.



2.2 Panen

2.2.1 Jenis-jenis pemanenan yang melanggar hukum

Kayu dapat dipanen menggunakan beberapa cara yang berbeda, dari tebang pilih di hutan-hutan yang dikelola oleh masyarakat, misalnya, sampai dengan pembukaan wilayah yang luas untuk dikembangkan menjadi lahan perkebunan. Cara apapun yang digunakan, legalitas panen bisa disederhanakan menjadi dua pertanyaan:

1. Apakah ada hak yang mutlak dan cukup memadai untuk mengambil kayu dari wilayah tersebut?
2. Apakah kayu tersebut ditebang sesuai dengan ketentuan hukum yang melekat pada hak tersebut?

Dalam bab ini, kedua hal tersebut diatas masing-masing akan disebut sebagai "hak untuk memanen" dan "pelanggaran operasional".

Berdasarkan prinsip-prinsip yang disebutkan di atas, ada berbagai jenis tipologi tindakan pelanggaran terhadap hukum, yang menggambarkan luasnya cakupan syarat-syarat yang melandasi hak-hak pemanenan. Di hampir setiap negara, proses-proses perizinan yang cukup rumit sudah berevolusi untuk menata berbagai aspek pemanenan. Proses-proses yang dimaksud sudah melampaui pertanyaan sederhana terkait hak untuk menebang pohon. Ada beberapa peraturan yang bertujuan untuk memastikan bahwa negara tidak mengalami kerugian, mengurangi ancaman lingkungan, masyarakat memperoleh beberapa manfaat, dan spesies yang terlindungi tidak dipanen. Pelanggaran terhadap aspek pada rezim tersebut bisa menyebabkan produk yang dihasilkan menjadi tidak sah atau ilegal.

Meskipun hutan-hutan yang memasok perdagangan global kayu tersebar di seluruh dunia, proses-proses perizinan dan cara-cara pelanggarannya menunjukkan lebih banyak kesamaan dibandingkan perbedaan. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), misalnya, merupakan syarat wajib yang pada umumnya digunakan untuk melakukan tebang pilih dan konsesi pembukaan lahan. Konsesi kayu yang mempraktikkan 'pengelolaan hutan yang berkelanjutan' biasanya mewajibkan adanya rencana penebangan tahunan, yang menentukan wilayah-wilayah yang boleh dipanen dalam waktu setahun dan seberapa banyak yang boleh dipanen. Perusahaan-perusahaan yang memanen kayu biasanya dikenai pajak.

Bab ini tidak akan memberikan katalog seluruh ketentuan hukum, namun akan fokus menjelaskan tindakan pelanggaran

hukum yang sering teridentifikasi dan cara-cara mendeteksi dan mendokumentasikannya. Tipologi ini belum mencakup semua jenis pelanggaran hukum terkait penebangan, namun sudah memberikan suatu gambaran luas mengenai praktik-praktik pelanggaran hukum yang diidentifikasi oleh masyarakat sipil di seluruh Asia, Afrika, Amerika Latin dan Timur Jauh Rusia.

Pelanggaran-pelanggaran Hukum terkait Hak untuk Memanen

Penebangan di wilayah-wilayah yang tidak memiliki izin

Suatu bentuk penebangan liar yang paling banyak dilakukan adalah yang bertempat di wilayah-wilayah yang tidak memiliki hak baik pada lahan ataupun kayu. Hal ini bisa meliputi taman nasional, wilayah lindung, atau yang dilakukan oleh orang luar di wilayah yang dicadangkan bagi masyarakat adat. Penebangan juga bisa dilakukan setelah perizinan sudah kadaluwarsa, atau sebelum perizinan tersebut diperoleh. Pada suatu praktik yang didokumentasikan di Laos, Republik Demokratik Kongo, Peru, Brazil dan Timur Jauh Rusia, penebangan dilakukan dengan cara memperoleh hak untuk memanen di satu wilayah dan menggunakan izin tersebut sebagai kedok untuk melakukan penebangan di tempat lain yang tidak dikenai hak.

Melakukan penebangan di wilayah-wilayah tanpa memiliki perizinan yang diperlukan

Sebagaimana dijelaskan di atas, proses untuk memperoleh hak hukum atas suatu wilayah hutan untuk melakukan tebang pilih atau konversi menjadi pemanfaatan lain membutuhkan serangkaian proses hukum dan administrasi, dan berbagai perizinan. Jika proses-proses tersebut dipercepat atau diabaikan, dan akibatnya izin tidak diperoleh, produk dari konsesi-konsesi tersebut bisa menjadi ilegal.

AMDAL dan rencana penebangan tahunan merupakan contoh-contoh perizinan yang penting namun sering kali tidak dimiliki. Di Brazil, kayu sudah diproduksi secara ilegal dari pembukaan wilayah untuk perkebunan swasta tanpa adanya 'otorisasi deforestasi'. Di Republik Demokratik Kongo, kontrak-kontrak konsesi penebangan perlu mencakup kesepakatan sosial dengan masyarakat setempat, yang sering kali tidak ada. Di Indonesia, sering kali perizinan untuk memanen dan menjual tegakan kayu komersil belum diperoleh. Pada masing-masing contoh yang disebutkan sebagian hak atau izin mungkin sudah dimiliki, namun belum seluruhnya sebagaimana diperlukan.

Alokasi izin ilegal

Pada beberapa kasus dimana semua perizinan telah diperoleh, masih ada kemungkinan untuk mengidentifikasi tindakan pelanggaran hukum pada cara-cara dimana perizinan tersebut diterbitkan. Hal ini bisa terjadi karena kelalaian pada lembaga-lembaga pemerintah, atau korupsi. Praktik ini sering terjadi di Indonesia, terutama melalui perolehan izin yang mensyaratkan AMDAL sebelum proses kajian selesai dilakukan. Di Republik Kongo, para pemantau independen pernah mendokumentasikan konsesi yang diterbitkan tanpa proses tender sebagaimana diwajibkan berdasarkan hukum, dan izin penebangan yang diterbitkan bagi konsesi-konsesi kelapa sawit sebelum AMDAL selesai dilakukan. Beberapa perizinan kemungkinan diperoleh dari orang-orang yang memiliki koneksi dengan politisi, atau bahkan oleh perusahaan-perusahaan yang secara langsung dimiliki oleh politisi. Di beberapa negara, hal ini merupakan tindakan yang melanggar hukum. Dalam kasus manapun, baik legal maupun tidak, eksploitasi yang sedemikian oleh politisi penting untuk didokumentasikan dan diungkapkan.

Penebangan terhadap spesies yang dilindungi

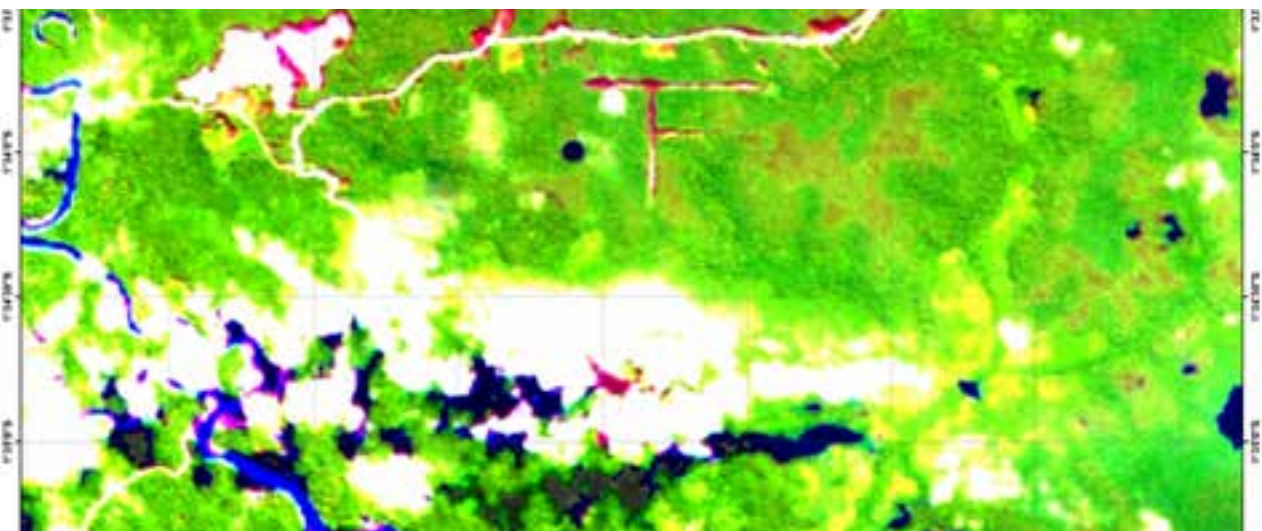
Banyak spesies kayu dengan nilai jual tertinggi yang merupakan target para pedagang Eropa dan Amerika yang sudah semakin langka, terancam dan dilindungi oleh berbagai hukum domestik dan internasional. Spesies seperti Ramin di Indonesia, Wenge dan Afrormosia di Cekungan Kongo, dan Mahoni Daun Lebar di Amazon sudah masuk ke dalam daftar Lampiran Konvensi mengenai Perdagangan Internasional Spesies Terancam (Convention on the International Trade in Endangered Species (CITES)), yang menerapkan peraturan tambahan mengenai pengendalian perdagangan internasional.

Spesies-spesies tersebut terutama rentan terhadap penebangan liar karena nilainya. Pemanenan ilegal bisa terjadi baik di luar maupun di dalam wilayah konsesi. Di Republik Demokratik Kongo, misalnya, Wenge telah dipanen tanpa izin sebagaimana diwajibkan berdasarkan hukum. Di Peru, penebangan Mahoni dilakukan secara ilegal dan dicuci melalui konsesi penebangan yang seakan-akan legal dengan menggunakan suatu jaringan dokumen palsu [lihat **Studi Kasus 6**].

Pelanggaran Operasional

Pelanggaran terhadap ketentuan rencana pemotongan

Kegiatan operasional baik tebang pilih maupun konsesi pembukaan lahan biasanya diatur dalam rencana pengelolaan hutan. Rencana tersebut menjelaskan wilayah-wilayah dimana pemanenan bisa dilakukan selama suatu periode. Rencana tersebut juga mengatur tentang batas hukum penting lainnya yang didesain untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang, seperti kuantitas maksimal dan diameter minimum pohon-pohon dari berbagai spesies yang berbeda yang boleh dipanen. Ketentuan-ketentuan tersebut bisa dilanggar dalam beberapa cara. Misalnya, dengan terlalu banyak memanen, menebang pohon-pohon yang masih terlalu kecil, atau melakukan penebangan di wilayah-wilayah di luar ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam rencana tersebut. Praktik pelanggaran hukum lainnya yang sering dilakukan adalah memanen kayu di wilayah lereng yang curam atau bersebelahan dengan sungai, yang seringkali dilarang untuk mengurangi erosi tanah atau polusi air.



Citra satelit yang menunjukkan pembukaan hutan sebelum perizinan diperoleh di Indonesia ©EIA

Melanggar ketentuan perizinan lainnya

Hak untuk memanen biasanya didasari oleh berbagai proses atau izin tambahan, yang diwajibkan oleh hukum, yang ditujukan untuk mengurangi dampak penebangan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Seringkali, ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa warga masyarakat memperoleh sedikit manfaat dari perusahaan-perusahaan yang melakukan penebangan, atau agar hak mereka (meskipun seringkali belum sepenuhnya diakui menurut hukum) tidak dilanggar. Salah satu contoh perizinan atau proses yang dimaksud adalah AMDAL, yang mewajibkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengurangi dampak dari kegiatan-kegiatan mereka. Proses AMDAL bukan merupakan kegiatan sekali jalan, namun lebih seperti proses berulang yang dilakukan secara terus-menerus selama perusahaan tersebut masih beroperasi. Karena proses ini mahal, dan bisa membatasi kemampuan suatu perusahaan untuk mengeksploitasi berbagai sumber daya, AMDAL seringkali dipalsukan atau dilanggar. Di beberapa negara, sebagaimana di Indonesia, pelanggaran hukum AMDAL merupakan suatu tindak kriminal yang bisa membuat pelaku dipenjara. Karenanya, suatu proses AMDAL yang kurang layak, secara mendasar mengurangi legalitas hak untuk memanen.

Kesepakatan sosial antara perusahaan dan masyarakat, yang diwajibkan menurut hukum, merupakan bentuk lain hak atau proses yang melandasi hak untuk memanen. Hal ini diwajibkan di Republik Demokratik Kongo, misalnya, dimana perusahaan-perusahaan secara rutin ditemukan melanggar ketentuan-ketentuan kesepakatan sosial yang telah dibangun dalam kontrak. Untuk meningkatkan pendapatan di negara asal, kontrak-kontrak penebangan sering kali memuat kewajiban bagi perusahaan untuk membangun pabrik kayu atau memproses suatu persentase minimum kayu yang mereka panen. Kewajiban tersebut juga sering diabaikan.

Menebang di luar batas wilayah

Pembukaan atau pemanenan di luar batas wilayah konsesi merupakan praktik yang umum dilakukan. Di banyak wilayah hutan terpencil, batas wilayah tidak ditandai secara jelas, dan kepatuhan terhadap batas-batas yang diatur dalam berbagai peraturan jarang diperiksa dengan cermat oleh otoritas.

Penghindaran pajak

Perusahaan-perusahaan penebangan biasanya diwajibkan untuk membayar pajak khusus kehutanan. Hal ini biasanya berbentuk pajak berdasarkan area yang disewakan atau dikelola oleh perusahaan, dan pajak berdasarkan volume masing-masing spesies yang dipanen. Seringkali proses penentuan kewajiban pajak bergantung pada inventori hutan, yang sering kali bergantung pada pelaporan pribadi atau petugas hutan yang terbatas. Hal ini menciptakan banyak celah dan kelemahan dalam pengawasan sehingga memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk mengecilkan kewajiban mereka atau menghindari membayar pajak secara keseluruhan, sehingga kayu yang dipanen menjadi ilegal.

Pelaporan volume dibawah jumlah yang sesungguhnya merupakan permasalahan yang merajalela di Amerika Latin, Afrika dan Asia. Praktik umum lainnya adalah pelaporan palsu dalam hal spesies, dengan mengganti spesies bernilai tinggi dan langka menjadi spesies dengan nilai yang lebih rendah. Ketika perusahaan membuka lahan tanpa izin khusus yang mengizinkan penjualan kayu komersil, sebagaimana sering dilakukan di Indonesia, produk tersebut secara efektif "tidak masuk buku" dan karenanya terhindar dari semua jenis pajak ketika dipanen. Praktik ini juga bisa menjadi lebih rumit; di RDK para pemantau independen telah menduga bahwa perusahaan-perusahaan penebangan menegosiasikan kesepakatan yang melanggar hukum dengan pemerintah sehingga mereka bisa mengelak dari pembayaran pajak.



2.2.2 Melakukan investigasi terhadap pemanenan: Kajian literatur

Prinsip melakukan investigasi legalitas pada saat pemanenan cukup sederhana. Hal ini dilakukan dengan membandingkan antara data referensi resmi yang menjelaskan pemanenan sebagaimana yang diizinkan dan persyaratannya, dengan apa yang sebenarnya terjadi di hutan.

Tantangan terbesarnya adalah mengakses informasi yang dibutuhkan. Data referensi resmi yang menentukan apa saja yang diperbolehkan biasanya dipegang oleh pemerintah, yang seringkali enggan untuk membuka data tersebut. Menentukan apa yang sesungguhnya terjadi, sebaliknya memiliki tantangan-tantangan teknis, logistik dan keamanan. Bab ini menjelaskan dimana data-data tersebut bisa diketemukan, dan bagaimana data tersebut bisa dibandingkan satu sama lain di setiap tahap investigasi untuk mengidentifikasi legalitas.

Menentukan suatu sasaran

Investigasi diawali dengan bukti indikasi, atau suatu hipotesa. Bukti indikasi ini bisa berupa kesaksian dari suatu komunitas bahwa penebangan liar sedang terjadi di wilayah teritori mereka. Atau bisa juga berupa artikel berita yang menyebutkan bahwa pejabat resmi pemerintah, menyatakan bahwa sebagian besar perusahaan perkebunan di suatu wilayah kabupaten/kota tertentu sedang membuka hutan tanpa memiliki izin pemanenan kayu sebagaimana diwajibkan. Bukti ini memberikan suatu atau beberapa sasaran: baik nama suatu perusahaan, sekelompok perusahaan, atau suatu jenis perusahaan. Ketika belum ada informasi yang jelas mengenai pelaku, kemungkinan sasaran bisa berupa suatu wilayah geografis, atau bahkan spesies tertentu yang mengalami eksploitasi yang terlalu berlebihan.

Suatu sasaran bisa diketemukan dengan cara penelusuran pasar. Data perdagangan kemungkinan mengidentifikasi suatu perusahaan tertentu, yang terlibat dalam pemanenan, diantara para eksportir terkemuka yang mengakses pasar yang sensitif. Dalam situasi yang sedemikian, bukti awal dimana perusahaan tersebut terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum kemungkinan belum terlalu kuat, namun signifikansinya dalam sektor atau rantai pasok bisa membuahkan investigasi. Hal ini terutama bisa terjadi ketika tingkat pelanggaran hukum diketahui tinggi dalam suatu negara pemasok. Ketika investigasi mulai dilakukan dengan mengidentifikasi para pedagang ritel atau importir produk-produk berisiko tinggi, target tersebut bisa diidentifikasi dengan penelusuran balik secara sistematis melalui rantai pasok mereka. Pada kasus-kasus yang sedemikian, mungkin sudah selangkahnya untuk mengawali investigasi dengan beberapa proses sebagaimana dibahas dalam Bab 2.4.



Contoh batas-batas izin penebangan dan perkebunan dan identitas pemegang izin yang disebutkan dalam website Global Forest Watch

Memperoleh data perizinan

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, data resmi kemungkinan sulit untuk diperoleh. Untuk mendapatkannya, penting untuk 'melempar jaring selebar mungkin', baik dalam hal data yang dicari, maupun tempat dimana data tersebut dicari. Selain perizinan terkait perusahaan atau wilayah tertentu, penting juga untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data kontekstual karena perbandingan antara berbagai dataset yang berbeda bisa memberikan jawaban-jawaban penting. Contoh utama terkait hal ini misalnya perbandingan antara data agregat pemanenan kayu dalam suatu wilayah tertentu, dengan rencana tata ruang atau zonasi hutan di wilayah yang ditunjuk untuk penebangan atau konversi menjadi lahan pertanian. Penting juga untuk mengingat bahwa informasi mengenai perizinan suatu wilayah tertentu seringkali disertakan dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan wilayah-wilayah yang bersebelahan.

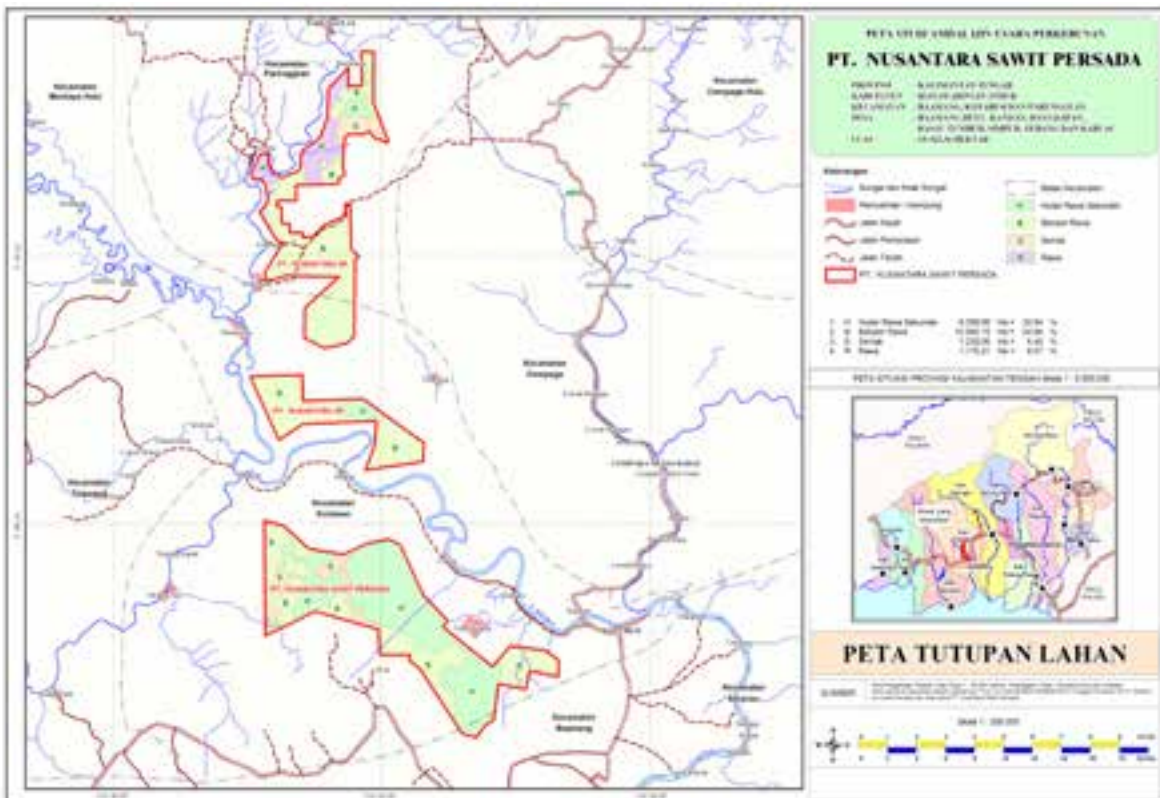
Internet merupakan sumber informasi perizinan yang relevan yang paling mudah diakses. Data kemungkinan diterbitkan oleh lembaga-lembaga pemerintah itu sendiri di website mereka. Data tersebut juga kemungkinan sudah pernah diperoleh dan diterbitkan oleh pihak-pihak ketiga sebelumnya, seperti surat kabar atau LSM. Misalnya, informasi mengenai perizinan (termasuk batas-batas dan nama izin) sekarang sudah tersedia bagi banyak negara melalui website Global Forest Watch dari World Resources Institute. Berbagai laporan dari lembaga-lembaga konservasi, mengenai wilayah-wilayah yang dilindungi maupun rencana umum pemanfaatan lahan, juga sering memuat peta terperinci mengenai perusahaan-perusahaan penebangan, pertambangan dan perkebunan yang lokasinya bersebelahan. Beberapa perusahaan kemungkinan juga menerbitkan informasi mengenai perizinan yang telah mereka peroleh, termasuk dalam laporan-laporan tahunan dan berbagai pengumuman resmi.

Salah satu sumber informasi yang sangat kaya adalah prospektus yang diterbitkan oleh berbagai perusahaan dalam daftar bursa saham. Ketika perusahaan-perusahaan tersebut menjadi anggota suatu skema sertifikasi, seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil atau Forest Stewardship Council, website milik skema atau masing-masing lembaga sertifikasi sering kali memuat informasi yang bermanfaat. Memanfaatkan pencarian istilah dengan cerdas dan menyadari keterbatasan mesin pencarian (search engine) adalah hal-hal penting ketika melakukan pencarian online [Lihat **Tool Box**: Sumber informasi online].

Beberapa informasi kemungkinan berada di domain publik, namun tidak ada di internet. NGO, terutama LSM lokal yang menangani area yang diminati, seringkali memegang data-data yang belum dipublikasikan yang mereka peroleh dari pemerintah selama mereka bekerja. Komunitas masyarakat bisa menyediakan sumber data perizinan yang sangat kaya, yang kemungkinan diberikan kepada mereka selama proses-proses konsultasi, oleh pemerintah atau perusahaan. Bahkan di wilayah-wilayah dimana hak-hak komunitas tergolong lemah, terkadang ada suatu tanggung-jawab untuk menyediakan informasi bagi mereka. Di berbagai peristiwa, anggota masyarakat akan dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalam atau sekitar wilayah mereka, sehingga bisa menyediakan akses informasi lebih jauh. Pemerintah dari

beberapa negara mempublikasikan informasi relevan hanya dalam bentuk cetak, baik dalam bentuk pengumuman di surat kabar atau dalam jurnal resmi.

Ketika informasi tidak tersedia di domain publik, informasi tersebut harus langsung dicari dari lembaga-lembaga pemerintah yang relevan. Namun, di sebagian besar wilayah, kurangnya transparansi dan kolusi antara pemerintah dan perusahaan menghadirkan banyak tantangan. Di banyak negara, manajemen data juga kurang memadai, dan berbagai catatan kemungkinan bahkan tidak lengkap, meskipun bisa diakses. Data kemungkinan sengaja dibuat kacau dan bahkan dipalsukan untuk menghindari pemeriksaan. Meskipun demikian, memperoleh data melalui jalur-jalur resmi bisa mendukung suatu dasar bukti yang kuat. Penting untuk mengetahui bahwa karena perusahaan-perusahaan dikenakan serangkaian peraturan yang berbeda, perizinan juga selalu datang dari serangkaian sumber, dari berbagai departemen pemerintah dan di berbagai tingkatan pemerintah, dari daerah hingga pusat. Ketika beberapa sumber kemungkinan enggan merilis informasi, sumber lain mungkin lebih siap. Beberapa negara, seperti Peru dan Indonesia, telah mengesahkan undang-undang mengenai Keterbukaan Informasi, yang memberikan hak bagi warga negara untuk mengakses beberapa jenis informasi. [Lihat **Tool Box**: Keterbukaan Informasi].



Tool Box: Keterbukaan Informasi

Banyak negara yang memiliki peraturan yang secara umum disebut sebagai undang-undang Keterbukaan Informasi dalam bentuk yang berbeda-beda di masing-masing tempat. Peraturan tersebut disahkan untuk memberikan hak hukum bagi warga negara untuk memperoleh informasi yang dipegang oleh pemerintah, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sipil untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah.

Peraturan-peraturan tersebut secara umum menjelaskan mengenai jenis-jenis informasi yang seharusnya bisa diakses oleh masyarakat berdasarkan permintaan, informasi yang harus dipublikasikan secara proaktif, dan informasi yang masih dikenai pembatasan. Informasi komersial yang sensitif secara umum berada pada kategori terakhir, sehingga menjadi tantangan dalam mengakses informasi yang berhubungan dengan perusahaan. Kemauan lembaga-lembaga pemerintah untuk merilis informasi sesuai dengan hukum sangat bervariasi, dimana pemerintah seringkali menahan informasi dan hal ini bertentangan dengan hukum. Di Indonesia, misalnya, LSM harus menempuh jalur hukum untuk memaksa pemerintah untuk mempublikasikan data yang relevan terkait pemanenan dan pemrosesan kayu.

Meskipun demikian, peraturan-peraturan tersebut sudah bisa dan pernah dimanfaatkan sebagai alat-alat penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat sipil untuk memonitor sektor kehutanan dan mengidentifikasi pelanggaran hukum dalam



Petugas Kementerian menyerahkan data kepada Forest Watch Indonesia. ©FWI

pemanenan dan perdagangan kayu. Environmental Investigation Agency, misalnya, mampu membangun sistem pencucian kayu yang rumit yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Peru [Lihat **Studi Kasus 6**] dengan menggunakan undang-undang untuk mengakses data pemerintah mengenai ekspor dan laporan-laporan inspeksi konsesi kayu.

Peraturan Keterbukaan Informasi dan Voluntary Partnership Agreements (Perjanjian Kemitraan Sukarela)

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan mengenai Keterbukaan Informasi yang khusus mengenai kayu sudah dimasukkan ke dalam naskah Voluntary Partnership Agreements (VPA), yang merupakan peraturan-peraturan hukum antara EU dan beberapa negara pengekspor kayu untuk mendorong suplai kayu legal terverifikasi (lihat Bab Satu). Perjanjian ini menerapkan beberapa kewajiban hukum untuk membuka informasi, bahkan di negara-negara dimana undang-undang keterbukaan informasi belum disahkan.

Sebagian besar naskah VPA meliputi Lampiran yang menjelaskan mengenai informasi yang harus dipublikasikan, dalam berbagai cara, untuk memfasilitasi pemantauan legalitas. Hal ini biasanya meliputi berbagai data, sampai dengan lokasi masing-masing hak penebangan dan lokasi fasilitas-fasilitas pemrosesan yang valid. Hal ini juga meliputi kumpulan data produksi penebangan tahunan. Implementasi VPA lambat dan bervariasi, sehingga ada kemungkinan dimana datanya tidak tersedia, meskipun data tersebut tetap harus bisa diakses. Lampiran mengenai Informasi Publik telah disertakan ke dalam VPA di negara-negara berikut ini:

- Kamerun (Lampiran VII)
- Republik Afrika Tengah (Lampiran XI)
- Indonesia (Lampiran IX)
- Liberia (Lampiran IX)
- Republik Kongo (Lampiran X)

VPA dinegosiasikan dengan beberapa negara lain di Amerika Latin, Afrika dan Asia. Naskah VPA yang sudah final, termasuk Lampiran-lampirannya, bisa dilihat di website FLEGT EU.⁹

Tool Box: Sumber informasi online

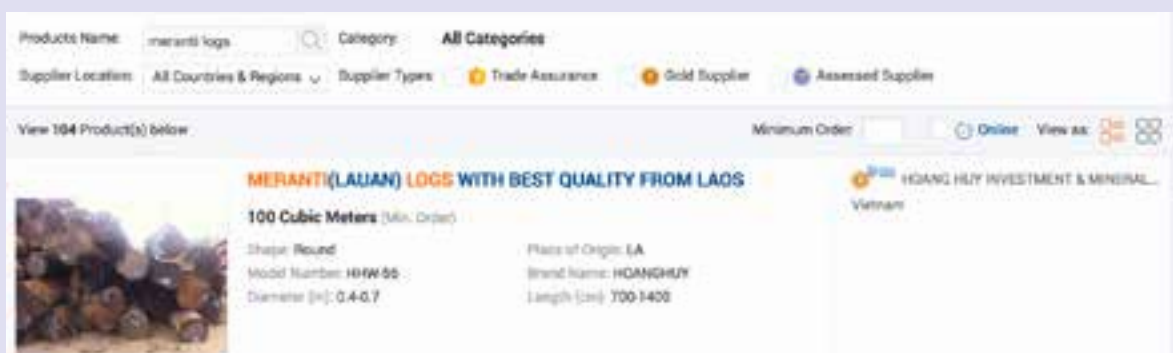
Data relevan dalam jumlah besar tersedia online, bahkan yang berkaitan dengan negara-negara yang kurang begitu jelas. Pemanfaatan mesin pencari (search engine) yang cenderung sederhana bisa memberikan akses ke berbagai perizinan, latar belakang beberapa perusahaan dan mengidentifikasi berbagai rute pasar. Namun, praktik yang baik terkait mencari kemana dan bagaimana cara mencarinya perlu diterapkan untuk memastikan bahwa semua kemungkinan peluang sudah habis ditelusuri.

Ketika pencarian awal membuahkan hasil temuan potensial menarik yang jumlahnya luar biasa banyak, penting untuk memanfaatkan istilah pencarian dengan cerdas agar bisa fokus pada informasi kunci. Pencarian bisa dibatasi hanya untuk hasil-hasil dari website lembaga pemerintah yang relevan, misalnya, atau terbatas hanya untuk hasil-hasil yang terdapat dalam jenis-jenis dokumen tertentu, seperti dokumen Excel atau PDF. Pencarian juga bisa dikategorikan dalam kata sehingga hanya hasil-hasil yang memiliki nama perusahaan dan jenis perizinan tertentu yang muncul. Sebagian besar mesin pencari memiliki fitur 'pencarian mutakhir' ('advance search') untuk membantu, namun biasanya pembatasan pencarian juga bisa dilakukan dengan lebih mudah, yaitu dengan mengetik teks tambahan pada boks pencarian biasa (misalnya, dengan menambahkan 'website: [nama domain]' agar hasilnya terbatas hanya dari domain tersebut.

Merupakan hal yang penting untuk mengingat bahwa mesin pencari merupakan alat yang tidak sempurna. Beberapa informasi mungkin bisa diketemukan dalam suatu mesin pencarian, namun tidak ada di mesin yang lain, sehingga mungkin bermanfaat untuk mencoba

beberapa mesin pencari. Konten 'website tersembunyi' ('hidden web') meliputi informasi yang bisa diakses hanya melalui pencarian pada website-website yang relevan (seperti informasi anggota pada website skema sertifikasi seperti FSC, atau database artikel-artikel lama pada website surat kabar), informasi yang hanya bisa diakses berdasarkan registrasi (seperti database resmi pemerintah mengenai rekam keuangan dan kepemilikan perusahaan), dan arsip-arsip halaman website lama. Merupakan hal yang tak kalah penting untuk mengingat bahwa informasi yang diperoleh secara online bisa saja tidak dapat dipercaya atau sudah tidak berlaku lagi.

Meskipun sumber-sumber informasi utama terkait perizinan atau perusahaan seringkali adalah website pemerintah, perusahaan, LSM dan pemberi sertifikasi, sumber online lainnya juga sama pentingnya atau lebih bernilai ketika menyangkut bentuk-bentuk informasi relevan yang berbeda. Misalnya, jika digunakan oleh perusahaan yang tertarik, syarikat perdagangan online (e-dagang) seperti Alibaba.com bisa menjadi sumber informasi yang sangat diperlukan. Ketika penelitian fokus mengenai suatu wilayah atau spesies tertentu, fokus tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk mengidentifikasi beberapa target. Hal ini bisa menjadi tuntunan untuk investigasi tersembunyi ke dalam perdagangan [lihat Bab 2.3]. Investigasi tersembunyi juga bisa dilakukan melalui platform media sosial. Walaupun media sosial seringkali menunjukkan hubungan dengan berbagai perusahaan, media tersebut lebih sering menunjukkan hubungan antar individu. Facebook dan LinkedIn terutama bisa menjadi alat yang sangat bernilai untuk mengidentifikasi koneksi antar individual. Dengan melakukan penelusuran ke arah eksternal, koneksi antar perusahaan, hubungan dagang dan bahkan korupsi bisa diidentifikasi.



Website Alibaba bisa dimanfaatkan untuk mencari perusahaan-perusahaan yang menjual produk-produk tertentu yang berisiko tinggi.

Menganalisa dokumen-dokumen referensi: Apa yang perizinan tersebut beritahukan kepada anda?

Langkah berikutnya adalah membandingkan perizinan dengan (a) peraturan-peraturan yang mengaturnya, dan (b) satu sama lain. Langkah ini akan mengidentifikasi jika ada pelanggaran hukum dalam proses perizinan itu sendiri, dan apabila ada izin-izin yang hilang, tidak lengkap, atau diterbitkan pada saat yang tidak sesuai dengan gilirannya.

Penelitian yang dilakukan oleh LSM, pemerintah dan institut penelitian di hampir setiap negara berhutan menyediakan rangkuman-rangkuman mengenai bagaimana proses perizinan harus berfungsi pada praktiknya. Data perizinan yang telah diperoleh harus diminta dan diperiksa ulang dengan cara membandingkan dengan informasi tersebut, dengan menyoroti pelanggaran-pelanggaran apapun dari proses di atas kertas. Meskipun kemungkinan sering ada izin yang hilang, temuan-temuan yang sedemikian hendaknya diperlakukan dengan berhati-hati, karena izin mungkin saja sudah ada namun belum diperoleh. Signifikansi temuan bervariasi tergantung dari tingkat pentingnya perizinan. Misalnya, AMDAL atau rencana pengelolaan hutan yang hilang merupakan temuan penting; ketentuan-ketentuan birokratis lainnya mungkin lebih tidak signifikan.

Setelah melakukan perbandingan struktural ini, konten dari izin-izin tersebut harus diperiksa. Dokumen-dokumen yang merupakan bagian dari hak untuk memanen – AMDAL, rencana-rencana manajemen hutan, kontrak dan yang lainnya – akan memuat data naratif yang bisa diperbandingkan dengan kerangka regulasi. Proses ini akan memerlukan

pemahaman yang lebih terperinci mengenai isi peraturan dan kerangka regulasi, yang bisa jadi kompleks. Referensi analisa hukum dan, jika mungkin, konsultasi hukum dari tenaga ahli pada tahap ini bisa bermanfaat dalam menentukan beberapa bentuk tindakan pelanggaran hukum yang tidak kentara, namun serius. Dalam hal analisa izin struktural, temuan-temuan yang penting kemungkinan bukan dalam apa yang sudah disertakan, namun dalam apa yang belum disertakan. Misalnya, ketika kewajiban-kewajiban terhadap masyarakat yang diharuskan menurut hukum belum disertakan dalam kontrak, atau ketika ada bukti dimana masyarakat tidak diajak berkonsultasi selama proses AMDAL.

Dalam beberapa kasus, data perizinan kemungkinan memberikan bukti konkrit bahwa beberapa perusahaan telah melanggar hukum dengan mengawali kegiatan operasional sebelum izin-izin tersebut diperoleh. Hal ini terutama terjadi dalam hal AMDAL yang, jika dilakukan dengan benar, seharusnya memberikan beberapa analisa mengenai kondisi terkini di wilayah konsesi atau sasaran. Di Indonesia, analisa tutupan lahan dalam dokumen-dokumen kajian telah menunjukkan bahwa deforestasi untuk pengembangan perkebunan diawali sebelum proses kajian dilakukan. Di Sarawak, hasil kajian dampak lingkungan telah menunjukkan bahwa beberapa perusahaan penebangan sudah mulai masuk kembali ke hutan untuk melakukan penebangan sebelum mereka diperbolehkan secara hukum untuk melakukannya [lihat **Studi Kasus 2**]. Pada tahap ini proses penelitian harus berupaya untuk mengidentifikasi data yang kemungkinan tidak bermanfaat dalam waktu dekat, namun akan bermanfaat seiring berlangsungnya investigasi tersebut. Dataset yang sangat penting yang bisa ditemukan pada data perizinan meliputi:

- Proyeksi volume kayu yang akan dipanen dalam suatu wilayah tertentu. Hal ini nantinya bisa diperbandingkan dengan estimasi volume yang dipanen berdasarkan kunjungan lapangan, atau volume yang diekspor. Hal ini signifikan dalam mengidentifikasi volume yang dideklarasikan lebih rendah untuk menghindari pajak, atau volume yang dideklarasikan lebih besar untuk memfasilitasi pencucian kayu ke dalam konsesi.
- Batas-batas wilayah konsesi. Informasi ini nantinya bisa diperbandingkan dengan perubahan tutupan lahan dengan menggunakan data satelit, dan data GPS dari kunjungan lapangan. Ketika ditemukan keterangan mengenai batas-batas wilayah dalam perizinan, informasi tersebut biasanya membutuhkan proses digitalisasi sebelum analisa perbandingan yang disebutkan di atas bisa dilakukan. Patut diperhatikan bahwa perizinan yang berbeda-beda mungkin memiliki batas-batas yang berlainan untuk wilayah konsesi yang sama, sehingga hal ini perlu ditangani dengan hati-hati.

PERMISSION IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA AREAL PELEPASAN LAHAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIBAGIKAN (DPK) PT. KARAWAN AGRO PLANTATION BE KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELURAS 5.2644 HA AN. PT. KARAWAN HUTAN LENTARI	
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
Mendasar	Batas Delineasi PT. Karawan Hutan Lentari Nomor 04N10/Lu/2011 tanggal 08 September 2011 untuk Perizinan dan Pemanfaatan Kayu pada Areal Pelepasan Lahan PT. Karawan Agro Plantation.
Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndiru berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 38114/Menhub-S2/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Penerimaan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dibagikan untuk Pabrik Kelapa Sawit atas nama PT. Karawan Agro Plantation di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 11.383,83 (Sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tiga liter dan delapan puluh perseribu) Hektar. 2. Ndiru berdasarkan keputusan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 5/14/Menhub-S2/2011 tanggal 11 Maret 2011, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi untuk Pejabat Pemerintah Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). 3. Ndiru berdasarkan Surat Delineasi Menteri Hutan dan Kehutanan Nomor 5.102/VI-DUM/2012 tanggal 19 Desember 2012 untuk Perimbangan Teknis IPK An. PT. Karawan Hutan Lentari (PT. KAL). 4. Berdasarkan hasil terbit di atas, maka di samping perlu untuk menyetujui izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. Karawan Hutan Lentari pada Areal Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) PT. Karawan Agro Plantation, dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pertambangan dan Pengolahan Lignit dan Batubara. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang, Aspek

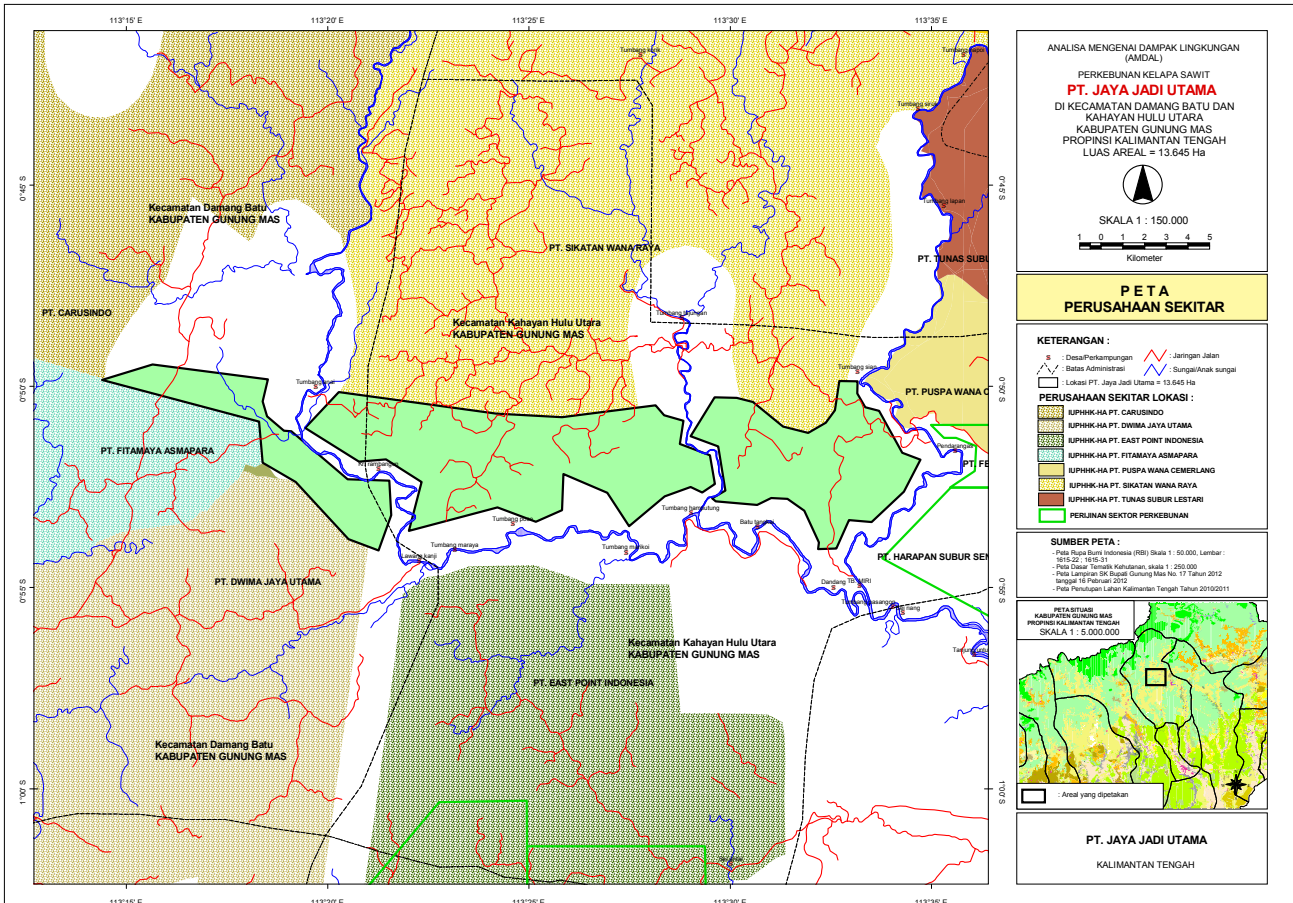
- Rencana penebangan yang mendefinisikan blok mana yang bisa ditebang, dan kapan. Hal ini juga bisa diperbandingkan dengan kenyataan di lapangan dengan menggunakan analisa satelit dan kunjungan lapangan.
- Wilayah-wilayah yang sudah melebihi batas penebangan, baik dalam hal rencana penebangan, rencana pengelolaan hutan, AMDAL atau dokumen-dokumen lain. Lagi-lagi, informasi ini bisa dibandingkan dengan citra satelit dan bukti dari kunjungan lapangan.

Metode-metode yang digunakan oleh Greenpeace untuk mengidentifikasi penebangan liar di hutan Amazon Brazil merupakan suatu contoh yang bagus mengenai bagaimana pengumpulan data dan analisa perizinan yang melelahkan bisa menghasilkan petunjuk yang kuat dan mengarahkan investigasi lapangan menuju konsesi-konsesi dengan probabilitas yang tinggi terkait pelanggaran hukum [lihat **Studi Kasus 1**].

Pada tahap ini, kemungkinan sudah jelas bahwa tidak ada izin yang diterbitkan di wilayah yang diselidiki. Jika ini yang terjadi, beralih ke tahap pemetaan dan kunjungan lapangan bisa

memberikan jawaban lebih lanjut. Namun, penelitian juga harus diperluas untuk memetakan perusahaan-perusahaan lain dan kegiatan mereka, baik pemegang konsesi maupun pabrik pemotongan kayu (sawmill). Memeriksa rute keluar dari wilayah tersebut –biasanya rute jalan meskipun sering juga sungai – bisa mengarah ke para operator berlisensi di sekitar wilayah tersebut, yang kemungkinan mencuci kayu dari wilayah-wilayah yang tidak memiliki otorisasi.

Sering kali di tempat yang tidak memiliki hak untuk memanen, gambaran di tempat pemanenan terlihat rumit dan suram. Proses pemanenan itu sendiri sering kali tampak sporadis dan tidak teratur. Namun di banyak contoh, kayu yang sudah dipanen akan disatukan di pabrik penggajian atau fasilitas hilir yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara lebih terorganisir. Operasi yang sedemikian sudah teridentifikasi di Peru [lihat **Studi Kasus 6**] dan Brazil [lihat **Studi Kasus 8**]. Karenanya, memeriksa kegiatan penebangan dan pemrosesan yang terlihat resmi dan melakukan penelusuran mundur bisa memberikan lebih banyak jawaban daripada hanya melihat lokasi pemanenan.



AMDAL dari Indonesia yang menunjukkan batas-batas konsesi, namun juga batas-batas konsesi kayu disekitarnya ©EIA

Studi Kasus 1: Krisis Sunyi di Amazon

Berdasarkan skala pemanenan dan ekspor, Greenpeace memilih untuk memeriksa legalitas pemanenan spesies Ipê yang memiliki nilai tinggi di negara bagian Pará di Brazil. Bukti yang ada, yang meliputi kasus-kasus penegakan pemerintah yang sebelumnya, menunjukkan bahwa pencucian terkait asal kayu sedang terjadi, yang diperparah oleh dokumentasi palsu. Untuk menyelidiki hal ini, Greenpeace mengawasi dengan mendokumentasikan setiap Otorisasi Penebangan untuk negara bagian Pará. Dengan mengecualikan otorisasi yang sudah ditangguhkan atau belum disetujui, daftar tersebut dipersempit dari lebih dari 1.300 perizinan menjadi hanya 1.000. Selanjutnya para peneliti mengidentifikasi otorisasi yang hutan-hutan yang dalam inventarisasinya tercatat menyertakan spesies Ipê yang bernilai tinggi. Mereka kemudian membuat daftar singkat perizinan manapun yang mencurigakan karena tercatat memiliki Ipê dalam jumlah besar, dan dimana volume per hektar muncul terlampaui banyak

ketika dibandingkan dengan kepadatan populasi rata-rata spesies tersebut. Kegiatan ini berhasil memberikan Greenpeace suatu daftar panjang 104 konsesi dimana terdapat kecurigaan yang beralasan bahwa volume kayu yang dicantumkan jumlahnya terlampaui banyak – kemungkinan untuk memungkinkan pencucian dari wilayah lain. 104 konsesi tersebut kemudian difilter lebih lanjut dengan menggunakan serangkaian kriteria, termasuk ukuran yang disebutkan dalam otorisasi, tahun dimana konsesi tersebut divalidasi, konsesi yang sepertinya memiliki paling banyak Ipê, dan informasi visual dari inspeksi udara konsesi-konsesi terpilih. Meskipun inspeksi udara kemungkinan melampaui kemampuan sebagian besar LSM, kegiatan tersebut bisa direplikasi sampai taraf tertentu dengan menggunakan analisa satelit [lihat Penginderaan Jauh: Membandingkan perizinan dengan data dari satelit]. Greenpeace sampai pada sederet 18 otorisasi yang mereka targetkan untuk kunjungan lapangan. Pada 14 dari 18 kasus, mereka mengidentifikasi cukup banyak pelanggaran sehingga bisa mendukung pembenaran untuk dilakukan pembatalan izin.



Truk kayu di Brazil ©Greenpeace

Tool Box: Membangun profil perusahaan

Ketika suatu perusahaan sasaran yang diminati telah teridentifikasi, merupakan hal yang bermanfaat untuk mencari tahu sebanyak mungkin tentang perusahaan tersebut, termasuk informasi yang tampaknya tidak berhubungan atau tidak relevan dengan kegiatan-kegiatan khusus di sektor kayu. Hal ini bisa diterapkan ke berbagai perusahaan di setiap tahap rantai pasok.

Informasi ini harus disusun sebagai suatu profil perusahaan dalam suatu dokumen, yang bisa dikembangkan seiring dengan penemuan data. Suatu profil perusahaan bisa meliputi informasi berikut ini:

- Dimana letak kantor perusahaan tersebut;
- Seberapa besar perusahaan tersebut, dalam hal volume kayu yang ditangani, wilayah konsesi/izin penebangan yang dimiliki, atau pemasukan;
- Siapa pemilik perusahaan tersebut, baik individu atau para pemegang saham;
- Eksekutif atau manajer utama dalam perusahaan tersebut;
- Perusahaan-perusahaan yang berafiliasi, terutama perusahaan-perusahaan induk;
- Perusahaan-perusahaan atau wilayah-wilayah dimana perusahaan tersebut membeli dari dan menjual ke;
- Koneksi-koneksi ke perusahaan-perusahaan atau individu lain, dengan fokus pada politisi;
- Bagaimana perusahaan tersebut membiayai kegiatan operasionalnya. Misalnya, apakah perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman dari bank atau instrumen keuangan lain.

Kebanyakan informasi yang dibutuhkan untuk membangun profil perusahaan bisa ditemukan melalui pencarian online [lihat **Tool Box**: Sumber informasi online]. Jika suatu perusahaan merupakan perusahaan yang sahamnya tercatat, perusahaan tersebut akan menerbitkan informasi yang bermanfaat di pasar saham nasional atau dalam laporan-laporan tahunannya. Sumber-sumber online lainnya antara lain website perusahaan, laporan-laporan dari media (termasuk jurnal-jurnal finansial dan perdagangan), dokumen-dokumen pemerintah dan perizinan atau pasar online untuk produk-produk kayu. Dalam beberapa kasus, kemungkinan tidak banyak informasi online. Namun informasi juga bisa diperoleh selama kunjungan lapangan, terutama dengan mewawancarai komunitas atau para pekerja [lihat Kunjungan Lapangan]. Mewawancarai perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di sektor tersebut, baik secara terbuka maupun tertutup [lihat Investigasi rahasia] bisa menyingkap informasi. Beberapa perusahaan terkadang terbukti mau memberikan informasi mengenai kompetitor-kompetitor mereka.

Pemahaman, sebisa mungkin, akan sifat suatu perusahaan bisa memberikan petunjuk investigatif baru, terutama dalam hal rantai pasok. Pemahaman tersebut juga bisa mengungkap beberapa bentuk tindakan pelanggaran hukum yang berbeda. Di beberapa negara, misalnya, merupakan hal yang ilegal bagi orang-orang yang memiliki koneksi dekat dengan politisi (orang-orang yang terkenal atas karirnya di bidang politik) untuk mengambil manfaat dari alokasi sumber daya alam. Hal ini bisa memunculkan peluang baru untuk memberikan tekanan. Misalnya, beberapa bank atau dana investasi akan melepas investasi atau menanggukkan hubungan mereka dengan perusahaan-perusahaan yang terekspos melakukan tindakan pelanggaran hukum, yang pada akhirnya bisa memberikan tekanan bagi mereka untuk melakukan perubahan [lihat **Studi Kasus 2**].

Pemeriksaan online terhadap latar belakang bisa membantu mengungkap afiliasi politik, kepentingan-kepentingan bisnis lainnya, korupsi atau kegiatan kriminal di masa lampau, pelanggaran hak asasi atau lingkungan yang terhubung dengan suatu konsesi atau pabrik pemotongan kayu. Hal ini memberikan konteks yang berharga bagi suatu investigasi. Misalnya, jika ada keterlibatan kepentingan politik yang besar, hal ini bisa membantu menjelaskan mengapa para pelaku penebangan liar memiliki kekebalan saat beroperasi. Hal ini juga membantu mengidentifikasi kemungkinan resiko-resiko yang akan dihadapi selama kunjungan lapangan.

Studi Kasus 2: Investigasi terhadap tebang pilih di Sarawak

Pada tahun 2009, dana pensiun Norwegia menugaskan Earthsight untuk melakukan investigasi terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan penebangan besar di Malaysia yang mana dana pensiun tersebut memiliki saham di perusahaan tersebut. Earthsight menggunakan berbagai dokumen referensi, citra-citra satelit dan kunjungan lapangan untuk mengekspos berbagai macam kegiatan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan tersebut di wilayah pemanenan yang sudah diberi izin (konsesi) di Sarawak:

Analisa dokumen-dokumen referensi: AMDAL untuk penebangan kayu di berbagai wilayah konsesi menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah mulai melakukan penebangan sebelum hasil kajian diterbitkan, hal ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan.

Membandingkan dokumen-dokumen referensi dengan citra satelit: Peta-peta konsesi terperinci yang diperoleh dari beberapa lampiran AMDAL. Peta-peta tersebut kemudian dibandingkan dengan citra

satelit yang terkini, yang setelah diproses kerusakan pada vegetasi dari kegiatan tebang pilih yang baru dilakukan bisa terlihat. Perbandingan kedua dataset tersebut menunjukkan bukti adanya penebangan liar di luar batas-batas wilayah konsesi dan di wilayah-wilayah yang dilarang di dalam area konsesi.

Observasi lapangan dan wawancara: Bukti adanya penebangan ilegal di wilayah penahan sungai, penebangan spesies-spesies yang dilindungi, polusi sungai oleh debu-debu penebangan dan pembukaan secara ilegal yang melampaui batas-batas di sepanjang jalan logging diperoleh melalui observasi lapangan. Bukti tambahan pemanenan ilegal terhadap spesies lindung, pemotongan kayu yang masih terlalu kecil dan penandaan palsu terhadap kayu diperoleh dari berbagai wawancara dengan para penebang dan karyawan kamp penebangan.

Informasi¹⁰ yang diperoleh membuat dana pensiun Norwegia kemudian memasukkan perusahaan tersebut ke dalam daftar hitam, dan dikutip berkali-kali oleh LSM yang berkampanye menuntut perubahan di Sarawak.



Kayu-kayu ilegal yang ukurannya dikecilkan di konsesi penebangan Samling di Sarawak, Malaysia ©Earthlight

Pengindraan Jauh: Membandingkan perizinan dengan data dari satelit

Langkah berikutnya dalam investigasi adalah membandingkan data yang ditemukan dalam perizinan dengan data lainnya, data non-perizinan. Kegiatan ini bisa mengidentifikasi apakah ketentuan-ketentuan yang telah diidentifikasi melalui analisa perizinan telah dipatuhi. Peta batas, rencana pemotongan, dan wilayah-wilayah yang terlarang yang diketemukan selama proses tersebut merupakan informasi yang sangat penting dalam kegiatan ini. Data tersebut bisa dilapisi dengan data spasial dan citra satelit dan dimanfaatkan untuk secara langsung mendeteksi beberapa jenis penebangan liar (lihat Boks: Jenis-jenis penebangan liar yang berpotensi bisa dideteksi dengan menggunakan citra satelit) atau membantu mengarahkan kunjungan lapangan yang dibutuhkan untuk mendokumentasikan beberapa jenis pelanggaran yang lainnya. Di Sarawak, misalnya, peta yang disertakan dalam kajian dampak lingkungan telah diperbandingkan dengan citra satelit untuk mendemonstrasikan area penebangan diluar batas-batas konsesi dan pelanggaran-pelanggaran lainnya [lihat **Studi Kasus 2**].

Tool Box: Jenis-jenis penebangan liar yang berpotensi terdeteksi dengan menggunakan citra satelit

- Penebangan yang tidak memiliki izin atau dilakukan sebelum semua perizinan yang diwajibkan diperoleh
- Penebangan diluar batas-batas wilayah yang diberi izin
- Penebangan di beberapa bagian wilayah konsesi yang belum secara resmi 'dibuka' untuk penebangan
- Penebangan di wilayah-wilayah yang dilarang dalam area konsesi (seperti penyangga sungai atau lereng curam)
- Membuka hutan melebihi batas-batas yang semestinya di sepanjang jalan logging

Hingga saat ini, melakukan analisa terhadap perubahan tutupan lahan untuk mendeteksi penebangan atau konversi hutan membutuhkan pemilikan dan pengetahuan software Sistem Informasi Geografis (SIG) serta membeli dan memproses citra satelit yang mahal. Namun, perkembangan pesat dalam pemrosesan citra satelit dan pengembangan platform SIG online, telah membuat teknologi tersebut menjadi lebih mudah diakses dan lebih mudah digunakan. Teknologi-teknologi tersebut

semakin banyak menyediakan citra satelit dengan resolusi tinggi secara gratis dalam format yang ramah pengguna.

Google Earth, yang bisa diunduh secara gratis, memiliki citra satelit dalam berbagai resolusi. Sebagian besar wilayah sudah tercakup dalam resolusi sekitar 15 meter per pixel (dari satelit Landsat), yang sudah cukup memadai untuk menentukan pembukaan dan penyebaran jalan logging yang terkait dengan tebang pilih ke dalam hutan-hutan perawan. Namun, beberapa wilayah menunjukkan citra pada resolusi 60cm, yang memungkinkan identifikasi wilayah pembukaan yang sangat kecil dan bisa dimanfaatkan untuk mendokumentasikan pembukaan di wilayah penahan sungai atau pembukaan hutan di sepanjang jalan penebangan yang melebihi batas legal. Google Earth juga memiliki citra historis yang memungkinkan pengidentifikasian perubahan tutupan seiring waktu. Citra satelit ini diambil secara periodik oleh Google dari pihak-pihak ketiga. Sekarang ini cenderung mudah bagi LSM untuk mencari, mengidentifikasi dan memperoleh citra tambahan dengan resolusi tinggi dari penyedia yang sama secara langsung [lihat **Tool Box**: Citra Beresolusi Tinggi].

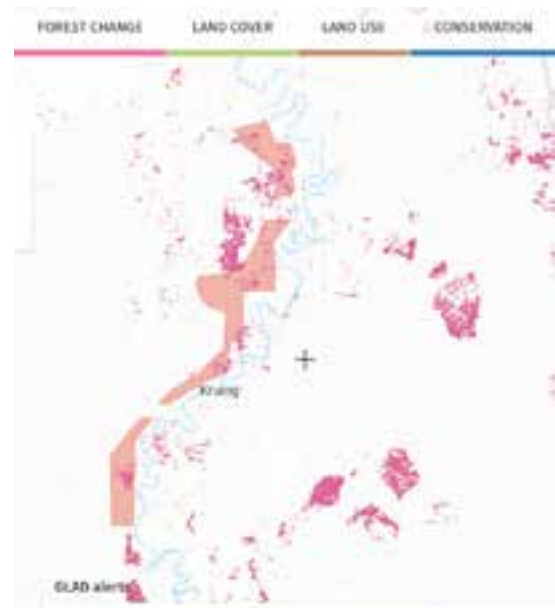
Para pengguna bisa menggunggah batas-batas konsesi dan data spasial kontekstual lainnya ke Google Earth. Hal ini memungkinkan analisa perubahan tutupan hutan dalam batas-batas wilayah konsesi, selain juga bisa menunjukkan apakah konsesi-konsesi tersebut berada di dalam wilayah lindung, lahan teritori komunitas, atau zona-zona lainnya yang tidak boleh dipanen.



Citra Landsat yang menunjukkan kerusakan vegetasi yang ditonjolkan menggunakan pewarna pita infra-merah. Jalan logging ditunjukkan dengan warna merah muda, kegiatan penebangan intensif warna merah, area-area yang sudah ditebang sebelumnya hijau muda. Teknik ini bisa mengidentifikasi aktivitas penebangan kayu secara selektif. Gambar ini menunjukkan penebangan didalam wilayah lindung pegunungan Batu Lawi di Sarawak oleh perusahaan Malaysia bernama Samling. ©EarthSight

Pada tahun 2013, World Resources Institute meluncurkan kembali Global Forest Watch (GFW), suatu sistem online interaktif pemantauan dan peringatan hutan. GFW memiliki serangkaian data geografis yang bisa dimanfaatkan untuk menganalisa dan mengidentifikasi penebangan liar, termasuk data perubahan hutan, tutupan hutan dan pemanfaatan hutan. Data pemanfaatan hutan sudah meliputi peta-peta konsesi (termasuk nama pemegang izin) untuk konsesi kayu dan perkebunan di banyak negara berhutan, meskipun data tersebut diketahui masih belum lengkap. Data tersebut harus diperlakukan dengan hati-hati, karena beberapa batas wilayah belum dibuat dengan tepat dan beberapa informasi diketahui sudah tidak berlaku lagi.

Sama seperti Google Earth, GFW mengizinkan para pengguna untuk mengunggah data spasial mereka sendiri dan melakukan analisa. Namun, tidak seperti Google Earth, kebanyakan analisa di GFW bersifat otomatis. GFW memungkinkan para pengguna untuk melihat dan menghitung hilangnya tutupan pohon (yang diidentifikasi secara otomatis dari citra Landsat) di dalam suatu wilayah yang ditentukan oleh pengguna dari waktu-ke-waktu dan membuat peringatan jika ada tutupan yang hilang di kemudian hari. Pada tahun 2016, GFW menyediakan dataset yang baru yang juga menyediakan citra satelit mentah. Citra ini lebih maju dan lebih sering diperbarui daripada citra yang tersedia di Google Earth, dan beberapa citra juga memiliki resolusi yang lebih tinggi. Membandingkan perubahan lahan pada citra satelit dari waktu-ke-waktu dengan tanggal-tanggal perizinan bisa memberikan suatu bukti kuat bahwa penebangan terjadi sebelum perizinan yang sesungguhnya diperoleh.



Konsesi kelapa sawit dan peringatan deforestasi di Global Forest Watch. ©Global Forest Watch

Di banyak kejadian, peta-peta konsesi tidak tersedia selama investigasi dilakukan. Dalam situasi seperti ini, Google Earth dan GFW menjadi sama pentingnya untuk menunjukkan lokasi dimana penebangan liar terjadi, dan menghitung luasnya. Meskipun Google Earth dan GFW belum bisa digunakan untuk mengidentifikasi para pelaku secara lebih dekat, sarana tersebut bisa memberikan beberapa petunjuk, terkait apakah kegiatan penebangan dilakukan pada skala industri atau kecil, dan mengidentifikasi apakah penebangan tersebut terjadi di wilayah-wilayah dimana izin konsesi secara hukum tidak boleh diterbitkan. Google Earth dan GFW juga dapat membantu dalam memandu langkah-langkah berikutnya, terutama lokasi-lokasi untuk melakukan kunjungan lapangan.

Studi Kasus 3: Pembukaan lahan sebelum perizinan diperoleh

Selama investigasi di Indonesia, LSM Environmental Investigation Agency (EIA) dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) telah mengidentifikasi pembukaan lahan berskala besar di wilayah hutan, yang di peta pemerintah yang telah diperoleh mengindikasikan bahwa wilayah tersebut belum memiliki izin yang relevan. EIA dan JPIK berhasil menemukan nama perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, dan mengidentifikasi kayu yang dipanen di konsesi tersebut dan dipindahkan ke pabrik kayu terdekat. Namun, dalam database pemerintah

provinsi tidak terdapat perizinan untuk konsesi-konsesi tersebut. Setelah beberapa bulan, AMDAL untuk area konsesi tersebut diperoleh, bukan dari jalur pemerintah, namun dari suatu desa yang berdekatan dengan konsesi tersebut. Dokumen tersebut meliputi peta-peta yang menunjukkan batas-batas wilayah konsesi, yang didigitalisasikan oleh seorang analis SIG. Melapisi batas-batas ini dengan beberapa citra Landsat menunjukkan bulan ketika pembukaan lahan mulai dilakukan, dan berapa banyak area hutan yang dibuka selama beberapa bulan. EIA/JPIK memperoleh konfirmasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa perusahaan tersebut belum memiliki hak hukum untuk membuka hutan tersebut.

Tool Box: Citra dengan Resolusi Tinggi

Citra dengan resolusi paling tinggi yang ditampilkan di Google Earth adalah sekitar 60cm, yang berarti bahwa masing-masing piksel pada layar komputer akan mewakili 60 cm di lapangan. Resolusi ini cukup tinggi untuk melihat jalan logging, truk, bahkan setiap pohon dan kayu hingga sering disangka fotografi udara. Resolusi ini sudah melebihi resolusi tertinggi yang dimiliki Global Forest Watch yaitu 5m. Namun, resolusi tersebut hanya tersedia untuk beberapa wilayah, sebagian besar diantaranya menampilkan citra Landsat berukuran sekitar 15m piksel, dan hanya diperbarui sesekali.

Yang mungkin bisa juga dilakukan adalah mencari, melihat dan menambahkan citra dengan resolusi yang paling tinggi (termasuk citra Worldview yang digunakan oleh Google Earth) langsung dari penyedia

komersil. Alat yang bermanfaat untuk mengidentifikasi citra yang telah tersedia adalah 'Image Hunter' yang disediakan oleh Apollo Mapping di <https://imagehunter.apollomapping.com>. Citra ini sangat mahal harganya yaitu US\$16 per km², dengan minimal pembelian mencapai 25km². Di beberapa kasus, meskipun demikian, citra tersebut tetap bisa dilihat melalui pratinjau secara cuma-cuma (termasuk citra dari Worldview). Pratinjau tersebut memiliki resolusi yang dibawah resolusi penuh, namun meskipun demikian sudah memberikan resolusi yang lebih tinggi dibandingkan citra yang tersedia dari Landsat.

Pencitraan satelit merupakan bidang yang berkembang dengan cepat, dengan adanya beberapa organisasi yang bekerja untuk meningkatkan aksesibilitas citra dengan resolusi tinggi dan yang sudah diproses. Citra satelit kemungkinan akan semakin mudah diakses dan bermanfaat untuk pemantauan hutan.



Kiri: Citra Landsat 8 dengan resolusi 15m yang menunjukkan jalan yang baru dibangun dan kegiatan tebang pilih yang intensif.

Kanan: Citra Worldview 2 dengan resolusi 50cm yang merupakan bagian dari wilayah yang sama dengan bangunan, kendaraan dan masing-masing batang kayu yang bisa terlihat.

Citra satelit, dan terutama peta-peta wilayah 'hutan yang hilang' yang dihasilkan secara otomatis (sebagaimana yang bisa dilakukan dengan menggunakan GFW), harus diperlakukan dengan hati-hati. Pada resolusi yang lebih rendah, tidak mungkin menentukan apakah terjadi pembukaan di hutan, atau vegetasi lainnya seperti lahan pertanian, semak belukar atau bahkan perkebunan. Analisa otomatis tidak selalu bisa menunjukkan pembukaan lahan, dan tebang pilih kemungkinan tidak bisa terlihat dalam citra beresolusi rendah, terutama jika intensitasnya rendah atau di hutan yang sudah terganggu

sebelumnya. Tidak mungkin menentukan apakah kayu komersil diproduksi atau tidak berdasarkan kerusakan yang terlihat, dan meskipun ada kemungkinan tidak mungkin pula menentukan seberapa besar volumenya, belum lagi menentukan siapa yang melakukan penebangan tersebut. Analisa pemetaan dan citra satelit bermanfaat untuk membangun data, mengisi beberapa bagian dari gambaran yang utuh, dan terutama, membimbing investigasi lapangan dimana pertanyaan-pertanyaan yang muncul bisa dijawab melalui kegiatan tersebut.

2.2.3 Investigasi terhadap pemanenan: Investigasi Lapangan

Investigasi lapangan memberikan peluang lebih jauh untuk membandingkan apa yang secara hukum diperbolehkan – berdasarkan izin dan peraturan – dengan apa yang sesungguhnya terjadi, dan siapa yang melakukannya. Meskipun kegiatan ini merupakan proses yang sangat berharga, sebagaimana akan dijelaskan, investigasi lapangan memiliki resiko-resiko keamanan yang signifikan yang tidak ada di tahap-tahap penelitian yang sebelumnya.

Merupakan hal yang sangat penting untuk mengumpulkan dan menganalisa sebanyak mungkin informasi perizinan sebelum lanjut ke tahap investigasi lapangan, untuk menyediakan baseline terhadap mana informasi lapangan bisa diukur. Langkah-langkah sistematis yang telah dilakukan sebelum memulai investigasi lapangan – membandingkan antara perizinan dan peraturan, melakukan interogasi terhadap konten perizinan, dan analisa satelit – bisa memastikan bahwa investigasi lapangan dilakukan berdasarkan informasi yang memadai dan bisa direncanakan dengan efektif. Misalnya, jika analisa perizinan menunjukkan bahwa ada kewajiban sosial yang telah dilanggar, prioritas selama investigasi lapangan menjadi mengumpulkan data dan kesaksian berupa narasi dari komunitas yang terkena dampak. Jika analisa satelit menunjukkan pembukaan di luar batas-batas wilayah konsesi, yang menjadi prioritas adalah melakukan kunjungan terhadap wilayah-wilayah yang teridentifikasi untuk mengumpulkan gambar-gambar pemanenan yang dilengkapi referensi geografis. Di sebagian besar kasus, sebagaimana disebutkan dalam kedua contoh ini, analisa awal akan membantu mengarahkan investigasi lapangan

dan membantu investigator lapangan memahami dan menginterpretasikan bukti yang mereka temukan.

Investigasi lapangan juga bisa memberikan suatu peluang untuk mengisi celah signifikan pada data dimana upaya-upaya untuk memperoleh surat izin atau melakukan analisa citra satelit telah terbukti kurang sukses. Meskipun hal ini bisa jadi sulit dilakukan atau bahkan merupakan hal yang tidak mungkin untuk memperoleh izin melalui jalur resmi, komunitas lokal di area penebangan seringkali memiliki dokumen tersebut, beserta beberapa dokumen lainnya.

Beberapa jenis tindakan ilegal tidak bisa diidentifikasi tanpa investigasi lapangan. Merupakan hal yang penting untuk menyediakan bukti pelanggaran operasional di konsesi tebang pilih, misalnya, seperti memanen pohon-pohon dibawah ukuran standar atau spesies yang dilindungi. Pada kasus-kasus lain, indikasi bukti kegiatan ilegal yang ditemukan selama beberapa tahap investigasi yang sebelumnya bisa diperkuat oleh bukti lapangan. Misalnya, jika analisa satelit menunjukkan pembukaan diluar hutan batas-batas wilayah konsesi, investigasi lapangan bisa membuktikan bahwa hal ini dilakukan oleh pemegang konsesi, dan bahwa kayu dari pembukaan hutan juga dicuci melalui pemanenan yang 'taat hukum'.

Tahap investigasi lapangan kemungkinan merupakan titik pertama dimana muncul resiko yang signifikan berupa 'kebanjiran informasi'. Ketika mengakses izin dan peraturan biasanya dipersulit dengan keterbatasan akses terhadap data yang relevan, investigasi lapangan bisa menghasilkan gambar, video, titik GPS, kesaksian, dokumen-dokumen lainnya dan observasi umum yang tumpah ruah. Karenanya, perencanaan, persiapan dan penentuan target yang tepat merupakan hal yang sangat penting bagi kunjungan tersebut, begitu pula dengan manajemen data selama dan setelahnya.



Mendokumentasikan pabrik kayu dari dalam mobil di Indonesia. ©EIA

Perencanaan

Suatu perbedaan kunci antara investigasi lapangan dan tahap-tahap investigasi yang sebelumnya adalah ketika memperoleh perizinan atau menganalisa peta bisa dilakukan selama beberapa minggu atau berbulan-bulan, investigasi lapangan membutuhkan waktu yang sangat singkat, sering kali hanya dengan satu peluang. Hal ini sebagian disebabkan oleh logistik dan biaya mengunjungi daerah terpencil, dan sebagian dikarenakan oleh resiko-resiko yang terkandung. Menghabiskan waktu yang terlalu lama di sekitar wilayah penebangan menciptakan berbagai resiko tidak hanya bagi para investigator lapangan, namun juga komunitas yang kemungkinan menyediakan bukti bagi mereka atau menghadapi pertikaian yang berlarut-larut dengan perusahaan. Mengelola dan memanfaatkan para informan lokal adalah kuncinya.

Karenanya, pendekatan yang sistematis harus digunakan dalam merencanakan investigasi lapangan. Sebanyak mungkin keputusan – mengenai tujuan, rencana perjalanan, logistik dan keamanan – harus diambil sebelum perjalanan tersebut dilakukan. Tidak bisa dihindari bahwa beberapa keputusan akan harus dibuat ketika ada informasi baru yang muncul dan terkadang hal ini bisa memicu penyimpangan substansial terhadap rencana. Namun prosesnya tidak boleh menjadi tidak terkendali atau ad hoc. Beberapa langkah kunci adalah dengan:

- Mengidentifikasi beberapa jenis tindakan ilegal yang membutuhkan penggalan lebih lanjut melalui investigasi lapangan berdasarkan beberapa tahap analisa yang dilakukan sebelumnya.
- Menentukan bukti apa yang dibutuhkan untuk mendukung hipotesa dan bagaimana bukti tersebut bisa diperoleh.
- Menentukan informasi lain apa yang bisa dicari, yang bisa memberikan petunjuk adanya kegiatan-kegiatan ilegal lainnya (yang belum teridentifikasi)
- Membuat rancangan dokumen yang merangkum semua indikasi potensial yang bisa ditelusuri.
- Membentuk suatu tim investigasi, idealnya terdiri atas orang-orang yang memiliki pengetahuan lokal dan orang-orang yang bisa berbicara bahasa lokal di wilayah yang diminati.
- Menggunakan peta, citra satelit dan, jika mungkin, pengetahuan lokal untuk menentukan rencana perjalanan yang paling sesuai di wilayah yang diminati yang akan memanfaatkan seluruh petunjuk yang potensial.

Idealnya, kontak harus dilakukan dengan komunitas lokal atau kontak-kontak lainnya sebelum perjalanan tersebut dilakukan. Hal ini paling baik dilakukan melalui seorang joki yang berafiliasi lokal, yang juga bisa bertindak sebagai seorang perantara selama investigasi lapangan berlangsung. Jika sulit untuk mengidentifikasi joki yang memiliki kriteria tersebut, investigasi lapangan harus terus dilanjutkan menggunakan pendekatan bertahap, dengan cara berbicara dengan komunitas dan sumber-sumber informasi lainnya yang semakin mendekat ke wilayah yang ingin diperiksa, sehingga bisa membangun pengetahuan mengenai kondisi lokal di beberapa area dengan resiko yang lebih rendah.

Boks: Checklist pra-investigasi lapangan

- Mengidentifikasi joki lokal
- Mengontak masyarakat
- Membuat rencana perjalanan dengan menggunakan peta
- Mengembangkan rencana keamanan [lihat Resiko: Mengurangi berbagai resiko dalam investigasi lapangan]



Tantangan-tantangan investigasi lapangan di Republik Demokratik Kongo ©REM

Dalam skenario yang ideal, komunitas bisa diandalkan secara ekstensif untuk memberikan informasi dan memfasilitasi akses di seluruh wilayah tersebut. Mereka menyediakan sumber informasi yang tidak terbandingkan mengenai konteks lokal dan kegiatan operasional perusahaan, dan sangat terbiasa dengan resiko. Mereka sering kali memfasilitasi akses masuk ke wilayah konsesi atau bertindak sebagai pemandu di hutan. Namun, **melibatkan komunitas dalam investigasi lapangan bisa dengan cara apapun membawa resiko-resiko yang cukup besar bagi mereka.** Sementara para investigator lapangan akan meninggalkan wilayah yang diperiksa, masyarakat akan tinggal dan bisa menjadi sasaran tindakan balasan. Para aktivis adat sudah pernah dibunuh oleh orang-orang yang melindungi kepentingan-kepentingan logging, sehingga keseriusan resiko ini tidak boleh dipandang rendah. **Pendekatan apapun yang dilakukan ke masyarakat harus mempertimbangkan hal ini.**

Harus dipertimbangkan juga bahwa beberapa anggota masyarakat bisa jadi dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan kayu dan yang lainnya, dan mungkin memiliki afiliasi dekat dengan polisi atau pemerintah lokal.

Rencana perjalanan harus mengidentifikasi saat-saat dimana desa-desa bisa diakses, dan melalui rute apa. Titik masuk potensial ke dalam wilayah konsesi yang ingin diperiksa juga bisa diidentifikasi. Mengembangkan kepekaan akan seberapa lama investigasi lapangan akan berlangsung, dengan menyisakan ruang yang cukup untuk kontingensi, bisa membantu menciptakan rencana untuk mengurangi resiko.

Perusahaan-perusahaan kayu biasanya membangun dan efektif memiliki jalan-jalan logging. Mereka kemungkinan memiliki pos pemeriksaan dan bisa mengendalikan akses ke dan dari wilayah yang diinginkan. Meskipun demikian, mereka sering mengizinkan masyarakat lokal untuk menggunakan jalan dan melewati pos pemeriksaan, sehingga menekankan perlunya menggunakan joki lokal. Perusahaan-perusahaan juga memiliki koneksi dengan – dan bahkan mempraktikkan korupsi yang mengendalikan – polisi dan militer lokal. Di berbagai kasus, mereka telah menggunakan lembaga-lembaga negara yang secara de facto bertindak sebagai pasukan pengaman pribadi untuk mengintimidasi, menyerang dan menahan anggota masyarakat lokal dan orang lain yang melakukan investigasi atau protes terhadap kegiatan-kegiatan mereka. Faktor-faktor ini harus dipertimbangkan ketika membuat rencana investigasi, dan rencana untuk mengurangi resiko [lihat **Resiko: Mengurangi berbagai resiko di lapangan**].

Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan selama investigasi lapangan akan

berada dalam satu dari tiga kategori:

- Bukti tertulis
- Bukti wawancara (kesaksian)
- Bukti visual yang dilengkapi referensi geografis

Bukti tertulis:

Beberapa dokumen kemungkinan bisa tersedia dari komunitas setempat. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, mereka kemungkinan sudah memperoleh data perizinan dan yang lainnya dari perusahaan yang tidak dapat diperoleh para investigator dari sumber-sumber lainnya. Dokumen-dokumen tersebut kemungkinan mencakup AMDAL dan kontrak-kontrak yang mencakup beberapa bentuk kewajiban sosial. Investigator mungkin perlu mengambil foto dokumen-dokumen tersebut, karena masyarakat kemungkinan ingin menyimpannya. Tanda jalan yang didirikan oleh perusahaan juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat.

Wawancara:

Melakukan wawancara semi-formal dan non-formal dengan masyarakat bisa memberikan informasi yang kaya. Informasi itu sendiri bisa dijadikan bukti kegiatan ilegal dan tentu bisa memandu investigasi lapangan ke tahap yang lebih jauh. Wawancara-wawancarainiterutamabisamembantumemancing kepekaan pemahaman terkait beberapa pelanggaran hukum yang lebih rumit. Misalnya, pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat untuk dikonsultasikan selama proses AMDAL, atau kegagalan perusahaan untuk mentaati kewajiban hukum yang mereka janjikan ke masyarakat.

Kebutuhan untuk fokus terhadap jenis-jenis tindakan ilegal ini harus diperjelas sebelum melakukan investigasi lapangan, dan wawancara sebaiknya dipandu oleh pemahaman yang jelas mengenai bagaimana kesaksian tersebut akan mendukung bukti indikasi. Di beberapa kasus, terutama ketika kesaksian merupakan hal yang kritis untuk membuktikan suatu kasus, diharapkan untuk memfilmkan atau membuat rekaman suara dari wawancara tersebut. Baik dilakukan atau tidak, perjanjian yang jelas harus dibuat antara para investigator dan anggota masyarakat tertentu terkait cara-cara dimana wawancara tersebut bisa dimanfaatkan. Di banyak kasus, hal ini akan membawa resiko yang signifikan jika bukti dari masyarakat, yang bisa dikaitkan dengan mereka, dipublikasikan. Rekaman suara harus diperiksa di lapangan untuk memastikan bahwa kesaksian tersebut bisa terdengar dengan jelas.

Bahkan jika tidak ada bukti yang jelas terkait kegiatan ilegal dalam kesaksian tersebut, ia bisa memberikan suatu pandangan menarik mengenai dampak-dampak merugikan kegiatan penebangan hutan terhadap masyarakat, yang bisa

dimanfaatkan dalam pengaduan yang tidak memiliki komponen hukum. Para pekerja perusahaan merupakan sumber lain informasi naratif. Mereka tentunya harus didekati dengan hati-hati. Meskipun demikian, di beberapa kasus, selama melakukan pekerjaan lapangan, para investigator bisa terlibat dalam percakapan yang tidak terlalu berisiko dengan para pekerja. Mereka bisa memberikan banyak informasi mengenai kegiatan perusahaan dalam suatu wilayah pemanenan, dan tujuan pemanenan kayu [lihat **Studi Kasus 2**]. Jika hal ini terjadi, kemungkinan perlu merekam kesaksian secara tersembunyi (lihat **Tool Box**: Merekam bukti secara tersembunyi).

Bukti visual dengan referensi geografis:

Komponen penting dalam investigasi lapangan adalah kemampuan untuk menunjukkan dengan tepat apa yang terjadi di mana. Pertanyaan 'apa yang terjadi' dijawab menggunakan bukti foto dan video. Pertanyaan 'dimana' dijawab oleh peralatan Global Positioning System (GPS). Peralatan GPS berfungsi dengan menunjukkan dengan tepat lokasi alat tersebut, dengan menggunakan sinyal dari tiga atau lebih satelit. Peralatan tersebut menunjukkan lokasi dalam bentuk keterangan bujur dan lintang, dan tingkat akurasi. Tingkat akurasi bergantung pada beberapa faktor, namun alat tersebut rata-rata memiliki akurasi dibawah 15m.

Peralatan GPS mudah dimanfaatkan dengan sedikit pelatihan, dan jika dikombinasikan dengan kamera bisa memberikan bukti yang tidak tersanggahkan mengenai apa yang sedang terjadi pada lokasi yang sangat spesifik [lihat **Tool Box**: GPS, fotografi dan perangkat Open Data]. Kunci pengumpulan data yang



GPS dengan tunggul pohon yang ukurannya dikecilkan. ©EarthSight

baik adalah memastikan mengambil gambar-gambar dengan dilengkapi GPS yang bisa terlihat pada gambar tersebut. Jika tidak, data tersebut akan terpisah dan bisa disanggah. Beberapa kamera sekarang sudah dipasang GPS, dan beberapa ponsel juga sudah mengkombinasikan keduanya dalam satu alat. Proses menggabungkan gambar dan lokasi merupakan hal kunci untuk menunjukkan pelanggaran operasional, seperti penebangan diluar batas wilayah konsesi, pemanenan spesies lindung, atau penebangan di wilayah yang salah. Hal ini sudah sering digunakan dengan dampak yang bisa ditunjukkan di Kamerun, yang berujung pada dipersidangkannya suatu kasus hukum dibawah Peraturan Kayu UE di Belanda [Lihat **Studi kasus 4**].

Selama investigasi lapangan, para investigator harus memastikan untuk mengambil berbagai foto yang menggambarkan baik pelanggaran yang bisa dipastikan, maupun potensi pelanggaran, beserta informasi lain yang mungkin bisa bermanfaat, seperti papan petunjuk jalan yang mengidentifikasi perusahaan atau sub-kontraktor. Selain GPS, merupakan hal yang juga bermanfaat untuk menyertakan kendaraan, orang dan objek lain dalam gambar tersebut untuk menunjukkan ukuran, seperti misalnya dalam foto tanah longsor di samping jalan, atau batang kayu yang berukuran dibawah diameter minimum.

Para investigator harus mengingat bahwa penggunaan kamera gambar dan video bisa menarik perhatian ekstra dan karenanya merupakan resiko [lihat **Resiko**: Mengurangi berbagai resiko dalam investigasi lapangan].



GPS dan perkebunan yang difokuskan di Indonesia ©EIA

Tool Box: Drones (pesawat tanpa awak)

Hingga baru-baru ini, fotografi udara membutuhkan penggunaan pesawat dan helikopter yang dikendarai oleh manusia, dan harganya sangat mahal. Namun, perkembangan pesat teknologi 'drone' atau pesawat tanpa awak secara dramatis semakin meningkatkan potensi pemanfaatan fotografi udara dalam investigasi lapangan. Karena drone bisa diterbangkan pada ketinggian rendah, ia menawarkan citra udara pada resolusi yang tidak mungkin bisa dicapai oleh citra satelit (untuk saat ini). Karenanya drone menghadirkan potensi yang besar untuk memantau wilayah-wilayah hutan yang terpelosok, baik untuk memantau keragaman hayati maupun penebangan liar.

Drone (yang juga dikenal sebagai kendaraan tak berawak / unmanned aerial vehicles / UAV) bisa dibagi menjadi dua jenis yang berbeda: pesawat dengan sayap tetap (fixed-wing) dan quadcopter. Pesawat dengan sayap tetap lebih mahal, membutuhkan keterampilan yang lebih tinggi, cenderung rumit untuk digunakan, namun bisa mencakup wilayah yang lebih luas. Quadcopter lebih murah, mudah digunakan dan cepat untuk dimanfaatkan, namun memiliki cakupan yang terbatas.



Secara umum, pesawat dengan sayap tetap hingga saat ini sering dimanfaatkan dalam pemantauan hutan dan untuk pemetaan, sedangkan quadcopter secara umum dimanfaatkan sebagai alat dokumentasi yang lebih sederhana. Pemanfaatan pesawat tanpa awak semakin banyak yang dan dengan cepat diregulasikan di banyak negara. Para investigator harus memeriksa situasi hukum lokal yang terkini, sebelum memanfaatkannya di negara manapun.

Pesawat dengan sayap tetap:

Setidaknya sejak tahun 2012, para ahli konservasi telah mengujicobakan penerapan UAV dengan sayap tetap untuk pemantauan jarak jauh. Kendaraan terbang dengan bobot ringan ini bisa dilengkapi dengan kamera dan alat GPS, mengambil gambar yang dilengkapi referensi geografis, sehingga membuatnya menjadi alat yang sangat efektif untuk memantau wilayah-wilayah yang terpencil dan tidak bisa diakses. Pesawat tersebut bisa diterbangkan sejalur dengan rute yang ditentukan sebelumnya atau dengan remote control, dan menjangkau 100 km per perjalanan.

Tidak seperti quadcopter (lihat dibawah ini), pesawat sayap tetap yang cocok untuk digunakan dalam



Bukti adanya penebangan liar di Taman Nasional Gunung Leuser yang dideteksi menggunakan drone ©Keyeen Pang/Conservation Drones and SOCP

pemantauan tidak dapat dibeli langsung 'dari-rak' namun biasanya membutuhkan beberapa penyesuaian pada produk-produk yang dijual secara umum. Pemanfaatannya juga membutuhkan pengetahuan yang luas dan latihan. Namun, berbagai saran sudah tersedia di internet, dan ada organisasi-organisasi khusus seperti Conservation Drones yang bisa membantu. Hasilnya, pesawat sayap tetap menjadi semakin terjangkau dan bisa diakses bagi LSM akar rumput atau bahkan masyarakat, untuk memantau wilayah teritori mereka. Pada tahun 2014, Sumatran Orangutan Conservation Programme dan Conservation Drones menerbangkan dua pesawat yang terpisah selama beberapa bulan di atas Taman Nasional Gunung Leuser. Citra yang diperoleh, yang dilengkapi dengan referensi geografis, menunjukkan bukti penebangan liar yang tidak bisa terlihat selama investigasi lapangan maupun patroli kaki, bahkan meskipun dekat dengan area. Bukti tersebut ditunjukkan kepada para petugas taman nasional yang mengambil tindakan untuk menghentikan penebangan tersebut.

Quadcopters:

Dalam tiga tahun terakhir terlihat peningkatan drastis pada penjualan quadcopter kecil yang dikendalikan dengan remote control, dan dipasang dengan kamera. Quadcopter harganya lebih terjangkau dan sangat mudah untuk digunakan. Berbagai macam model

dengan berbagai tingkat kapabilitas sudah tersedia untuk dijual 'langsung-dari-rak' dan bisa dimanfaatkan untuk pemantauan hutan tanpa perlu penyesuaian khusus. Hanya dengan membaca di pagi hari dan berlatih di siang hari, sebagian besar pengguna bisa menjadi cukup ahli. Quadcopter memiliki jangkauan jarak yang lebih pendek dibandingkan pesawat sayap tetap, namun hal ini ditebus dengan kemudahan pemakaian dan kemampuannya berputar-putar di dalam suatu wilayah. Biasanya quadcopter dipandu dengan cara dilihat langsung, dengan menggunakan remote control, yang tidak sama dengan penggunaan rencana yang dipersiapkan sebelumnya mengenai wilayah yang akan dilewati oleh drone. Hal ini mengakibatkan cakupan wilayah yang lebih tidak komprehensif, dan gambar yang dihasilkan kemungkinan tidak dilengkapi dengan referensi geografis.

Meskipun demikian, sebagai alat bantu untuk investigasi lapangan, Quadcopter bisa sangat bernilai. Quadcopter bisa digunakan dalam waktu beberapa menit dan menawarkan pandangan mata burung mengenai kondisi di atas tanah. Quadcopter bisa dimanfaatkan untuk melihat pabrik kayu atau operasi penebangan dari jarak yang cukup aman. Seperti drones, rute Quadcopter juga bisa dirancang dengan menambahkan software dasar ke dalam alat tersebut.¹¹



Gambar kanopi hutan di Indonesia yang diambil menggunakan quadcopter ©EIA

Tool Box: GPS, foto dan perangkat Open Data

Foto-foto yang diambil pada saat investigasi lapangan paling efektif jika dikombinasikan dengan data GPS. Hal ini bisa dicapai melalui proses sederhana dengan menyertakan peralatan GPS dalam gambar-gambar tersebut, sehingga layar yang menunjukkan garis bujur dan lintangnya bisa terlihat. Hal ini bisa bermanfaat pasca investigasi lapangan, untuk referensi silang bukti lapangan dengan data spasial kontekstual, seperti tunggul pohon bekas penebangan dengan peta-peta konsesi. Meskipun yang mungkin lebih penting adalah untuk menyediakan bukti bagi para penegak hukum atau pemangku kepentingan lainnya. Meskipun sederhana, ada seni pengambilan gambar yang disertai GPS, berkat refleksi layar dan kebutuhan untuk memastikan bahwa bukti dan angka yang terlihat dalam alat tersebut sudah fokus. Hal ini merupakan sesuatu yang bisa dikuasai dengan berlatih, dan latihan harus dilakukan sebelum melakukan pekerjaan lapangan. Pengetahuan dasar yang memadai mengenai bagaimana kamera berfungsi merupakan hal yang bermanfaat, agar nantinya bisa diperdalam sesuai kebutuhan. Foto-foto harus diperiksa untuk memastikan bahwa koordinat GPS dan obyek foto terlihat dengan jelas, dan jika perlu lakukanlah pengambilan ulang.

Ponsel sekarang sudah dilengkapi dengan kamera dan GPS. Google telah mengembangkan seperangkat alat, yaitu Open Data Kit (ODK), sehingga perangkat keras bisa digunakan untuk mengumpulkan data di wilayah-wilayah terpencil. ODK memungkinkan para pengguna untuk:

- Membuat berbagai bentuk formulir pengumpulan data atau survei;
- Mengunduh formulir tersebut ke dalam ponsel dan mengumpulkan data;
- Mengirimkan data tersebut ke sebuah server dan mengolahnya menjadi berbagai format yang bermanfaat.

ODK sudah pernah dimanfaatkan dalam situasi yang cukup rumit, misalnya, melakukan survei kesehatan di tempat-tempat terpencil di Afrika. Meskipun alat ini juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan yang relatif sederhana seperti penelitian lapangan dasar. Dalam konteks buku panduan ini, format yang dihasilkan dari

ODK bisa didesain untuk meminta para pengguna untuk mencatat lokasi (dengan menggunakan GPS internal dalam ponsel), menyertakan satu atau beberapa gambar, teks narasi, dan pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda. Format tersebut kemudian bisa dikirimkan ke server baik langsung atau dari lapangan, jika ada koneksi internet ke ponsel tersebut, atau nanti ketika sudah kembali ke kantor. Data kemudian bisa diekspor dalam suatu format yang sesuai dengan software GIS, atau divisualisasikan pada Google Earth. Manfaatnya adalah perangkat tersebut secara otomatis menyusun dan membuat data lapangan yang jumlahnya besar menjadi rasional, dan secara otomatis menghubungkan antara gambar dengan lokasi.

ODK dan sistem-sistem yang serupa, yang jumlahnya cukup banyak, diterapkan untuk pemantauan hutan antara lain di Guyana, Basin Kongo, Indonesia, Myanmar, Kolombia dan Suriname. Manfaat dari ODK dibandingkan dengan sistem-sistem lainnya adalah ODK bisa digunakan dengan sederhana dan cepat, dan cuma-cuma. Sistem-sistem lain mungkin ada yang lebih cocok tergantung serangkaian kriteria yang digunakan. Informasi lebih lanjut bisa dilihat di opendatakit.org.

Jika teknologi-teknologi ini dimanfaatkan, atau para investigator memanfaatkan kamera atau ponsel yang dilengkapi GPS, mereka sebaiknya juga membawa dan menggunakan alat GPS terpisah yang sederhana sebagai cadangan; alat GPS yang terpisah ini lebih tahan banting, memiliki kapasitas baterai yang lebih tahan lama dan penerimaan sinyal yang lebih baik.



Para aktivis memantau hutan dengan menggunakan ponsel di Indonesia ©EIA

Langkah-langkah selanjutnya

Kayu diangkut dari tempat penebangan dengan menggunakan truk, dan biasanya disatukan di titik pengumpulan kayu di dalam wilayah pemanenan sebelum pengangkutan selanjutnya. Dari sana, kayu kemungkinan dibawa melalui jalan darat langsung ke pabrik atau pelabuhan, meskipun lebih sering ditransportasikan ke sungai terdekat yang arusnya terarah dan selanjutnya ditransportasikan dengan mendorong kayu tersebut atau diapungkan ke sungai dalam bentuk rakit. Di beberapa wilayah, kayu-kayu disatukan di ujung rel dan diangkut dengan menggunakan kereta. Meskipun terkadang bisa mengikuti truk untuk mengetahui arah tujuannya, biasanya metode-metode lain juga harus digunakan untuk menghubungkan kayu-kayu dari tempat pemanenan sampai dengan tempat pemrosesan atau ekspor. Pelacak GPS, yang ditempelkan pada truk, tongkang atau kayu, pernah digunakan dengan efektif untuk melacak kayu jauh ke rantai suplai dari titik pemanenan [lihat Studi Kasus 8]. Seringkali suatu keterhubungan juga bisa dibangun dengan mencari kayu-kayu yang memiliki penanda identitas yang relevan [lihat Tool Box: Penandaan kayu] di pabrik pemotongan terdekat, di hilir atau yang kemungkinan memanfaatkan kayu tersebut. Meskipun demikian, di berbagai kasus, pelacakan kayu harus dilakukan melalui jejak dokumen [lihat Bab 2.3.2]

Pasca Investigasi Lapangan

Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu yang biasanya dihadapi para investigator di lapangan, dan volume informasi yang bisa tersedia, manajemen data yang baik merupakan hal penting. Ketika kembali dari perjalanan lapangan, seorang investigator biasanya akan memiliki ratusan gambar, lusinan poin GPS yang tercatat dalam alat GPS, berlembar-lembar catatan, dan kemungkinan rekaman audiovisual wawancara dengan masyarakat. Membangun suatu sistem untuk mengelola data ini ketika sedang di lapangan, dan memprosesnya dengan cepat setelahnya, merupakan hal yang penting untuk mengubah data mentah menjadi bukti. Proses ini sangat penting dan tidak boleh diabaikan. **Ketika suatu kasus penebangan liar sampai ke pengadilan, data yang disusun dan dikelola dengan buruk berpotensi ditolak.**

Setelah bukti kunci (seperti citra-citra digital) dicatat, digandakan dan dicadangkan, analisa bisa mulai dilakukan. Setelah investigasi lapangan, data apapun yang memiliki referensi geografis bisa ditambahkan ke peta-peta yang ada untuk menyajikan suatu gambar yang lebih jelas terkait lokasi pemanenan. Disinilah Google Earth atau tenaga spesialis software SIG lebih bermanfaat daripada Global Forest Watch, dimana data GPS bisa diunduh dan diperbandingkan

dengan data kontekstual, terutama peta-peta konsesi. Hal ini memungkinkan identifikasi pelanggaran operasional seperti penebangan diluar batas-batas wilayah. Ketika beberapa gambar bisa membuktikan hal ini, sebaiknya dilakukan referensi silang antara gambar tersebut dengan data GPS dan disimpan dalam suatu format yang memungkinkan bukti-bukti tersebut untuk bisa diakses dengan mudah.

Investigasi yang dilakukan oleh Greenpeace di Kamerun menunjukkan betapa efektif pelapisan peta secara sederhana sebagaimana yang mereka lakukan [lihat **Studi Kasus 4**]. Metode yang sama digunakan oleh Greenpeace dengan mengintegrasikan beberapa teknik yang lebih rumit dalam menindaklanjuti investigasinya terhadap penebangan liar di Para State, Brazil. Dalam hal ini, bukti didukung oleh pelacak GPS yang ditanam pada truk-truk kayu, suatu alat yang memberikan pemahaman yang belum pernah ada sebelumnya terkait pencucian spesies bernilai tinggi [lihat: **Studi Kasus 8**].

Menghubungkan Titik-Titik dan Langkah-Langkah Selanjutnya

Siklus pengumpulan data perizinan, menganalisa peta dan melakukan pekerjaan lapangan bisa dilakukan lebih dari sekali, dan kemungkinan perlu dilakukan untuk melengkapi suatu paket informasi yang mencapai ambang batas pembuktian. Ketika bukti kuat terkait tindakan pelanggaran hukum telah ditemukan, langkah selanjutnya adalah menentukan kemana kayu tersebut akan bergerak dari titik pemanenan. Dibeberapa kasus, bukti akan tetap tidak terlihat jelas, seberapa besar pun cakupan investigasi di titik pemanenan. Hal ini terutama akan terjadi ketika pelakunya adalah sejumlah besar orang-orang yang sepertinya tidak terorganisir, bertindak sendiri-sendiri, atau ketika kayu tersebut mengalami pencucian. Kemungkinan juga, kurangnya transparansi informasi membuat akses terhadap perizinan dan peta menjadi tertutup, atau ada berbagai resiko keamanan dan tantangan logistik yang menghalangi investigasi lapangan yang menyeluruh.

Dalam semua contoh situasi yang disebutkan di atas, bergerak turun ke hilir dan mengidentifikasi tujuan kayu – baik melalui observasi fisik maupun pelacakan, atau mengikuti jejak dokumen – akan menghadirkan peluang yang baru dan berbeda bagi investigasi perdagangan kayu ilegal. Kayu bisa dipanen secara legal namun kemudian menjadi ilegal, di hilir, dikarenakan oleh pelanggaran-pelanggaran pada peraturan-peraturan lain yang mengatur pengangkutannya, pemrosesan dan perdagangan.

Resiko: Mengurangi berbagai resiko dalam investigasi lapangan

Melakukan investigasi terhadap penebangan liar memiliki resiko-resiko yang signifikan, terutama pada saat melakukan pekerjaan lapangan. Di banyak negara, mereka yang melakukan investigasi pada bidang ini sudah pernah ditahan dengan semena-mena, mengalami luka parah atau bahkan dibunuh, dan siapapun yang merencanakan pekerjaan yang sedemikian harus mengambil resiko-resiko tersebut dengan serius dan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengkaji dan menguranginya.

Sifat dan tingkat resiko ketika melakukan kerja lapangan bisa sangat bervariasi antar negara dan di dalam suatu negara. Di semua kasus, ketika tujuannya adalah untuk mendokumentasikan kegiatan ilegal, merupakan hal yang bijaksana untuk mengasumsikan bahwa ada resiko pada kadar tertentu. Para investigator lapangan bisa menjadi sasaran ancaman dari para penebang kayu, sekuriti perusahaan atau ditahan oleh polisi, baik dengan jaminan atau tidak. Ketika bepergian ke wilayah hutan yang terpencil, dengan komunikasi yang terbatas, atau bahkan tidak ada, dengan dunia luar, mereka bisa terdampar jika menderita cedera karena kecelakaan, atau mengalami kerusakan pada kendaraan.

Dalam beberapa skenario berikut, strategi untuk mengurangi resiko fokus pada mengkaji dengan hati-hati resiko-resiko yang mungkin terjadi, dan mengembangkan rencana-rencana kontingensi, termasuk membangun sistem komunikasi dengan seseorang yang tidak terlibat secara langsung dalam pekerjaan lapangan tersebut. Langkah-langkah berikut ini bisa memberikan beberapa panduan dan sebaiknya diadaptasikan sesuai dengan situasi lokal. Pada akhirnya, jika resiko tersebut terlalu besar, maka satu-satunya langkah untuk mengurangi resiko yang paling sesuai adalah tidak melakukan pekerjaan lapangan sama sekali.

- Sebelum dilakukannya setiap investigasi, kajian tertulis terkait berbagai kemungkinan resiko harus dipersiapkan.
- Ketika investigasi lapangan diharapkan mencakup wilayah-wilayah di luar cakupan jaringan telepon/ponsel, telepon satelit harus dibawa sebagai

cadangan darurat; telepon satelit ini biasanya bisa disewa dengan harga yang cukup masuk akal.

- Para investigator lapangan harus mengembangkan suatu rencana dan jadwal perjalanan yang jelas, menentukan berapa jumlah hari yang mereka perkirakan akan dihabiskan di suatu lokasi tertentu. Mereka harus berusaha menentukan jika dan kapan mereka jelas-jelas akan tidak bisa dihubungi melalui telepon atau sarana lainnya.
- Rencana tersebut harus dibagikan kepada kontak yang terpercaya, idealnya seorang anggota tim, yang tidak akan bisa terlibat dalam investigasi lapangan, yang setuju untuk memastikan bahwa mereka bisa dikontak dengan menggunakan ponsel selama 24 jam sehari selama masa investigasi lapangan.
- Tim lapangan harus membuat suatu rencana komunikasi, agar kontak yang dinominasikan bisa melakukan panggilan pengecekan rutin, dengan memikirkan keterbatasan akses terhadap telepon. Rencana tersebut harus menjelaskan mengenai langkah apa yang akan diambil, sebagaimana yang sudah ditentukan sebelumnya, jika tidak ada kontak dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini bisa termasuk menjangkau kontak lain yang diketahui berada di wilayah tertentu, atau memberitahukan petugas pemerintah jika dirasa aman dan tepat. Rencana tersebut harus menyertakan rincian kontak orang-orang yang relevan yang akan dihubungi dalam berbagai situasi darurat, termasuk nomer ponsel.
- Di beberapa wilayah, akan sesuai bagi para investigator lapangan untuk mengidentifikasi seorang pengacara yang bisa dihubungi jikalau mereka ditangkap atau ditahan. Idealnya, pengacara tersebut seharusnya dikontak sebelum dilakukannya investigasi lapangan.
- Para investigator lapangan harus menggunakan sopir yang sudah pernah diuji dan terpercaya jika mungkin dan memastikan bahwa mereka mengetahui sifat sensitif tugas tersebut; mereka juga harus melakukan pengujian dasar terhadap kendaraan (seperti mengecek ban serep) sebelum berangkat.
- Para investigator lapangan harus memiliki cerita samaran yang menjelaskan alasan keberadaan mereka di suatu wilayah tertentu. Cerita ini harus pendek, dan sesederhana mungkin. Contohnya, melakukan penelitian dari suatu universitas atau berwisata.

- Investigator lapangan harus memastikan bahwa mereka sebisa mungkin tidak menarik perhatian (seperti dengan menodongkan kamera keluar jendela mobil) hanya untuk mengumpulkan bukti kunci; tugas-tugas dengan prioritas yang lebih rendah (seperti merekam video dan foto untuk membantu mengilustrasikan suatu laporan) sebaiknya hanya dilakukan setelah tugas-tugas prioritas diselesaikan.
- Para investigator sebaiknya menentukan bagaimana mereka akan berkomunikasi dengan masyarakat lokal, dan sejauh mana tujuan mereka yang sesungguhnya harus diceritakan. Penting halnya untuk jujur jika memungkinkan.
- Para investigator harus memastikan bahwa ketika masyarakat berbagi informasi, mereka sudah menyepakati ketentuan dimana informasi tersebut bisa digunakan. Hal ini terutama penting ketika informasi tersebut secara langsung berkaitan dengan mereka. Perjanjian ini harus jelas, tidak ambigu dan dihormati.
- Para investigator harus memastikan bahwa data dikelola dengan cara yang sedemikian sehingga informasi sensitif tidak jatuh ke tangan yang salah, jika ada kejadian dimana mereka ditangkap atau ditahan oleh staf perusahaan. Setidaknya, telepon, laptop dan perangkat kasar lainnya sebaiknya dilindungi dengan kata sandi. Hardware sebaiknya 'dibersihkan' dari data yang memberatkan atau sensitif, yang bisa disimpan dalam suatu hard drive eksternal. Idealnya, data seharusnya menggunakan sandi dan tersembunyi dari akses yang kentara. Software enkripsi mudah digunakan dan bisa diunduh gratis. Panduan enkripsi lain tersedia di www.timberinvestigator.info.

Studi Kasus 4: Menyatukan data lapangan dan peta¹²

Greenpeace melakukan analisisnya terhadap penebangan liar di Kamerun dengan menggunakan batas-batas izin pemotongan yang tersedia melalui kolaborasi antara World Resources Institute dan Kementerian Kehutanan dan Kehidupan Liar di Kamerun. Data tersebut dipublikasikan sebagai bagian dari suatu upaya untuk memperkuat manajemen kehutanan di negara tersebut.

Selama investigasi lapangan pada tahun 2014,

Greenpeace telah mendokumentasikan jalan logging, kayu-kayu tebangan dan tunggul pohon dengan menggunakan GPS dan foto-foto. Mereka selanjutnya melapis peta lokasi kegiatan penebangan tersebut dengan batas-batas izin, dengan mengidentifikasi tempat pemanenan kayu yang berada hampir dua km di luar wilayah yang diizinkan. Bukti tersebut disajikan kepada otoritas pemerintah Belanda yang ditugaskan untuk mengimplementasikan EUTR. Hasilnya, otoritas tersebut bersama dengan jaksa umum mengajukan suatu laporan melawan suatu perusahaan yang telah mengimpor kayu dari Kamerun, atas kegagalannya untuk mempraktikkan uji tuntas dengan baik.



Protes di pelabuhan Caen di Perancis terkait dugaan kayu ilegal dari Kamerun ©Greenpeace

2.3 Transportasi, Pemrosesan dan Perdagangan

Jarak antara tempat pemanenan dan tempat ekspor bisa sederhana atau kompleks. Di beberapa negara, misalnya Laos, kayu dinaikkan ke truk yang dekat dengan poin pemanenan dan langsung diangkut ke penyeberangan di perbatasan. Di negara-negara lain, rantai pasok bisa melibatkan lebih banyak langkah, orang dan entitas. Di Indonesia, misalnya, kayu yang ditebang di Papua bisa dikenai beberapa proses dasar, diangkut dengan kapal ke pulau Jawa, dijual kepada penghasil perabot oleh makelar dan diekspor oleh agen.

Kegiatan investigasi pada tahap ini dalam rantai pasok menawarkan dua manfaat. Yang pertama, hal ini bisa mengidentifikasi pergerakan kayu dari sumber ilegal ke titik ekspor, yang bisa dilacak ke pasar-pasar yang sensitif. Yang kedua, kegiatan ini bisa mengidentifikasi tindakan ilegal yang tidak berkaitan dengan pemanenan. Pengangkutan, pemrosesan, perdagangan dan ekspor kayu dikenai serangkaian peraturan untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut dikenai pajak yang semestinya dan mendukung manajemen kehutanan melalui mekanisme arus

hilir. Pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan ini sudah tercakup dalam definisi legalitas dalam EUTR dan Lacey Act. Bahkan, dakwaan yang sukses dibawah Lacey Act dilakukan berdasarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan pada tahap ini dalam rantai pasok. Bahkan jika kayu tersebut dipanen secara legal, ia menjadi ilegal jika peraturan-peraturan di sepanjang rantai pasok dilanggar.



Truk kayu di Sarawak, Malaysia ©Earthsight

2.3.1 Berbagai tindakan pelanggaran hukum pada saat pengangkutan, pemrosesan dan perdagangan

Pelanggaran-pelanggaran pada saat pengangkutan

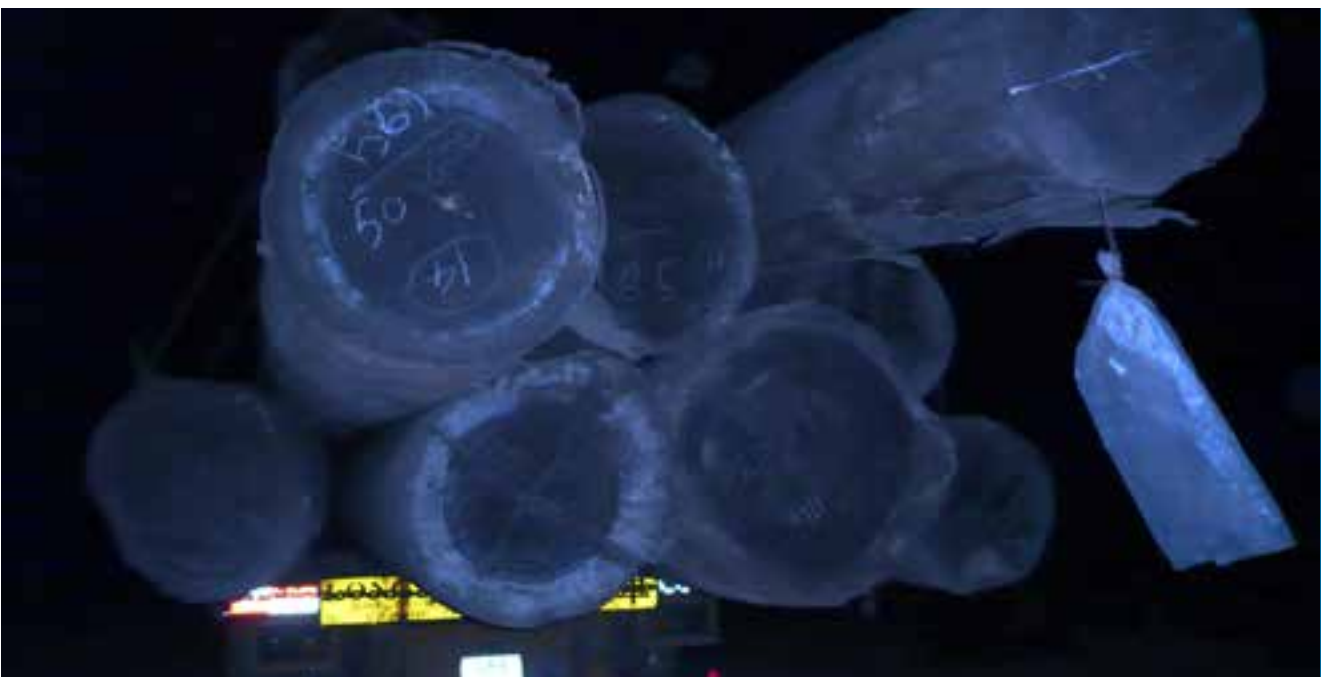
Setelah kayu dipanen, di sebagian besar kasus, ada ketentuan hukum untuk menandai kayu-kayu tersebut, seringkali dengan menggunakan palu yang dirancang khusus (lihat **Tool Box: Penandaan kayu**). Penandaan kayu biasa dilakukan untuk memungkinkan, pada tataran tertentu, ketertelusuran kembali ke sumbernya di sepanjang rantai pasok. Beberapa rezim pemanenan mencakup pemeriksaan oleh pejabat pemerintah setelah pemanenan, yang menghasilkan dokumen-dokumen yang membuktikan legalitas hasil panen. Penandaan kayu juga memungkinkan pengecekan dengan mencocokkan dengan inventori hutan atau rencana pemotongan, untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tidak melakukan pemanenan yang melewati batas.

Fitur umum lainnya adalah penggunaan izin transportasi kayu, yang diterbitkan oleh otoritas, yang seharusnya mendampingi kayu dari titik pemanenan. Di Indonesia, misalnya, kayu dari hutan alam harus didampingi oleh sertifikat legalitas, yang dilampirkan pada daftar kayu. Dokumen yang semacam ini didesain untuk mencegah kayu ilegal untuk diangkut, selain juga memungkinkan para petugas untuk mencocokkan antara bahan mentah yang digunakan dalam pemrosesan dengan pemanenan tertentu yang sah. Dokumen-dokumen

pengangkutan kayu dan penandaan yang resmi kemungkinan hanya disyaratkan untuk kayu, meskipun beberapa negara juga mensyaratkan hal ini bagi kayu sekunder yang sudah diproses seperti bubuk gergaji.

Penandaan kayu dan dokumen-dokumen transportasi seringkali berkaitan dengan tindakan pelanggaran hukum. Di banyak contoh, kayu-kayu tidak ditandai sama sekali. Di Kamerun, Greenpeace telah mendokumentasikan batang-batang kayu yang dipanen dengan melanggar hukum namun tetap ditandai [lihat **Studi Kasus 4**]. Di Indonesia, JPIK pernah mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang secara ilegal mengambil kayu dari hutan masyarakat dan mengangkutnya ke pabrik penggergajian tanpa dokumen-dokumen pengangkutan [lihat **Studi Kasus 5**].

Penggunaan dokumen-dokumen pengangkutan secara ilegal juga dilakukan untuk memfasilitasi pemanenan yang melewati batas atau pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya. Di Peru, dokumen-dokumen pengangkutan sering digandakan dan dipalsukan, untuk memungkinkan pencucian kayu yang dipanen secara ilegal melalui konsesi yang memiliki hak 'resmi' untuk memanen [lihat **Studi Kasus 6**]. Di Republik Kongo pencucian difasilitasi dengan cara yang sama, melalui duplikasi jumlah kayu dan tunggul kayu. Di Kamerun, dokumen pengangkutan palsu yang terkait dengan hutan kemasyarakatan digunakan untuk mencuci kayu ilegal. Di beberapa negara, pelanggaran diberlakukan terhadap pergerakan berbagai produk atau jenis produk dalam satu negara, seperti pelanggaran pada pengangkutan kayu keluar dari provinsi tertentu.



Truk kayu yang melaju di kegelapan di Laos ©EIA

Pelanggaran-pelanggaran pada pemrosesan

Fasilitas-fasilitas pemrosesan, termasuk pabrik penggergajian hulu dan pabrik-pabrik hilir, dikenai rezim peraturan yang berbeda dengan yang mengatur sumber kayu yang mereka gunakan. Pabrik-pabrik penggergajian seringkali membutuhkan perizinan yang valid dari otoritas kehutanan untuk beroperasi, dan kemungkinan dikenai audit secara berkala. Kayu yang telah dipanen atau diperdagangkan secara legal, bisa berkurang legalitasnya jika diproses di suatu fasilitas yang melanggar peraturan yang berlaku.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap pelarangan ekspor

Dalam suatu upaya untuk menekan eksploitasi berlebih dan mendukung industri pemrosesan domestik, banyak negara telah menerapkan pelarangan atau pembatasan ekspor kayu-kayu gelondongan yang belum diproses dan dalam beberapa kasus termasuk juga kayu gergajian kasar. Beberapa, termasuk Brazil dan Indonesia, melarang keras ekspor kayu mentah. Di negara-negara lain, gambarannya lebih rumit, dalam berbagai cara yang memfasilitasi penghindaran terhadap pembatasan-pembatasan tersebut.

Di Laos, misalnya, ada pelarangan ekspor kayu, namun pemerintah memiliki hak untuk mengecualikan pengiriman tertentu. Pada kenyataannya, ekspor kayu merupakan hal yang normal, dengan adanya sedikit kejelasan di balik keputusan, atau dasar hukum terkait pengecualian tersebut. Peraturan-peraturan di Republik Kongo membatasi porsi panen kayu gelondongan yang boleh diekspor oleh masing-masing perusahaan kayu sebagai kayu yang belum diproses, namun izin khusus bisa diperoleh untuk memperluas batasan ini. Pada praktiknya, porsi kayu yang diekspor secara rutin telah melewati batas-batas standar. Di beberapa negara, seperti Mozambik, pelarangan ekspor batang kayu dilarang untuk spesies tertentu (biasanya bernilai tinggi).

Perusahaan-perusahaan pada umumnya melanggar kontrol ekspor yang sedemikian, sering kali dengan berkolusi dengan petugas resmi. Kayu bisa diekspor di dalam kontainer kapal dan tidak dideklarasikan. Kayu-kayu bisa diseludupkan keluar dalam kapal-kapal kecil dan kemudian ditransfer ke kapal yang lebih besar di laut atau di negara-negara tetangga. Ketika tiba di negara-negara tujuan, kayu-kayu gelondongan yang ilegal bisa dengan berbohong dideklarasikan berasal dari tempat lain, dengan dilengkapi seluruh perangkat dokumen yang dipalsukan.

Studi Kasus 5: Penggelapan kayu di Indonesia¹³

Labora Sitorus, seorang staf kepolisian berpangkat rendah di Provinsi Papua Barat di Indonesia, merupakan pemilik perusahaan pemrosesan kayu bernama PT Rotua. Selama investigasi lapangan, para investigator masyarakat sipil meyakini bahwa PT Rotua menerima kayu yang secara kasar diproses di dalam hutan dari komunitas di dua kabupaten. Para investigator selanjutnya yakin bahwa PT Rotua menggunakan dokumen-dokumen yang tidak benar dan tidak lengkap untuk mengangkut kayu dari tempat pemanenan ke pabrik penggergajianya, dan dari pabrik penggergajian ke tempat pemrosesan di kota Surabaya. Sitorus ditangkap pada bulan Mei 2013, dan 115 kontainer berisi kayu Merbau yang berharga, yang diperkirakan bernilai lebih dari US\$ 20 juta, disita. Investigasi setelahnya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa hampir US\$128 juta dicuci melalui akun bank pribadinya, hasil dari kayu ilegal dan penggelapan bahan bakar. Pada tahun 2014, Sitorus didakwa atas penebangan liar dan pencucian uang. Ia dihukum sampai dengan 15 tahun penjara dan diperintahkan untuk membayar denda sebesar US\$400.000.



Polisi terdakwa korupsi, Labora Sitorus

Tool Box: Penandaan kayu

Di seluruh negara penghasil kayu, ada berbagai peraturan dan regulasi yang mengatur bahwa semua kayu legal harus diberi penandaan khusus pada bagian ujungnya. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pemotongan atau perdagangan kayu kemungkinan membuat tanda tambahan pada ujung kayu yang tidak diwajibkan oleh peraturan. Pemahaman akan penandaan ini dan kemampuan untuk mengartikan penandaan tersebut bisa bermanfaat ketika melakukan investigasi tindakan pelanggaran hukum dan penelusuran rantai pasok.

Penandaan kayu bisa dalam bentuk label, cat atau 'cap-palu' (dimana huruf dan angka ditekankan pada permukaan kayu dengan menggunakan palu khusus). Penandaan secara umum mengindikasikan nama dan/atau nomor izin dari wilayah pemanenan yang memiliki izin darimana kayu tersebut berasal. Kayu-kayu tersebut juga bisa diidentifikasi (dengan menggunakan suatu kode) wilayah tertentu di dalam konsesi tersebut dimana pohon dipotong. Di beberapa kasus, penandaan bahkan bisa dihubungkan dengan masing-masing pohon, yang tunggulnya harus diberi label dengan kode yang sama. Nama perusahaan jarang diberikan secara lengkap, namun biasanya berbentuk inisial atau kode perusahaan. Penandaan yang berbeda-beda diberikan pada ujung kayu pada tahapan yang berbeda dalam proses pemanenan, pengangkutan dan ekspor. Batang-batang kayu yang diekspor kemungkinan memiliki penandaan atau logo tambahan yang mengidentifikasi

perusahaan pengekspor. Beberapa penandaan yang diwajibkan hanya boleh ditambahkan oleh para petugas, meskipun perusahaan sering kali diberi tanggung jawab, dengan pemeriksaan berkala oleh para petugas resmi.

Dalam kasus yang paling sederhana, kurangnya penandaan yang diwajibkan kemungkinan menunjukkan bahwa batang-batang kayu tersebut dipanen secara ilegal. Yang lebih sering, penandaan kayu bisa digunakan untuk melacak batang-batang kayu kembali ke suatu lokasi dimana penebangan liar belum terdokumentasikan. Penandaan palsu pada kayu juga bisa digunakan untuk mencuci kayu-kayu ilegal; penandaan tersebut mungkin ditambahkan pada kayu-kayu sejak awal, atau penandaan yang sesungguhnya mungkin dihapus atau digantikan. Di pelabuhan di Republik Demokratik Kongo pada tahun 2013, misalnya, Greenpeace menyaksikan kayu-kayu yang diduga berasal dari sumber ilegal yang bagian ujungnya dipotong dan dicat dengan penandaan baru.¹⁴ Para investigator independen mungkin memiliki peluang untuk mengeskpos praktik-praktik yang sedemikian, namun untuk membuktikan penipuan yang sistematis biasanya membutuhkan suatu tingkat akses terhadap kayu-kayu tersebut dan dokumentasi terkait pada taraf yang hanya tersedia bagi para pemantau dengan mandat resmi.

Pedoman tambahan yang terperinci mengenai bagaimana menginterpretasikan penandaan yang diketemukan pada kayu-kayu dari berbagai negara tersedia di website www.timberinvestigator.info.



Tanda cat pada kayu di Kamerun. Penandaan ini menunjukkan identitas penebang, wilayah perizinan, nama blok dalam wilayah perizinan, dan pohon yang ditebang.



Label dan cap palu pada kayu di Sarawak, Malaysia. Logo pada label tersebut menunjukkan perusahaan penebangan, dan kode tiga huruf memungkinkan kayu tersebut untuk ditelusuri sampai ke wilayah perizinan tertentu.



Barcode pada kayu dari Papua Nugini. Kode tersebut menunjukkan penebang dan wilayah izin tertentu.

Penghindaran pajak

Beberapa praktik yang sama yang memungkinkan perusahaan untuk menutupi asal kayu yang ilegal bisa dilakukan untuk meminimalisir tanggung-jawab pajak. Pajak pemanenan bisa dihindari dengan cara mendeklarasikan total volume kayu yang diambil dibawah jumlah yang sebenarnya atau memalsukan jenis spesiesnya. Bea cukai dan tarif ekspor (baik secara umum maupun khusus kayu) bisa dihindari dengan cara-cara yang sama. Hanya dalam waktu satu bulan pada tahun 2012, misalnya, otoritas di Republik Kongo memperkirakan bahwa 12 perusahaan telah gagal dalam mendeklarasikan hampir 4.500m³ kayu, dengan nilai komersil mencapai 2,5 juta euro.¹⁵ Yang lebih sering dilakukan, selain mendeklarasikan jumlah yang lebih kecil daripada sesungguhnya ketika mengekspor, dan yang lebih sulit untuk dideteksi, adalah mendeklarasikan harga yang dibayarkan dengan lebih rendah. Yang lebih sulit juga adalah kesalahan harga transfer, ketika harga yang sebenarnya dibebankan dan dibayarkan oleh perusahaan terkait lebih rendah daripada nilai yang sesungguhnya. Pada tahun 2008, misalnya, Greenpeace mempublikasikan dokumen-dokumen internal yang bocor dari perusahaan penebangan kayu multi-nasional yang berkantor di Swiss, yang mengindikasikan kesalahan sistematis pada pencantuman harga pada awal tahun 2000-an terkait dengan ekspor kayu dari Republik Demokratik Kongo ke Republik Kongo. Greenpeace memperkirakan bahwa kegiatan yang diekspor tersebut kemungkinan telah merugikan pemerintah di kedua negara hingga hampir mencapai \$10 juta dalam bentuk pendapatan.¹⁶

Pelanggaran-pelanggaran terhadap CITES

Konvensi PBB mengenai Perdagangan Internasional Spesies Langka (UN Convention on the International Trade in Endangered Species / CITES) menerapkan pengendalian terhadap perdagangan internasional spesies tertentu. Spesies yang terancam punah jika perdagangan internasional terus berlangsung tanpa regulasi bisa ditambahkan ke dalam satu dari tiga Lampiran Konvensi tersebut, sehingga memberikan berbagai batasan terhadap pengiriman antar batas. Manfaat CITES bagi negara-negara yang berjuang untuk menegakkan hukum domestik adalah, sebagai suatu perjanjian internasional, peraturan ini bisa diterapkan di negara-negara tujuan atau pasar, tidak hanya negara sumber.

Berdasarkan definisinya, CITES mengatur spesies yang semakin langka dan, pada akhirnya, biasanya bernilai tinggi. Spesies langka ini termasuk beberapa spesies Dalbergia yang ditargetkan sebagai kayu mawar yang berharga, dan Mahoni Daun Lebar. Untuk memungkinkan ekspor produk-produk dengan spesifikasi tertentu dibawah daftar spesies CITES, perusahaan harus memperoleh suatu izin dari Otoritas

Pengelolaan CITES (CITES Management Authority) di negara sumber pasokan. Untuk spesies pada Lampiran III yang diekspor dari negara-negara selain negara yang berada dalam daftar, diperlukan Sertifikat Asal CITES (CITES Certificate of Origin). Dalam contoh-contoh lainnya, diperlukan Izin Ekspor CITES (CITES Export Permit). Izin ekspor hanya bisa diterbitkan jika kayu dipasok secara legal dan (untuk Lampiran II) jika ekspor tersebut tidak “membahayakan kelangsungan hidup spesies tersebut”¹⁷. Meskipun peraturan ini menyediakan lapisan tambahan bagi perlindungan dan pengawasan terhadap beberapa spesies lindung, ia sering dilanggar.



Kapal Kargo yang ditahan di perairan Papua pada tahun 2003. ©EIA

Kayu yang dikenai ketentuan pengendalian CITES namun tidak memiliki dokumen yang diharuskan kemungkinan diseludupkan dengan menggunakan deklarasi palsu sebagai spesies lain, dengan deklarasi palsu sebagai kategori produk yang tidak termasuk dalam daftar, atau melalui pengiriman yang melebihi batas yang diizinkan. Bahkan ketika pengiriman sudah dicakup dalam izin CITES, tindakan pelanggaran hukum sering dilakukan. Perizinan bisa diperoleh melalui penipuan, diterbitkan melalui korupsi, atau dipalsukan. Contoh-contoh praktik ini untuk kayu yang terdaftar dalam CITES telah didokumentasikan selama beberapa tahun belakangan di Peru dan Republik Demokratik Kongo [lihat Studi Kasus 6]. Pengiriman dengan izin CITES yang valid dikecualikan dari EUTR.

2.3.2 Melakukan investigasi terhadap pengangkutan, pemrosesan dan perdagangan

Jejak dokumen

Ketika kayu bergerak dari tempat pemanenan menuju titik ekspor, kayu harus didampingi oleh dokumen-dokumen yang menunjukkan sumbernya. Cakupan dan kompleksitas sistem 'lacak balak' resmi ini berbeda-beda antar negara. Di Brazil, misalnya, ada database elektronik mengenai 'kredit' yang dipertukarkan dari produsen dan seterusnya melalui rantai pasok. Di negara-negara lain, sistem tersebut sudah ada sebagian besar dalam dokumen cetak, dan kemungkinan tidak akan melalui proses sekunder. Menganalisa data ini bisa memberikan bukti pelanggaran melalui rantai pasok, dan juga memungkinkan mengungkap hubungan antara kayu yang dipanen secara ilegal hingga diekspor.

Di Brazil, misalnya, Greenpeace dapat mengidentifikasi pabrik-pabrik penggergajian yang membeli kayu yang ditanggung oleh kredit dari wilayah-wilayah dimana ditemukan berbagai pelanggaran. Dari pabrik-pabrik penggergajian tersebut mereka mampu mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang menjual kayu ke pasar ekspor [lihat **Studi Kasus 8**].

Di Indonesia, hubungan antara panen dan pabrik penggergajian dijelaskan dalam rencana bahan mentah yang disusun oleh pabrik-pabrik penggergajian. Catatan tersebut,

setiap tahunnya, merupakan rencana sumber perusahaan-perusahaan pemrosesan kayu yang akan digunakan selama setahun ke depan, dan secara otomatis memperhitungkan basis pasokan selama tahun yang sebelumnya. Dokumen ini mencatat perusahaan berdasarkan namanya, yang kemungkinan menyertakan wilayah-wilayah konsesi dimana pelanggaran-pelanggaran operasional maupun bentuk-bentuk lain penebangan liar telah teridentifikasi. Dari pabrik penggergajian, kayu tersebut bisa berpotensi dilacak ke pasar melalui beberapa cara, termasuk pertemuan rahasia, atau penelusuran mundur yang diawali di pasar (lihat beberapa bab setelah ini). Akses terhadap data ini bisa diperbaiki dengan signifikan oleh kasus yang dimenangkan oleh LSM Forest Watch Indonesia melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dibawah UU Keterbukaan Informasi Publik [lihat **Tool Box: Kebebasan Informasi**].

Izin Ekspor CITES, yang bisa diakses, menyediakan aliran sumber informasi yang bermanfaat lainnya, karena informasi tersebut diterbitkan oleh para eksportir. Dalam suatu contoh, Izin Ekspor CITES dari Peru yang di referensi silang dengan laporan-laporan penegakan hukum resmi pemerintah, telah memungkinkan pengidentifikasian lebih dari 100 ekspor yang terkait dengan hutan, dimana terjadi kegiatan pelanggaran hukum yang serius [lihat **Studi Kasus 6**].

Potensi untuk mereplikasi investigasi-investigasi yang seperti ini akan tergantung pada ketersediaan berbagai dataset yang berbeda, aksesibilitas dan keterandalan data set tersebut. Beberapa investigasi di Brazil dan Peru mendemonstrasikan bahwa pelanggaran hukum yang rumit pada sumber pasokan, pencucian dan rantai pasok yang tidak jelas bisa terhubung melalui ekspor jika datanya tersedia.



Izin CITES dari Peru ©EIA



Kayu ilegal yang diproses di hutan Brazil ©Greenpeace

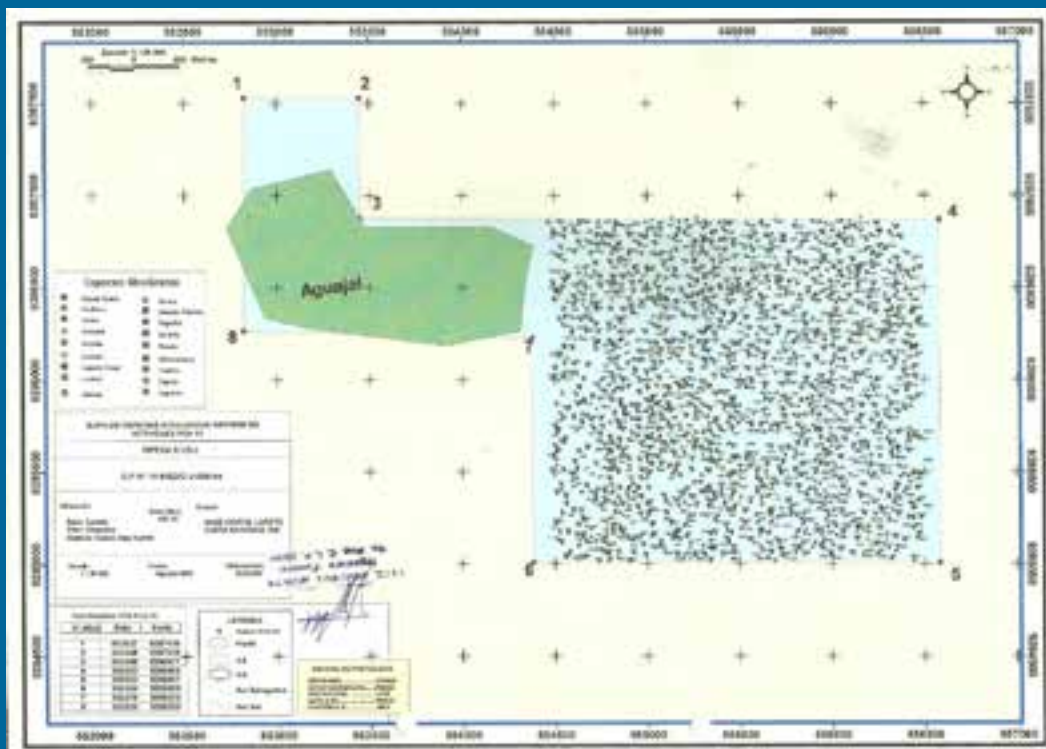
Studi Kasus 6: Jejak dokumen Peru

Di Peru, suatu lembaga pemerintah, Badan Pengawas Sumberdaya Hutan dan Satwa Liar (Supervisory Body for Forest Resources and Wildlife / OSINFOR), melakukan inspeksi lapangan acak secara berkala terhadap konsesi-konsesi hutan yang baru-baru ini ditebangi. Selama inspeksi ini, para petugas OSINFOR mengkaji sejauh mana pemanenan terjadi dengan mentaati berbagai peraturan. Mereka juga mengkaji suatu area sampel hutan untuk diperiksa dengan membandingkannya dengan volume yang dideklarasikan oleh pemilik konsesi. Pemeriksaan-pemeriksaan tersebut menghasilkan Laporan Pengawasan (Supervisory Reports) yang mengidentifikasi tindakan-tindakan ilegal seperti inventori palsu, penebangan liar dan penyalahgunaan perizinan untuk pencucian kayu.

Environmental Investigation Agency (EIA) mendapatkan Laporan Pengawasan untuk beberapa inspeksi yang dilakukan antara tahun 2008 sampai dengan 2011 berdasarkan Undang-Undang Transparansi dan Akses terhadap Informasi Publik di Peru (Transparency and Access to Public Information Law). Lebih dari 200

konsesi yang tercakup dalam laporan-laporan tersebut menunjukkan beberapa bentuk tindakan pelanggaran hukum yang cukup serius. EIA melakukan referensi silang laporan-laporan ini dengan database Izin Ekspor CITES untuk kayu cedar Spanyol dan mahoni daun lebar dari Peru, yang juga diperoleh melalui undang-undang transparansi. Kegiatan ini telah mengidentifikasi lebih dari 100 izin yang digunakan untuk mengekspor spesies yang terancam ke AS, kesemuanya secara langsung terhubung, melalui perizinan itu sendiri, dengan konsesi-konsesi yang telah diidentifikasi OSINFOR terdapat beberapa bukti adanya kegiatan pelanggaran hukum yang serius.

Secara teori, perizinan CITES sudah menyebutkan konsesi asal, namun di beberapa kasus izin-izin tersebut terhubung dengan konsesi-konsesi dimana OSINFOR tidak menemukan penebangan yang sah. Di beberapa kasus, para pemilik konsesi memalsukan inventori untuk menggelembungkan volume spesies yang terancam punah yang secara legal boleh mereka panen. Izin CITES juga menyebutkan nama-nama para importir kayu di AS, sehingga dengan menggunakan proses ini EIA bisa menghubungkan antara pemanenan ilegal dan pasar.



Peta yang diserahkan kepada otoritas oleh suatu perusahaan penebangan di Peru, yang menunjukkan lokasi yang sepenuhnya dipalsukan dimana lebih dari seribu pohon sebenarnya tidak pernah dipanen.

Investigasi Lapangan melalui observasi

Di beberapa negara dimana data tidak tersedia, memiliki kualitas yang buruk atau tersembunyi di balik dinding birokrasi, beberapa bagian rantai pasok bisa terlihat melalui observasi langsung. Melacak kayu gelondongan dari berbagai sumber di sepanjang rantai secara logistic sulit terjangkau, atau tidak mungkin dilakukan. Meskipun demikian, penandaan kayu [lihat **Tool Box: Penandaan Kayu**] bisa membantu mengidentifikasi sumber kayu di hilir, bahkan sejauh pasar-pasar di benua-benua yang berbeda.

EIA telah mengidentifikasi kayu yang dipasok dari militer Vietnam di sepanjang rantai pasok, dari hutan-hutan di Laos sampai dengan pemeriksaan di perbatasan dan lebih jauh lagi, dengan menggunakan label yang unik. Metode yang sama bisa digunakan di negara-negara yang berbeda, asalkan perusahaan-perusahaan dan para petugas memanfaatkan penandaan-penandaan individu yang secara legal diwajibkan, dan para investigator bisa mengartikannya.

Metodologi ini bisa digunakan ketika berbagai investigasi dimulai pada tahap ini dan lebih ditujukan untuk mengidentifikasi berbagai pelanggaran pengangkutan dan pelanggaran ekspor, ketimbang tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan pada titik pemanenan. Misalnya, EIA telah mendokumentasikan dan menyoroti pelanggaran-pelanggaran terhadap berbagai ketentuan ekspor kayu melalui wilayah utara Myanmar yang berbatasan dengan Cina, tanpa menelusuri kayu tersebut kembali ke titik pemanenan [lihat **Studi Kasus 7**].

Para investigator bisa juga memperoleh informasi dari para sopir truk kayu atau orang-orang yang tinggal atau bekerja di sepanjang rute pengangkutan kayu. Percakapan-percakapan yang sedemikian harus dilakukan dengan hati-hati, namun bisa membantu menentukan dari mana kayu berasal, atau kemana perginya. Para pekerja junior juga bisa didekati di tempat-tempat penebangan, pondok atau restoran. Jika hal ini dilakukan, merupakan hal yang penting untuk punya cerita samaran yang masuk akal untuk memberikan pembenaran akan kehadiran investigator di wilayah tersebut dan ketertarikan mereka terhadap kegiatan-kegiatan penebangan. Jika para investigator bertindak sebagai turis, merupakan hal yang masuk akal jika mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan karena pada umumnya penasaran, meskipun pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bisa terlalu rinci atau memancing. Jika para investigator adalah dan bisa dianggap sebagai orang lokal, mereka bisa berpura-pura ingin bekerja dengan perusahaan penebangan atau pengangkutan, sehingga bisa dimaklumi jika mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing.

Seharusnya keputusan untuk melakukan percakapan-percakapan atau interaksi-interaksi yang sedemikian bisa

ditentukan sebelum melakukan perjalanan, tergantung rencana perjalanan dan sifat investigasi. Keputusan-keputusan mengenai bagaimana hal ini akan dilakukan harus dimasukkan ke dalam perencanaan pra-perjalanan [lihat **Boks: Mengurangi berbagai resiko dalam investigasi lapangan**]. Keinginan mungkin muncul untuk merekam percakapan-percakapan tersebut secara tersembunyi, jika tersedia peralatan yang bisa membuat hal ini aman [lihat **Tool Box: Merekam bukti secara tersembunyi**].

Bahkan ketika investigasi jejak dokumen telah menghasilkan bukti jelas tindakan pelanggaran hukum dan menunjukkan hubungan antara rantai pasok, investigasi melalui observasi lapangan dapat memberikan informasi lebih jauh. Investigasi yang seperti ini hendaknya dipandang sebagai tahap kedua dari investigasi lapangan yang diidentifikasi dalam Bab 2.2.3, Melakukan Investigasi terhadap Pemanenan, dengan melakukan berbagai persiapan, pendekatan dan pengurangan resiko yang serupa [lihat **Resiko: Mengurangi berbagai resiko dalam investigasi lapangan**].

Cara ini terutama bisa efektif ketika rantai pasok kayu terkonsolidasi, dimana perusahaan-perusahaan yang sama yang terlibat dalam penebangan, juga menjual kayu langsung ke pasar ekspor. Hal ini bisa dilihat di Republik Demokratik Kongo, misalnya, dimana Greenpeace telah mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penebangan liar menjual kayu-kayu gelondongan dan kayu gergajian langsung ke negara-negara di Eropa dan AS. Disana keterkaitannya dengan pasar bisa terlihat setelah menggunakan metode-metode tersembunyi dan menginterogasi data perdagangan [lihat Bab 2.4: Penelusuran maju sampai konsumen akhir], meskipun investigasi lapangan melalui observasi di pelabuhan-pelabuhan bisa memberikan petunjuk untuk mendampingi tahap-tahap selanjutnya ini dalam investigasi tersebut.



Truk kayu di perbatasan Laos-Vietnam pada tahun 2008 ©EIA

Investigasi rahasia

Investigasi rahasia, atau samaran, terbukti merupakan metode yang paling efektif pada tahap ini dalam rantai pasok. Penyamaran sebagai pedagang kayu telah dimanfaatkan, hingga menghasilkan dampak yang signifikan, oleh Global Witness, EIA, Earthsight dan lainnya selama 20 tahun belakangan. Kegiatan tersebut telah menghasilkan informasi yang membongkar sisi internal korupsi dan suatu wawasan yang belum pernah ada sebelumnya mengenai karakteristik perdagangan ilegal.

Meskipun demikian, melakukan rapat tatap muka formal dan kunjungan-kunjungan perusahaan melalui penyamaran membutuhkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang signifikan dan memiliki resiko yang signifikan. Hasilnya, investigasi rahasia yang canggih ini sebaiknya tidak dilakukan tanpa pelatihan dari para ahli. Meskipun demikian, ketika dilakukan secara jarak jauh melalui telepon atau email, metode-metode penyamaran bisa digunakan dengan aman tanpa pelatihan khusus. Pada tahun 2010, misalnya, penelitian samaran lewat telpon telah membantu menunjukkan hubungan pemasok antara Indonesia dan Inggris Raya [lihat **Studi Kasus 11**].

Studi Kasus 7: Melakukan investigasi terhadap ekspor kayu¹⁸

Pada bulan April 2014, Myanmar menetapkan pelarangan terhadap ekspor kayu dalam suatu upaya untuk menumpas ekstraksi kayu yang berlebihan di hutannya yang semakin menyusut. Kuota yang diperbolehkan setiap tahunnya di negara tersebut selalu terlampaui karena pemanenan dan ekspor yang tidak terkontrol, yang kebanyakan langsung diangkut ke wilayah utara yang berbatasan dengan Cina, meskipun ada ketentuan dimana semua ekspor harus melewati Yangon, di selatan. Pada bulan Juni 2015, para investigator EIA melakukan perjalanan ke lintas perbatasan antara Myanmar dan Cina untuk mengkaji volume kayu yang diekspor dengan melanggar pelarangan tersebut. Di kota Nongdao mereka mendokumentasikan ribuan ton kayu

jati bernilai tinggi, kayu-kayu tamalan dan padauk yang dibawa ke Cina dari Myanmar. Di kota transit utama, Ruili, juga di dalam Cina, para investigator mengamati truk-truk yang menurunkan gelondongan kayu mawar setiap harinya. Pada awal 2015, para investigator mendokumentasikan deretan panjang truk-truk kayu yang menunggu untuk menyeberangi perbatasan Cina yang ditumpangi kayu-kayu.

EIA juga menggunakan metode tersembunyi, berpura-pura menjadi pembeli kayu untuk memperoleh informasi dari para agen penjual dan logistik. Hal ini memungkinkan mereka untuk membangun suatu gambaran mengenai metode yang digunakan oleh perdagangan tersebut untuk memperoleh akses terhadap berbagai sumber, menikung berbagai larangan, dan jaringan kompleks orang-orang yang mengendalikan rantai pasok.



Truk kayu di perbatasan Myanmar-Cina ©EIA

Studi Kasus 8: Pelacakan kayu gelondongan dari panen sampai ekspor¹⁹

Pada tahun 2014, setelah investigasi penebangan liar yang terperinci di hutan Amazon Brazil [lihat **Studi Kasus 1**], Greenpeace memasang suar GPS penentu lokasi pada truk-truk kayu yang beroperasi di negara bagian Pará. Pará menghasilkan dan mengekspor lebih banyak kayu dibandingkan negara-negara bagian lain di Brazil, dengan dua per tiga penebangan diperkirakan ilegal. Suar atau pelacak tersebut memancarkan sinyal yang bisa dideteksi jarak jauh dan dilacak dari waktu ke waktu. Suar tersebut mengungkap bahwa truk-truk tersebut melakukan perjalanan ke hutan-hutan milik pemerintah yang terpencil pada siang hari dan mengangkut kayu ke pabrik penggergajian pada malam hari. Melakukan pemeriksaan silang lokasi-lokasi tersebut dengan peta-peta pemerintah mengungkap bahwa tidak ada hak penebangan yang diterbitkan di wilayah-wilayah dimana truk-truk tersebut mengambil kayu. Pengintai diterbangkan oleh Greenpeace pada wilayah yang sama yang memungkinkan mereka mendokumentasikan jaringan jalan logging dan kamp-kamp ilegal.

Greenpeace kemudian memeriksa rekaman elektronik pabrik pemotongan yang menerima kayu, dan memeriksa citra satelit untuk bukti penebangan di sumber yang dinyatakan. Mereka menemukan bahwa di banyak perkebunan tidak ada sinyal penebangan sama sekali, dan beberapa hanya sedikit. Mereka menyimpulkan bahwa perkebunan-perkebunan kayu digunakan sebagai samaran untuk menyediakan dokumen resmi pabrik pemotongan tersebut, sehingga memungkinkan mereka untuk mencuci kayu ilegal yang diambil dari hutan pemerintah.

Dengan demikian, penggunaan pelacak GPS ini bisa sangat efektif, namun investasi waktu, keahlian dan tingkat resiko yang diambil oleh Greenpeace tidak boleh diremehkan. Untuk memasang pelacak pada truk-truk diperlukan membangun suatu tingkat kepercayaan dan keakraban dengan para pengemudi truk selama beberapa bulan. Harus diperhatikan juga bahwa bukti bisa menjadi efektif terutama karena dikombinasikan dengan data lain, termasuk perizinan, data lacak balak (chain-of-custody / CoC), citra satelit dan fotografi udara.



Truk kayu di negara bagian Para, Brazil ©Greenpeace

Pada tahap ini dalam suatu investigasi, profil perusahaan manapun yang ingin diteliti perlu dikembangkan, termasuk detail kontak [Lihat Boks: Membangun profil perusahaan]. Ketika hal ini telah diperoleh, para investigator bisa dengan aman melakukan pendekatan tersembunyi jarak jauh (melalui telepon atau email). Para investigator bisa memilih untuk menyamar sebagai calon pembeli atau penjual kayu, sebagai seorang jurnalis atau sebagai seorang peneliti akademis. Penelitian yang menyeluruh merupakan hal yang penting ketika memilih dan menginformasikan cerita samaran [lihat Tool Box: Mengembangkan cerita samaran untuk digunakan dalam investigasi rahasia].

Berikut ini merupakan beberapa jenis informasi yang seringkali bisa diperoleh melalui pendekatan terhadap perusahaan dengan cara ini:

- Spesies yang mereka gunakan.
- Produk-produk apa yang mereka jual.

- Volume produk-produk yang mereka jual.
- Sumber kayu yang dimanfaatkan dalam produk-produk mereka.
- Kepada siapa atau ke negara/wilayah mana mereka menjual produk-produk mereka.
- Sejauh mana rantai pasok mereka terintegrasi. Misalnya, apakah mereka terlibat dalam pemanenan di hulu, dan/atau ekspor di hilir.

Berbagai langkah harus diambil untuk memastikan bahwa identitas asli investigator tidak dapat dilacak. Mereka tidak boleh menggunakan nama asli, alamat email pribadi, dan data yang diperoleh melalui cara-cara ini harus dimasukkan ke dalam katalog yang baik untuk digunakan sebagai referensi ke depan. Untuk metode-metode yang bisa digunakan untuk merekam interaksi rahasia, lihat **Tool Box: Merekam bukti secara diam-diam**.

Tool Box: Mengembangkan cerita samaran untuk digunakan dalam investigasi rahasia

Ketika berusaha untuk memperoleh informasi dari beberapa perusahaan dengan menggunakan metode samaran, sifat dari cerita samaran tersebut harus ditentukan bagi tiap-tiap kasus, tergantung (diantaranya) dari karakteristik perusahaan dan potongan informasi penting apa yang dicari. Yang paling kentara adalah menyamar sebagai seorang calon pembeli, namun opsi lainnya bisa juga menyamar sebagai peneliti akademis. Manfaat dari menyamar sebagai calon pembeli adalah perusahaan-perusahaan lebih cenderung mau memberikan waktu mereka jika mereka merasa ada potensi penjualan. Kerugiannya adalah mudah tertangkap – cenderung seperti pengulur waktu, ketimbang sebagai seorang investigator – jika detail dan bahasa perdagangannya tidak tepat. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan (terutama yang paling banyak melanggar hukum) kemungkinan besar tidak mau memberikan waktu mereka kepada seorang peneliti. Namun jika perusahaan tersebut melakukannya, tidak perlu berpura-pura memiliki pengetahuan tentang perdagangan. Pertanyaan-pertanyaan yang jelas, bahkan langsung, bisa diajukan, bahkan mengenai legalitas dan korupsi. Kemungkinannya juga kecil bagi orang yang diwawancarai untuk membesar-besarkan atau berbohong, sebagaimana yang mungkin mereka

lakukan dalam upaya untuk memberi kesan terhadap seorang calon pembeli.

Setelah cerita samaran yang sesuai ditentukan, para investigator harus melakukan penelitian untuk memastikan bahwa mereka bisa mendukung cerita tersebut. Jika mereka menyamar sebagai pembeli, contohnya, mereka akan perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai jenis produk-produk yang para konsumen ingin beli, dan pertanyaan-pertanyaan yang mereka bisa ajukan tanpa menimbulkan kecurigaan. Sering kali seorang investigator yang menyamar sebagai pembeli akan mencari informasi yang tidak lazim untuk ditanyakan – seperti detail mengenai asal kayu yang digunakan dalam suatu produk (termasuk salinan dokumen resmi), atau identitas para konsumen lain – sehingga alasan pembenaran tertentu perlu dikembangkan sebagai bagian dari cerita samaran tersebut.

Mereka juga mungkin perlu menyempurnakan identitas samaran, sehingga mereka bisa menjelaskan siapa mereka bagi perusahaan-perusahaan yang mereka dekati. Hal ini bisa termasuk memperoleh alamat email yang khusus digunakan untuk tujuan ini dan bahkan mungkin membuat website perusahaan palsu. Tergantung bagaimana target tersebut diidentifikasi, para investigator juga mungkin perlu menyiapkan cerita samaran mengenai bagaimana mereka tahu tentang perusahaan tersebut dan memperoleh detail kontak yang digunakan.

Studi Kasus 9: Memetakan rantai pasok antar benua²⁰

Environmental Investigation Agency pernah melakukan wawancara dengan otoritas Rusia, lembaga non-profit dan komunitas, dan menemukan bahwa penebangan liar sistemik di Rusia Jauh Timur, dan pencucian kayu dengan menggunakan perizinan palsu, merupakan suatu rahasia umum. EIA menganalisa catatan bea cukai Rusia, Cina dan AS untuk mengidentifikasi lusinan perusahaan-perusahaan Cina yang mengekspor kayu keras untuk lantai ke AS, yang dibuat dari kayu pohon ek di hutan-hutan ini.

Setelah itu, para investigator EIA yang menyamar sebagai importir bertemu dengan para eksportir Cina. Para investigator ini berhasil menanyakan lebih dari 20 operator pabrik penggergajian dan pabrik lantai mengenai praktik-praktik pemasokan bagi para pembeli dari US. Salah satu dari perusahaan tersebut adalah perusahaan lantai yang dimiliki seseorang berkebangsaan Cina dengan nama perusahaan Suifenhe Xingjia Economic and Trade Company (Xingjia). Dalam pertemuan rahasia dengan EIA, presiden dan manajer senior Xingjia menjelaskan sistem pemanenan ilegal yang berlaku luas di hutan-hutan Rusia dan penyuaipan terhadap para pejabat pemerintah Rusia. Xingjia mengklaim bahwa mereka telah melebihi batas

pemanenan di wilayah-wilayah konsesinya sendiri, dan mencuci kayu ilegal yang dipotong di luar konsesinya sendiri dengan menggunakan izin-izin pemanenan. Sembilan puluh persen dari bahan mentahnya ternyata dipasok dari para pemasok berisiko tinggi lainnya di seluruh Timur Jauh Rusia. Penelitian lebih lanjut yang dilakukan EIA telah mengungkap bahwa para pemasok ini sedang diinvestigasi oleh kepolisian dan bahkan berhasil didakwa, atas keterlibatan mereka dalam penebangan liar.

Melalui data perdagangan, yang didukung oleh observasi selama pertemuan-pertemuan rahasia dengan menyamar sebagai pembeli potensial, EIA menemukan bahwa pelanggan terbesar Xingjia adalah perusahaan yang berkantor pusat di US, Lumber Liquidators. Lumber Liquidators, pada saat itu, merupakan ritel terbesar yang khusus menjual bahan lantai dari kayu keras di AS. Investigasi tersebut berujung pada dakwaan terhadap Lumber Liquidators dibawah Lacey Act. Pada bulan Oktober 2015, perusahaan tersebut setuju untuk mengaku bersalah terhadap beberapa pelanggaran di bawah undang-undang tersebut. Lumber Liquidators telah sepakat untuk membayar denda sebesar US\$13,2 juta dan mengikuti Rencana Kepatuhan Lingkungan (Environmental Compliance Plan) yang ketat selama lima tahun ke depan.²¹



Kota Suifenhe di perbatasan Cina ©EIA

Studi Kasus 10: Pertemuan samaran untuk membongkar korupsi

Pada tahun 2004, LSM EIA dan Telapak Indonesia membongkar perdagangan ilegal senilai mencapai satu milyar dolar yang terdiri atas kayu-kayu Merbau dari Papua di Indonesia, termasuk melacak rantai pasok ke Cina dan AS.²²

Kayu-kayu tersebut dipanen secara ilegal dan diekspor yang merupakan pelanggaran terhadap pelarangan ekspor kayu gelondongan di negara tersebut, dan diproses menjadi bahan lantai bernilai tinggi di Cina. Sindikat-sindikat multinasional yang rumit yang melibatkan para pejabat pemerintah Indonesia dan pedagang perantara di Singapura dan Hong Kong digunakan untuk menyeludupkan kayu-kayu gelondongan keluar dari negara tersebut dan menyamakan daerah asalnya sesampainya Cina.

EIA melakukan investigasi lapangan untuk mendokumentasikan tindakan pelanggaran hukum

yang dilakukan di negara sumber pasokan, melalui observasi lapangan dan beberapa wawancara dengan komunitas yang terdampak. Skala, modus operandi dan identitas individu-individu utama yang terlibat dalam peyeludupan kayu-kayu gelondongan dari Indonesia ke Cina terutama dibongkar melalui rapat-rapat rahasia dengan para pedagang kayu di Jakarta, Singapura dan Hong Kong, yang teridentifikasi dengan cara menjanging di perkumpulan perdagangan online. Hal ini didukung dengan membandingkan data perdagangan Indonesia, Malaysia dan Cina, dan penelitian mendalam terhadap penyitaan terhadap kapal-kapal penyelundup kayu gelondongan yang dilakukan otoritas pemerintah Indonesia. Hubungan terhadap rantai pasok ke AS ditemukan melalui kunjungan-kunjungan samaran ke pabrik-pabrik Cina dan analisa catatan pengiriman ke AS. Laporan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia meluncurkan pemberantasan yang belum pernah dilakukan sebelumnya terhadap penebangan liar di Papua, dengan mengutus 1.500 orang satuan tugas dan menyita lebih dari 400.000 kubik meter kayu. Harga Merbau di Cina berlipat ganda dalam waktu beberapa bulan ketika pasokan ilegal telah mengering.²³

Tool Box: Merekam bukti secara rahasia

Meskipun metode-metode tersembunyi untuk merekam informasi (seperti kamera tersembunyi) merupakan yang paling sering dilakukan dalam rapat-rapat rahasia atau kunjungan-kunjungan perusahaan (yang seharusnya tidak dilakukan tanpa pelatihan khusus), suatu pemahaman akan metode-metode perekaman rahasia dan peralatan juga bermanfaat dalam konteks-konteks lain. Mereka dapat dimanfaatkan ketika kontak-kontak rahasia berhasil dibangun dengan perusahaan melalui telepon, dan ketika pendokumentasian kesaksian bisa diperoleh melalui percakapan-percakapan informal dengan para penebang dan supir truk selama investigasi lapangan. Rekaman rahasia atau setengah-rahasia juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengurangi resiko ketika mendokumentasikan bukti visual selama investigasi lapangan, ketika pembuatan film dan fotografi secara terang-terangan kemungkinan bisa menarik perhatian yang tidak diinginkan dan menimbulkan kecurigaan.

Alat-alat perekam suara bisa digunakan untuk merekam

percakapan telpon ketika didekatkan ke telinga, wawancara informal jika disembunyikan dalam kantong atau tas. Video rahasia bisa direkam dengan menggunakan ponsel yang disesuaikan, tas dengan kelengkapan khusus, atau bahkan menggunakan lensa yang dipakai di badan, dan digunakan untuk mendokumentasikan percakapan-percakapan, dokumen-dokumen, penandaan-penandaan kayu dan temuan-temuan lapangan lainnya tanpa menarik banyak perhatian sebagaimana pembuatan film secara terang-terangan. Tetap saja berbagai gambar bisa dihasilkan dari video tersembunyi. Melalui latihan, perekam video dan kamera biasa bisa digunakan dengan setengah tersembunyi, yaitu dengan cara memegangnya sejajar dengan pinggang dan merekam tanpa melihat. Ponsel juga bisa digunakan untuk mengambil foto secara diam-diam, meskipun harus hati-hati untuk memastikan bahwa suara jepretan dan cahaya kilat kamera sudah dimatikan. Peralatan apapun yang digunakan, merupakan hal yang penting bahwa para operator berlatih secara menyeluruh terlebih dahulu, dan memastikan bahwa kartu memori sudah dikosongkan dan baterai terisi penuh sebelum setiap pertemuan.

2.4 Penelusuran maju sampai konsumen akhir

2.4.1 Pendahuluan

Meskipun serangkaian luas informasi memiliki potensi manfaat dalam membantu memperbaiki efektivitas EUTR atau Lacey (lihat **Bab Satu**), suatu investigasi independen idealnya akan menciptakan koneksi langsung yang melibatkan UE atau AS.

Poin awal: Titik ekspor atau pasar

Ada dua metode yang bisa digunakan untuk menemukan koneksi antara kayu ilegal di negara-negara asal dan tujuan-nya: pelacakan ke depan dari sumbernya, dan melacak kebelakang dari tempat tujuan:

- **MEMULAI DARI TEMPAT ASAL:** Mengikuti produk-produk tertentu yang diketahui atau dicurigai dipasok secara ilegal dari suatu negara produsen menuju dan ke dalam negara konsumen
- **MEMULAI DARI TEMPAT TUJUAN:** Melacak produk-produk berisiko tinggi ke belakang dari suatu negara konsumen ke negara asalnya, untuk mencari tahu apakah kayu tersebut ternyata atau mungkin dipasok dengan melanggar hukum.

Menggunakan kedua pendekatan tersebut untuk kasus yang sama kemungkinan diperlukan atau bisa menghasilkan. Misalnya, jika upaya-upaya untuk menelusuri suatu rantai pasok untuk suatu produk khusus ke depan dari negara asal ternyata kurang efektif, mungkin perlu mundur dan berusaha menghubungkan rantai pasok yang sama dengan melacak produk-produk yang relevan ke belakang dari negara tujuan.

Sejauh mana rantai pasok harus dilacak?

Seberapa jauh rantai pasok dipetakan dalam negara konsumen, diluar importir, akan tergantung pada undang-undang yang digunakan dan tujuan akhir penelitian tersebut. Di UE, elemen kunci EUTR hanya diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang pertama kali membawa masuk kayu ke dalam wilayah UE untuk dijual ("first placer")²⁴. Tidak ada langkah penegakan yang bisa dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan lain lebih jauh ke dalam rantai pasok. Meskipun demikian, akan tetap berguna jika bisa diinvestigasi lebih jauh untuk "menyebutkan nama dan memermalukan" perusahaan-perusahaan lain yang membeli kayu dari perusahaan kayu tersebut.

Jika penelitian yang dilakukan dimulai dari ujung pasar, pengidentifikasian para importir produk-produk khusus bisa dilakukan dengan pelacakan mundur ke pedagang ritel.

2.4.2 Memulai dari asal

Memperoleh informasi dari dokumen catatan pengapalan

Dalam beberapa kasus, informasi mengenai pembeli di luar negeri bisa diperoleh dari pemerintah negara produsen. Dokumen-dokumen resmi terkait ekspor yang dikumpulkan ke lembaga-lembaga pemerintah (termasuk deklarasi bea cukai dan izin-izin khusus seperti Izin Ekspor CITES), atau informasi yang termasuk di dalamnya, bisa dicari melalui permintaan-permintaan resmi dibawah undang-undang Keterbukaan Informasi jika bisa diterapkan [lihat Tool Box: Keterbukaan Informasi]. Meskipun demikian, kemungkinan bahkan ketika ada undang-undang Keterbukaan Informasi, identitas para penjual akan dianggap sebagai informasi rahasia yang bersifat komersil dan dikecualikan.

Untuk beberapa negara, akses terhadap informasi yang terperinci mengenai masing-masing pengiriman kayu dan produk-produk kayu melalui kapal bisa diperoleh melalui database pengapalan (shipping database). Database ini biasanya meliputi penjelasan mengenai barang-barang di setiap pengapalan, kuantitas dan identitas pemasok ('pengirim' / 'shipper') dan juga pembeli ('penerima barang' / 'consignee'). Database tersebut seringkali dibuat berdasarkan manifest kapal yang dikelola oleh jalur pelayaran utama, dan tersedia melalui layanan langganan berbayar untuk ekspor dari dan/atau impor ke beberapa pemasok kayu utama dan negara-negara konsumen. Misalnya, Environmental Investigation Agency menggunakan catatan pengiriman impor AS²⁵ untuk membantu mencari tahu hubungan antara bahan lantai oak Rusia yang dipasok oleh suatu perusahaan di Cina kepada perusahaan AS bernama Lumber Liquidators [lihat **Studi Kasus 9**].



Greenpeace mengejar impor kayu ilegal sampai ke Eropa ©Greenpeace

Meskipun belum ada database yang sebegitu di negara-negara konsumen utama lainnya seperti negara-negara anggota UE, Kanada, Australia atau Jepang, ada database pengapalan yang mencatat penerima barang di negara-negara tersebut untuk ekspor dari banyak negara asal yang berisiko tinggi, termasuk Rusia, Ukraina, Indonesia, Brazil, Kolombia, Bolivia, Ekuador dan Meksiko. Meskipun tidak terlalu bermanfaat untuk mencari tahu koneksi rantai pasok, database pengapalan yang hanya memberikan identitas perusahaan-perusahaan pengeksport tersedia di beberapa negara lainnya di Amerika Latin.

Ketika masing-masing catatan pengapalan tidak tersedia bagi suatu negara, masih mungkin untuk memperoleh kumpulan data terkait impor atau ekspor oleh perusahaan-perusahaan tertentu selama suatu periode tertentu. Di Cina, misalnya, ada peluang untuk bisa menentukan perusahaan-perusahaan mana yang mengimpor seberapa banyak suatu kategori tertentu produk kayu (sebagaimana dijelaskan dalam kode bea cukai yang terperinci) dari suatu negara pemasok tertentu selama periode waktu tertentu. Di Inggris Raya, pemerintah menerbitkan daftar semua perusahaan yang telah mengimpor produk-produk dibawah kode bea cukai tertentu dalam bulan tertentu, meskipun tidak menyediakan kuantitas atau penjelasan berdasarkan negara pemasok.

Salah satu kelemahan database pengapalan adalah identitas penjual dan pembeli sering kali dihapus atau ditutupi dibalik nama perusahaan ekspedisi muatan atau logistik. Jika hal itu terjadi, penting halnya untuk memeriksa informasi lain mengenai pengapalan tertentu yang termasuk dalam database tersebut, seperti rincian deskripsi komoditas atau informasi terkait penandaan, dimana kemungkinan mencantumkan nama pembeli atau pemasok, atau kode atau singkatan yang menunjukkan identitas mereka [lihat Tool Box: Mengidentifikasi para pemasok dengan menggunakan kode skema sertifikasi]. Dalam kasus Lumber Liquidators, misalnya, catatan pengiriman telah mencantumkan identitas pengirim dan penerima yang tidak terdapat pada kolom yang relevan, meskipun demikian informasi tersebut terdapat dalam deskripsi produk [lihat **Studi Kasus 9**].

Diperlukan kehati-hatian ketika melakukan pencarian terhadap database tersebut. Karena informasi tersebut biasanya datang dari berbagai dokumen berbeda yang tidak sama dengan yang secara resmi dikumpulkan ke bea cukai, sering ada kesalahan informasi yang disertakan terkait kode cukai atau negara asal.

Tool Box: Mengidentifikasi para pemasok dengan menggunakan kode skema sertifikasi

Banyak dari produk-produk kayu utama yang secara independen tersertifikasi telah memenuhi standar-standar tertentu di tingkat nasional, regional atau internasional terkait kualitas, keberlanjutan, atau kesehatan dan keselamatan. Beberapa contohnya seperti penandaan 'CE' untuk pemasok ke Eropa, sertifikasi 'CARB' untuk pemasok ke AS, sertifikasi 'JAS' untuk pemasok ke Jepang, dan sertifikasi keberlanjutan FSC. Masing-masing pemasok dialokasikan suatu kode unik ketika pemasok tersebut tersertifikasi dibawah salah satu sistem-sistem ini. Ketika identitas pemasok tidak ditunjukkan pada penandaan kayu, kemasan, dokumen resmi yang relevan atau database pengapalan, biasanya salah satu kode ini akan muncul. Kode ini kemudian bisa direferensi silang dengan daftar pemasok yang bersertifikat yang tersedia secara umum atau diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan sertifikasi dan digunakan untuk langsung mengidentifikasi perusahaan pemasok. Pada tahun 2—7, misalnya, Greenpeace menggunakan metode ini untuk membantu meneliti hubungan antara triplek bahan tropis yang dijual di Belanda ke pabrik tertentu milik warganegara Cina yang diduga menggunakan kayu ilegal dari Papua Nugini.²⁶

Memperoleh informasi dengan menggunakan pendekatan samaran atau investigasi lapangan

Metode-metode samaran jarak jauh yang dijelaskan dalam Bab 2.3 di atas bisa dimanfaatkan untuk mencoba mencari tahu informasi secara langsung dari perusahaan-perusahaan pengekspor mengenai pelanggan mereka di luar negeri. Ketika para pemasok enggan untuk menyebutkan nama konsumen mereka kepada para investigator yang menyamar sebagai calon pembeli, suatu pendekatan sebagai seorang jurnalis atau peneliti akademis bisa lebih berhasil. Informasi tambahan

bisa diperoleh melalui observasi langsung. Meskipun peluang-peluang terbaik untuk observasi yang seperti itu bisa diperoleh dari kunjungan-kunjungan perusahaan secara rahasia (yang tidak disarankan tanpa pelatihan khusus), jika para investigator mengetahui lokasi suatu perusahaan pemasok [lihat Kotak: Membangun profil perusahaan] suatu hal yang mungkin bisa dilakukan adalah menengokat kayu atau produk-produk kayu di pekarangan perusahaan, yang bisa terlihat dari luar. Produk-produk ini seringkali memiliki penandaan yang memberikan petunjuk terkait identitas para pembeli di luar negeri.

Studi Kasus 11: Panggilan telepon melalui penyamaran untuk mengidentifikasi pemasok²⁷

Pada tahun 2010, suatu studi yang dilakukan oleh Earthsight untuk WWF terkait produk kayu berisiko tinggi yang diimpor ke Inggris Raya dengan menggunakan data perdagangan dan informasi lain untuk menentukan bahwa pintu berbahan kayu keras yang dibuat dari Meranti dan diimpor dari Indonesia merupakan produk yang diminati. Pencarian melalui internet dan panggilan telepon ke pedagang ritel, yang dilakukan dengan menyamar, menghasilkan suatu daftar pendek lima perusahaan utama yang menjual atau mendistribusikan pintu-pintu ini di Inggris Raya. Informasi mengenai rantai pasok dari salah satu perusahaan ini – LPD Doors – dicari dengan menggunakan permintaan terbuka oleh WWF dan panggilan telepon samaran dengan

berpura-pura menjadi pembeli yang khawatir dari Earthsight. Penyelidikan tersebut menghasilkan identifikasi pabrik di Indonesia dan eksportir pintu-pintu tersebut. Earthsight mengunjungi pemasok dari Indonesia tersebut dengan menyamar, dan diberikan beberapa dokumen yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut baru-baru ini memasok Meranti dari 20 pemasok yang berbeda. Semua terkecuali satu dari pemasok tersebut merupakan pedagang sekunder, dan tidak ada informasi lebih jauh lainnya yang dicari dengan tujuan mencari asal kayu. Satu-satunya pemasok yang memiliki izin konsesi kayu, PT Kayu Lapis Indonesia, telah menjadi target dugaan dari beberapa LSM terkait penebangan liar dan eksploitasi komunitas. Penelitian tersebut karenanya berhasil mendemonstrasikan bahwa Meranti yang digunakan untuk pintu-pintu tersebut tidak dapat dilacak dan dari sumber yang berisiko.



Kayu Meranti di Indonesia

2.4.3 Mengawali dari tempat tujuan

Kemungkinan untuk menghubungkan suatu produk ke sumber pasokan ilegal tertentu sangat sempit ketika dilakukan ke belakang dari akhir suatu rantai pasok. Meskipun demikian, hasil-hasil yang bermanfaat tetap bisa diperoleh bahkan ketika sumbernya tidak diidentifikasi secara konklusif. Misalnya, merupakan hal yang mungkin untuk meminta suatu perusahaan untuk berhenti membeli dari suatu sumber pasokan tertentu jika bisa ditunjukkan bahwa suatu produk dihasilkan dari sumber yang berisiko tinggi dan tidak jelas, terutama jika bisa ditunjukkan bahwa klaim pembeli terkait asal produk tersebut adalah palsu [lihat **Studi Kasus 12**].

Dalam UE, bukti-bukti yang sedemikian cukup kuat, karena bisa digunakan untuk mendorong langkah penegakan dibawah ketentuan-ketentuan uji tuntas EUTR. Jika suatu perusahaan tidak mengetahui – atau bahkan telah ditipu terkait – sumber kayu, maka resiko pelanggaran hukum tidak bisa dikurangi dengan pas.

Studi Kasus 12: Membongkar keraguan terhadap sumber kayu

Dalam suatu studi yang dilakukan oleh Earthsight untuk WWF pada tahun 2011, rantai pasok geladak taman dari kayu bangkirai yang dijual oleh pedagang kayu besar di Inggris Raya di teliti. Penjual ritel Inggris tersebut mengklaim bahwa sumber kayu tersebut adalah dari suatu konsesi penebang kayu tertentu di Filipina, namun pengecekan yang dilakukan oleh Earthsight memberikan konfirmasi bahwa hal ini tidak benar. Konsesi yang dimaksud tersebut sudah dibatalkan beberapa tahun sebelumnya akibat penebangan liar yang meraja lela.²⁸

Mengidentifikasi ritel yang menjual produk-produk berisiko tinggi dan memperoleh informasi terkait pemasokan

Langkah pertama dalam suatu investigasi yang diawali pada titik akhir rantai pasok adalah menyempitkan pencarian ke produk kayu tertentu yang berisiko tinggi. Pilihan dari produk kayu tersebut akan bergantung pada analisa resiko, yang menimbang berbagai faktor termasuk tingkat pelanggaran

hukum negara sumber dan spesies yang digunakan. Spesies kayu tropis yang pada umumnya berisiko tinggi, misalnya, dan biasanya digunakan dalam produk-produk kayu relatif dalam jumlah kecil. Analisa data perdagangan bilateral yang bisa diakses publik (dari UN COMTRADE²⁹ atau Eurostat³⁰) bisa dimanfaatkan untuk membantu menentukan produk-produk yang ingin diteliti, terutama ketika data perdagangan membagi produk-produk tersebut sehingga suatu tingkatan yang memungkinkan produk-produk yang berisiko tinggi untuk dibedakan dari produk-produk yang berisiko rendah [lihat **Tool Box: Memanfaatkan data perdagangan**].

Setelah produk kayu tertentu yang berisiko tinggi teridentifikasi, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi perusahaan-perusahaan utama yang memperdagangkan produk tersebut di negara konsumen yang ingin diselidiki. Ketika ada untuk ekspor atau impor dari negara yang ingin diperiksa, catatan pengapalan merupakan suatu titik permulaan [lihat **Memperoleh informasi dari catatan pengapalan**]. Yang lainnya adalah pemeriksaan catatan keanggotaan untuk asosiasi perdagangan yang relevan. Pencarian website secara umum juga bisa produktif [lihat **Tool Box: Pencarian internet**].

Setelah suatu daftar pendek perusahaan dibuat, informasi yang lebih jauh mengenai produk-produk relevan yang dijual dan diperdagangkan bisa diperoleh dari website dan brosur perusahaan. Setelah semua informasi yang tersedia bagi publik ditelusuri, kontak langsung bisa dilakukan dengan perusahaan untuk mencari tahu lebih jauh, baik secara rahasia, dengan menyamar sebagai calon pembeli, yang berusaha memastikan asal produk tersebut, atau secara terbuka. Jika informasi pada langkah selanjutnya yaitu dengan penelusuran mundur di sepanjang rantai pasok bisa diperoleh (seperti importir lokal), maka pertanyaan yang sama bisa ditujukan kepada perusahaan tersebut.



Tongkang kayu di Papua Nugini ©Greenpeace

Tool Box: Memanfaatkan data perdagangan

Sebagian besar negara-negara pengimpor dan pengeksport mempublikasikan data umum perdagangan. Data ini menyediakan gabungan informasi terkait kuantitas dan nilai dagang kategori-kategori produk-produk tertentu, antar negara-negara tertentu, dalam waktu satu bulan atau tahun. Dalam beberapa kasus, data tersebut bisa dibagi lebih jauh berdasarkan pelabuhan atau wilayah asal atau tujuan.

Meskipun data ini tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi hubungan dalam rantai pasok di tingkat perusahaan, data ini bisa digunakan untuk menyempitkan target-target negara di luar negeri dalam suatu investigasi ke dalam suatu rantai pasok tertentu (ketika bekerja dari asal pasokan), atau membantu mengidentifikasi rantai pasok yang layak untuk diteliti (ketika bekerja dari tujuan pasokan). Perbandingan data ekspor dari satu negara dengan data impor dari negara lain juga bisa mengungkap beberapa ketidaksesuaian yang merupakan indikasi dari perdagangan ilegal. Jika ada beberapa ketidakcocokan antara volume yang tercatat meninggalkan suatu negara dan volume yang tercatat ketika memasuki tujuan yang dilaporkan, hal ini bisa menjadi indikasi penyelundupan, pencucian, kesalahan klasifikasi dan deklarasi dibawah volume dan nilai kayu yang sesungguhnya. Misalnya, pada awal tahun 2000-an, ketidakcocokan dalam data bea cukai untuk ekspor kayu dari Indonesia dan Malaysia dan impor kayu dari Cina menunjukkan betapa besar volume kayu ilegal dari Indonesia yang diseludupkan keluar dari negara tersebut dan disalah-deklarasikan berasal dari Malaysia pada saat tiba di Cina [lihat **Studi Kasus 10**].

Data perdagangan terbagi atas kode-kode bea cukai, yang diterapkan terhadap kategori-kategori tertentu produk-produk kayu. Pemahaman terhadap kode-kode ini penting untuk menganalisa data perdagangan dan menginterogasi database catatan pengapalan [lihat Memperoleh informasi dari catatan pengapalan]. Kode-kode ini menggunakan standar internasional melalui Harmonised System (HS). Jumlah digit dalam kode tersebut mengindikasikan tingkat kekhususan. Enam digit yang pertama merupakan standar internasional, sementara masing-masing negara

bisa membagi masing-masing kode tersebut lebih jauh lagi dengan menggunakan sub kategori delapan atau sepuluh digit. Misalnya, kayu diklasifikasikan dibawah HS Bab 44; kayu gergajian dibawah HS Kode 4407; kayu gergajian dari spesies kayu tropis utama termasuk dibawah Kode HS 440729; dan Indonesia mengklasifikasikan kayu gergajian Ramin dibawah Kode HS 4407295900.

Kemungkinan dimana suatu spesies atau produk tertentu memiliki kode delapan atau sepuluh digitnya sendiri dalam suatu negara tergantung dari volume perdagangan. Umumnya, negara-negara penghasil kayu memiliki klasifikasi yang lebih terperinci daripada negara pengimpor. Dalam upaya mendeteksi pelanggaran hukum atau menyempitkan fokus penelitian, pembagian produk kayu dalam kode bea cukai lebih bermanfaat bagi kayu-kayu gelondongan, kayu gergajian dan triplek (dimana spesies tertentu sering memiliki kode tertentu) dibandingkan kayu yang sudah diproses lebih jauh seperti perabot.

Data perdagangan untuk impor AS dan untuk impor negara anggota UE, dibagi berdasarkan bulan dan sangat mutakhir, tersedia di database online gratis yang masing-masing disediakan oleh USITC dan Eurostat. Data impor dan ekspor tahunan dan beberapa bulanan sampai dengan kode HS dengan level enam-digit untuk sebagian besar negara tersedia secara gratis melalui database online UNCOMTRADE. Beberapa negara lainnya memiliki database online gratis mereka sendiri. Layanan langganan berbayar seperti World Trade Atlas menyediakan data tambahan yang tidak tersedia di tempat lain. Informasi lebih lanjut mengenai data perdagangan bisa dilihat di www.timberinvestigator.info.

Selain mencari informasi yang tersedia bagi publik dan melakukan kontak dengan perusahaan yang ingin diteliti, pemeriksaan penandaan pada produk-produk atau kemasan selama kunjungan ke outlet-outlet ritel, tempat penyimpanan kayu atau depot-depot distribusi juga bisa mengungkap informasi mengenai pemasok [lihat Studi Kasus 13]. Investigasi-investigasi yang sedemikian membutuhkan pengetahuan mengenai penandaan yang digunakan di negara asal pasokan kayu [lihat **Tool Box: Penandaan kayu** dan **Tool Box: Mengidentifikasi pemasok dengan menggunakan kode sertifikasi**], dan bukti tindakan pelanggaran hukum di negara-negara tersebut.

Informasi mengenai perusahaan-perusahaan lain yang terlibat pada berbagai tahapan berbeda dalam suatu rantai pasok, selain dalam pemanenan, juga bisa dipastikan oleh penandaan pada produk-produk atau kemasan. Dalam beberapa kasus, nama para pemasok, pabrik, importir atau ritel kemungkinan diberikan. Bahkan ketika tidak diberikan, beberapa penandaan lain bisa menjadi suatu petunjuk. Banyak pemasok, pembeli dan pedagang kayu besar yang juga menggunakan logo tertentu, yang bisa dalam bentuk cat yang disemprotkan pada kayu-kayu gelondongan, kayu gergajian atau triplek bahkan ketika tidak memberikan nama lengkap.

Singkatan atau inisial pemasok atau pembeli juga dapat ditunjukkan, mungkin sebagai bagian dari suatu kode untuk pengiriman tertentu. Kode-kode dari sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh seorang pemasok yang menjamin kualitas, kesehatan dan keselamatan atau keberlanjutan suatu produk juga bisa disertakan, dan bisa digunakan untuk mengidentifikasi

pemasok [lihat **Tool Box: Mengidentifikasi para pemasok dengan menggunakan kode skema sertifikasi**].

2.4.4 Bukti pada kayu itu sendiri

Informasi bisa diperoleh dengan mempelajari produk-produk kayu itu sendiri, dengan menggunakan berbagai teknologi dengan serangkaian kompleksitas [lihat **Tool Box: Teknologi-teknologi untuk mengidentifikasi spesies dan asal geografis**]. Hal ini merupakan area yang masih berkembang, pada saat ini terbatas pada penggunaan-penggunaan yang cukup spesifik namun dengan potensi yang cukup besar.

Pada umumnya, hal ini terbatas pada menentukan apakah suatu produk kayu terdiri atas spesies kayu tertentu. Penentuan-penentuan yang sedemikian, yang dibuat berdasarkan anatomi kayu, DNA atau analisa serat, bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu produk bukan yang di klaim oleh seorang pembeli. Dengan sendirinya, hal ini bisa mengarah ke suatu langkah penegakan (untuk deklarasi palsu dibawah Lacey, atau pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan uji tuntas EUTR), atau sebaliknya mengingatkan seorang pembeli untuk berganti pemasok dan mengurangi resiko yang tinggi dan sumber pasokan yang berpotensi illegal. Di Inggris Raya, misalnya, Otoritas Kompeten EUTR menggunakan anatomi kayu untuk mendemonstrasikan berbagai kegagalan uji tuntas yang dilakukan para importir triplek kayu keras Cina; 70 persen sampel yang dikaji memiliki permukaan (veneer) kayu triplek dari spesies yang berbeda dari yang dinyatakan.³¹

Studi Kasus 13: Mengidentifikasi rantai suplai melalui penandaan

Pada tahun 2012, para investigator yang bekerja untuk Global Witness menemukan triplek yang diperdagangkan di rantai ritel besar di Jepang dengan penandaan yang mengidentifikasi pabrik pembuatnya sebagai

perusahaan Malaysia Shing Yang. Shin Yang, pada akhirnya, ditunjukkan melakukan pemanenan illegal di Sarawak. Investigasi yang sama juga menemukan kayu-kayu gelondongan di pelabuhan di Jepang yang memiliki kode label kayu terkait dengan konsesi tertentu milik Shin Yang dimana tindakan-tindakan ilegal telah didokumentasikan.



Kayu lapis Shin Yang dari Sarawak yang dijual di Jepang ©Global Witness

Terkadang, informasi mengenai spesies kayu bisa berjalan lebih jauh dan membantu mendemonstrasikan tindakan pelanggaran hukum. Hal ini bisa mendemonstrasikan, misalnya bahwa suatu produk dibuat dari spesies kayu yang dilindungi atau memiliki peraturan khusus. Pada tahun 2010, LSM AS World Resources Institute melakukan analisa serat pada produk-produk kertas dari Indonesia yang dijual di AS, dan menemukan serat kayu Ramin, suatu spesies yang tidak boleh dipanen di Indonesia dan dilindungi peraturan perdagangan internasional di bawah CITES.³² Dalam suatu contoh lain, penyitaan terbesar kayu ilegal hingga saat ini di Inggris terjadi pada tahun 2002, ketika para petugas bea cukai menggunakan anatomi kayu untuk menunjukkan bahwa suatu kiriman cetakan bingkai gambar berbahan kayu Ramin dari Indonesia telah diimpor dengan menggunakan nama spesies palsu tanpa memiliki dokumen-dokumen CITES sebagaimana diperlukan.³³ Pemalsuan spesies kayu dalam deklarasi impor tanaman sebagaimana diwajibkan dibawah Lacey Act merupakan suatu pelanggaran di AS, bahkan ketika tidak ada bukti lain yang menunjukkan bahwa kayu tersebut dipasok secara ilegal.

Dalam suatu cakupan yang terbatas, pemeriksaan spesies kemungkinan juga memberikan informasi yang bermanfaat terkait asal geografis. Misalnya, mungkin bisa didemonstrasikan bahwa spesies tersebut tidak

mungkin berasal dari negara tempat panen yang diklaim oleh perusahaan tersebut, karena wilayah tersebut bukan merupakan wilayah dimana spesies tersebut tumbuh secara alami. DNA dan teknologi lainnya, Stable Isotope Analysis, bias digunakan lebih jauh dan memberikan informasi yang terkait dengan asal geografis sampel dari suatu spesies. Misalnya, analisa isotope telah digunakan oleh EIA³⁴ dan WWF³⁵ untuk mendemonstrasikan bahwa produk-produk kayu ek yang dijual di AS dan Inggris diproduksi dari ek yang berasal dari Timur Jauh Rusia, suatu wilayah yang terutama berisiko tinggi terkait dengan pelanggaran hukum.

Meskipun demikian, manfaat dari teknik-teknik ini untuk menentukan asal geografis masih sangat terbatas, dengan tidak adanya database referensi sampel yang terperinci yang memadai dari lokasi-lokasi yang telah diketahui. Pada saat ini, informasi yang telah tersedia bisa paling maksimal menentukan negara asal kayu Ek dan beberapa spesies kayu tropis komersil besar lainnya dari Afrika, Asia Tenggara dan Latin Amerika. Penentuan negara asal itu sendiri bisa membantu memberikan indikasi adanya pemanenan ilegal hanya dalam situasi-situasi yang paling unik, meskipun hal ini bisa mengindikasikan klaim yang dipalsukan dan menunjukkan kekurangan pada uji tuntas, dan bisa juga digunakan untuk membuktikan perdagangan ilegal, seperti pemalsuan deklarasi Lacey Act.



Ramin yang disita oleh otoritas Inggris ©Sam Lawson/EIA

Tool Box: Berbagai teknologi yang dimanfaatkan untuk mengidentifikasi spesies dan asal geografis

Teknologi-teknologi untuk mengidentifikasi spesies

Anatomi kayu: Metode yang relatif sederhana ini terdiri atas pemeriksaan antar bagian pada permukaan produk kayu keras dengan menggunakan lensa atau mikroskop genggam. Pola sel dan pori-pori bisa diperbandingkan dengan informasi referensi untuk mengidentifikasi genus atau spesies kayu tersebut. Metode ini memiliki banyak keterbatasan yang signifikan. Ketepatan pertimbangan bisa dibuat tergantung pada tingkat variasi antar spesies dan keberadaan gambar referensi. Metode ini kemungkinan mahal, karena secara tradisional membutuhkan komitmen waktu yang cukup lama dari ahli anatomi kayu yang sangat terlatih. Beberapa sistem portabel otomatis yang bisa dimanfaatkan oleh non-ahli telah didesain, namun pada tahap pengembangan awal dan pada saat ini hanya bisa diterapkan terhadap serangkaian kecil spesies kayu.



Ahli anatomi kayu mengidentifikasi potongan kayu di suatu pabrik kayu di Brazil ©NIRS Mahogany ID Project'

Anatomi kayu juga bisa dilakukan untuk produk-produk kayu keras.

Analisa serat: Bisa dilakukan terhadap produk-produk kertas dan bubur kayu, dimana serat masing-masing kayu diperiksa dengan menggunakan mikroskop. Meskipun jarang bisa membedakan sampai dengan tingkat spesies dengan menggunakan analisa serat, metode ini bisa digunakan untuk menentukan apakah ada kandungan kayu hutan tropis alami di dalam suatu sampel yang diklaim hanya terbuat dari kayu yang tumbuh di perkebunan.³⁶

Analisa DNA: Secara teoritis metode identifikasi spesies yang paling bisa diandalkan, namun lebih mahal daripada anatomi kayu. Metode ini juga tergantung dari referensi informasi yang kurang lengkap, dan apakah mungkin untuk mengekstraksi DNA yang bisa diteliti dari suatu produk.

Spektrometry: Kemungkinan lebih murah dan mudah dibandingkan anatomi kayu atau DNA, teknologi ini mengidentifikasi spesies berdasarkan bagaimana spesies tersebut mencerminkan dan menyerap cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Namun, database referensi untuk metodologi ini bahkan lebih sedikit dibandingkan yang lainnya.



Greenpeace mengerahkan analisa serat untuk mengidentifikasi kayu keras tropis pada sampel kertas. ©Greenpeace and IPS Inc.

Menentukan asal geografis

Analisa DNA: Secara teori bisa juga digunakan untuk menyempitkan asal geografis suatu sampel spesies kayu tertentu, berdasarkan variasi alami DNA masing-masing spesies tertentu dalam suatu cakupan wilayah geografis.

Analisa Isotop Stabil: Menggunakan variasi alami proporsi berbagai versi berbeda pada elemen-elemen atom seperti karbon pada masing-masing sampel kayu, yang bervariasi sesuai dengan sifat tanah dimana pohon-pohon tersebut tumbuh.

Kedua metode tersebut memiliki potensi yang sangat besar, namun penerapannya terbatas pada saat ini terutama dengan tidak adanya database referensi sampel yang bisa diandalkan dari asal wilayah geografis yang telah diketahui. Bahkan ketika referensi database yang sedemikian sudah ada, data tersebut belum tentu bisa memiliki resolusi yang cukup untuk menentukan informasi asal geografis secara cukup terperinci untuk bisa digunakan dalam menentukan legalitas maupun pelanggaran hukum. Satu-satunya contoh hingga saat ini dimana database yang sedemikian dimanfaatkan untuk meneliti legalitas adalah penggunaan isotop untuk menentukan apakah kayu ek berasal dari Timur Jauh Rusia atau negara-negara yang bertetangga dengan Cina.³⁷

Database DNA dan isotop juga pernah dikembangkan untuk spesies kayu tropis yang paling sering diperdagangkan yang berasal dari Afrika Tengah dan Barat, meskipun tampaknya resolusi mereka hanya

cukup sebaik-baiknya untuk menentukan negara asal³⁸. Database yang mencukupi untuk mendemonstrasikan negara asal untuk beberapa spesies kayu tropis utama lainnya dari Asia dan Amerika Latin, termasuk merbau³⁹ jati dan mahoni⁴⁰ juga sudah dikembangkan. Apakah DNA atau isotop bisa diandalkan untuk menentukan asal geografis dengan lebih tepat, seperti sampai dengan kabupaten atau konsesi penebangan tertentu, masih menjadi pertanyaan. Upaya-upaya untuk menguji kemampuan untuk memanfaatkan database yang sedemikian untuk menentukan asal konsesi Merbau di Indonesia⁴¹ dan Iroko dan Sapele di Kamerun⁴² memang memberikan sedikit harapan, meskipun tingkat keyakinan yang diperoleh (sekitar 70%) belum mencukupi untuk melakukan penuntutan, dan masih kurang jelas apakah tingkat pengambilan contoh yang diperlukan untuk mencapai suatu tingkat kepercayaan yang lebih memadai bisa dilakukan.

Pada saat penulisan, biaya di UE untuk mengidentifikasi spesies sampel kayu keras dengan menggunakan anatomi kayu diperkirakan adalah US\$100 - \$200 per sampel, analisa DNA sekitar \$300 - \$700 per sampel.⁴³ Uji-uji isotopik untuk memverifikasi asal juga menelan biaya sekitar \$200-\$500 per sampel. Kegiatan tersebut membutuhkan sekitar beberapa hari hingga beberapa minggu untuk memperoleh hasil, tergantung dari berbagai faktor.⁴⁴ Detail kontak untuk lembaga-lembaga yang mampu melakukan uji-uji yang sedemikian tersedia di website www.timberinvestigator.info, dimana berbagai berita mengenai perkembangan lebih lanjut dengan teknologi-teknologi tersebut juga akan ditampilkan.



Menyiapkan sampel kayu untuk diuji ©EIA

Bab 3: Memanfaatkan bukti

3.1 Mengkaji bukti

Tujuan utama dari panduan ini, dan jenis investigasi yang dibahas di Bab Dua, adalah untuk mendukung penegakan hukum di sektor kayu yang lebih baik. Meskipun demikian, tidak setiap investigasi akan mengarah pada kasus yang bisa ditindak-lanjuti. Meskipun para investigator kemungkinan berupaya membangun suatu badan pembuktian yang cukup kuat dan terperinci untuk melakukan penuntutan berdasarkan Lacey Act atau EUTR, hal ini bisa juga terbukti tidak mungkin untuk dilakukan.

Dalam hal ini, ada beberapa cara lain dimana bukti yang terdokumentasikan dengan baik dan disajikan dengan baik bisa membantu implementasi hukum, memperbaiki hukum dan mempengaruhi perilaku sektor swasta. Ada berbagai opsi yang tersedia untuk melakukan penegakan dan advokasi, tergantung dari kekuatan dan jenis bukti yang dikumpulkan selama investigasi.

Selama melakukan penelitian, para investigator harus secara konsisten menanyakan apakah mereka sudah mencapai batas tertentu dimana berbagai temuan sebaiknya dikemas

dan dipublikasikan, dipresentasikan ke lembaga-lembaga penegak hukum, atau keduanya. Merilis bukti terlalu cepat bisa kontraproduktif – bukti tersebut mungkin masih kurang lengkap dan belum cukup untuk menciptakan perubahan, dan mengurangi kemampuan untuk melakukan investigasi lebih jauh. Di AS, secara hukum tidak diperkenankan pula untuk menerbitkan informasi tambahan pada suatu kasus yang sudah diajukan kepada para otoritas, sehingga penting halnya bahwa seluruh kemungkinan bukti sudah dikumpulkan sebelum dilakukan pengajuan. Namun menyimpan bukti terlalu lama juga sama-sama bisa kontraproduktif – validitas bukti seringkali berkurang seiring dengan berjalannya waktu, dan metode-metode dan rantai pasok bisa berubah.

Penting untuk secara konsisten mengakses status investigasi, dengan mempertimbangkan berbagai opsi yang tersedia jika kasus tersebut diekspos sekarang, dan jika investigasi lebih lanjut akan memperbaiki opsi-opsi tersebut. Opsi-opsi utama yang bisa dipertimbangkan ketika mengkaji temuan-temuan investigasi adalah sebagai berikut.



Protes di pabrik kayu di Brazil karena mengambil kayu ilegal dan mengirimnya ke AS ©Greenpeace

Penegakan

Jika ada bukti yang menunjukkan hubungan rantai pasok dari sumber pasokan sampai dengan AS atau UE, yang sudah dilengkapi beberapa bukti terkait tindakan pelanggaran hukum, informasi tersebut bisa diberikan kepada lembaga-lembaga penegak hukum di wilayah yurisdiksi yang relevan. Informasi tersebut tidak harus lengkap, karena lembaga-lembaga penegak hukum bisa melakukan penyelidikan ketika ada kasus yang meyakinkan bahwa mereka harus melakukannya. Dalam UE, komponen uji tuntas EUTR mengenalkan potensi melaporkan suatu kasus kepada penegak hukum bahkan jika sumber produk tersebut masih belum jelas. Pada saat yang sama, semakin lengkap bukti yang diajukan, semakin besar kemungkinan bahwa suatu tindakan dapat dan akan diambil.



Masyarakat adat di Indonesia mengklaim batas-batas teritori yang tidak diakui oleh negara. ©Masyarakat Muara Tae

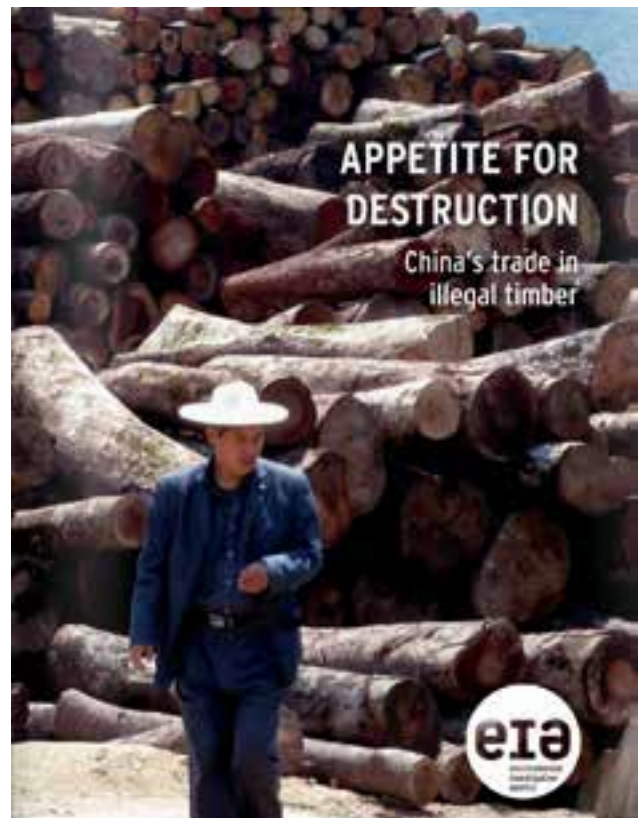
Mengekspos rantai pasok berisiko tinggi

Ketika ada bukti dimana kayu dengan jumlah yang cukup signifikan yang bersumber dari tempat tertentu adalah ilegal, informasi ini bisa disajikan kepada lembaga-lembaga penegak hukum dan diekspos ke publik, baik ketika ada maupun tidak ada hubungan yang jelas dengan perusahaan tertentu di pasar konsumen akhir. Kegiatan ini bisa membantu lembaga-lembaga penegak hukum dalam memonitor perusahaan-perusahaan yang berada di dalam wilayah yurisdiksinya, mendorong mereka untuk memperhatikan produk-produk dari sumber tertentu. Jika informasi tersebut secara umum diekspos, baik melalui media atau dengan cara mengedarkan informasi tersebut ke suatu audien tertentu, hal ini bisa menciptakan 'efek segan' terhadap impor dari sumber yang sama. Perusahaan-perusahaan di UE harus melakukan uji tuntas pada impor, sementara perusahaan di AS dikenai sanksi-sanksi yang lebih berat jika mereka gagal untuk

berhati-hati. Memastikan bahwa mereka telah memperoleh informasi yang cukup seharusnya bisa mendorong mereka untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap sumber-sumber pasokan yang berisiko tinggi.

Mengekspos isu-isu diluar ranah undang-undang kayu

Banyak investigasi yang bisa memunculkan bukti pelanggaran yang berada di luar undang-undang impor kayu. EUTR dan Lacey Act menggunakan basis hukum negara sumber pasokan; jika negara-negara sumber pasokan tersebut tidak melarang tindakan-tindakan tertentu, undang-undang di negara pasar ini tidak dapat berlaku. Hal ini terutama signifikan ketika terkait dengan hak asasi dan hak lahan. Jika negara-negara tidak secara legal mengenali hak-hak adat masyarakat adat terhadap hutan, EUTR dan Lacey Act tidak dapat digunakan untuk mengadili pengambilan sumber daya alam dari hutan-hutan tersebut. Bukan berarti bahwa mengekspos hal ini ke ranah publik tidak bermanfaat. Jika suatu koneksi rantai pasok secara luas atau spesifik yang menjangkau UE atau AS bisa ditunjukkan, mengekspos hal ini bisa merubah perilaku sektor swasta. Perusahaan-perusahaan di UE dan AS sadar akan pencemaran nama baik, dan resiko-resiko-nya terhadap bisnis mereka jika mereka dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia atau kerusakan keragaman hayati.



EIA mengekspos perdagangan luas kayu ilegal di pasar Cina yang tidak diregulasi ©EIA

Mengekspos rantai pasok di pasar yang belum memiliki regulasi

Meskipun UE dan AS mengambil jatah yang paling signifikan dalam perdagangan kayu global, beberapa negara lain mengimpor volume yang signifikan. Beberapa negara ini, terutama Jepang, Cina dan India, terus tumbuh dalam hal perdagangan kayu ilegal, dan tidak memiliki undang-undang seperti EUTR dan Lacey Act. Jika ada investigasi – kemungkinan banyak – yang kemudian mengarah kepada negara-negara ini, Lacey Act dan EUTR bisa diterapkan jika kayu tersebut nantinya di ekspor ulang kembali ke UE atau AS, namun menunjukkan hubungan-hubungan tersebut sangat sulit. Meskipun demikian, Lacey Act dan EUTR disahkan karena adanya tekanan publik – dan, yang penting, bukti – akan luasnya perdagangan kayu ilegal. Tekanan semakin besar di Cina dan Jepang untuk mengenalkan legislasi yang serupa. Mengekspos rantai pasok ilegal ke negara-negara ini bisa mendukung upaya-upaya tersebut. Dengan demikian, merupakan hal yang bermanfaat untuk mengekspos kasus tersebut ke ranah publik, namun juga berupaya untuk menyediakan bukti-buktinya secara formal ke lembaga-lembaga pemerintah baik di negara sumber pasokan maupun pasar.

Investigasi yang lebih mendalam atau lebih luas

Kemungkinan akan ada suatu titik dalam investigasi dimana diputuskan bahwa tidak mungkin membuktikan suatu kasus terhadap target tertentu, atau bukti tidak mencukupi untuk mendukung suatu hipotesis. Merupakan hal yang penting untuk sangat teliti dan tidak mengabaikan suatu penyelidikan secara keseluruhan terlalu cepat. Menggali lebih dalam dengan lebih terperinci pada target yang lebih ketat dan dipersempit (baik dari segi luas wilayah atau perusahaan), atau memperluas penyelidikan ke wilayah atau rantai pasok yang lebih luas, bisa membawa terobosan-terobosan baru. Proses tersebut bisa membawa berbagai wawasan baru yang memungkinkan investigator untuk kembali ke target aslinya dengan ide-ide segar.

Jalan buntu

Tidak setiap investigasi akan menghasilkan bukti atau informasi yang dapat ditindak-lanjuti yang dapat memberikan ‘efek segan’ pada suatu rantai pasok. Namun semua investigasi bisa memandu investigasi-investigasi lebih lanjut, meningkatkan pemahaman para investigator mengenai aktor-aktor yang terlibat, dan meningkatkan kegiatan kampanye mereka. Jika diambil keputusan untuk mengakhiri suatu investigasi tanpa mengambil langkah lebih lanjut, beberapa prinsip sederhana harus diimplementasikan untuk memastikan bahwa pekerjaan

tersebut tidak terbuang percuma. Seluruh bukti yang dikumpulkan selama investigasi, baik data dalam bentuk cetak maupun digital, harus diarsipkan atau disimpan dengan cara yang sedemikian sehingga dokumen tersebut bisa dengan mudah diperoleh kembali. Harus dibuat satu dokumen yang merangkum tujuan, perkembangan dan kesimpulan investigasi. Dokumen tersebut harus mencantumkan referensi bukti dan catatan mengenai bagaimana cara menemukannya. Harus menjadi bahan pertimbangan bahwa apa yang terlihat seperti suatu jalan buntu bisa muncul kembali dalam waktu beberapa minggu, jika informasi baru muncul. Pada saat itu – baik beberapa minggu atau tahun kemudian – kemampuan untuk mengakses kembali dan memahami suatu investigasi akan terbukti sangat bernilai.



Jalan logging di Kalimantan, Indonesia ©EIA

3.2 Membangikan informasi mengenai bukti

Secara umum, ada dua cara dimana bukti bisa disajikan. Yang pertama adalah dengan menyajikan bukti formal. Hal ini sesuai untuk mengumpulkan informasi ke lembaga-lembaga penegak hukum, badan-badan pemerintah yang lainnya dan masing-masing perusahaan. Yang kedua adalah menyajikan informasi bagikalayak yang lebih luas yang akan mengekspos dan menarik perhatian. Dalam beberapa situasi, mungkin merupakan hal yang terbaik untuk mengambil kedua jalur, melalui jalur pribadi, pengajuan resmi yang kemudian dilanjutkan dengan publisitas yang lebih luas, tergantung dari hasil-hasil yang diperoleh dari pengajuan awal. Cara apapun yang digunakan, merupakan hal yang penting untuk mempertimbangkan bagaimana informasi kemungkinan dimanfaatkan ketika merencanakan dan mengimplementasikan suatu investigasi. Prinsip-prinsip yang mendasari kedua metode penyajian dijelaskan di bawah ini.

Mengumpulkan bukti secara formal

Agar bukti dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para otoritas, bukti tersebut perlu dikumpulkan dengan menggunakan metode-metode yang benar, didokumentasikan dengan hati-hati dan dipresentasikan dengan jelas. Mereka yang melakukan investigasi terhadap penebangan liar dan rantai pasok yang terkait sebaiknya memilih dan mengadaptasikan metode-metode dan target-target – nya untuk memaksimalkan peluang agar bukti yang dikumpulkan bisa dimanfaatkan oleh para petugas penegak hukum untuk kasus-kasus Lacey dan EUTR. Bukti yang dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode kemungkinan bisa lebih diterima di pengadilan, dibandingkan yang dikumpulkan menggunakan metode-metode lain, misalnya. Kriteria-kriteria ini harus dibangun ke dalam perencanaan investigasi, jika mungkin dengan disertai arahan hukum.



Kayu yang disita oleh petugas penegak hukum di Honduras.

Pertimbangan penting lainnya ketika merencanakan dan melaksanakan penelitian adalah bahwa beberapa jenis pelanggaran mungkin lebih mudah dibuktikan di pengadilan dibandingkan yang lainnya, bahkan jika pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan yang paling sulit ditolerir dari segi dampak. Misalnya, bukti pemanenan ilegal oleh suatu pemasok di taman nasional kemungkinan tidak dapat digunakan dengan sendirinya jika bukti tersebut tidak dapat dihubungkan dengan pengiriman tertentu, tidak seperti penyalah-gunaan deklarasi pada ekspor atau impor, yang juga lebih mudah dibuktikan. Terkadang bukti yang tidak dapat tersanggahkan yang berasal dari 'hal-hal teknis' yang cenderung minor merupakan hal yang penting untuk memungkinkan suatu kasus untuk diupayakan, dan memungkinkan bukti pelanggaran-pelanggaran yang lebih serius agar dipertanggung-jawabkan.

Selama suatu investigasi, merupakan hal yang penting untuk mempertimbangkan bagaimana bukti dicatat dan dikomunikasikan secara internal. Jika suatu kasus formal diluncurkan yang sebagian bergantung pada informasi yang disediakan oleh sebuah LSM, berbagai dokumen dan komunikasi internal LSM tersebut kemungkinan perlu diserahkan ke pengadilan. Karenanya, merupakan hal yang penting bahwa LSM dan pihak-pihak ketiga lainnya yang mengumpulkan bukti-bukti relevan, untuk memastikan bahwa praktik yang profesional sudah diterapkan dalam komunikasi tertulis apapun yang relevan. Bahasa yang kurang sesuai, yang bisa dilihat sebagai pra-yudisial, harus dihindari.

Kemungkinan dimana informasi yang disuplai oleh LSM dan pihak-pihak ketiga lainnya digunakan oleh para otoritas penegak hukum tergantung dari tidak hanya kualitas informasi itu sendiri, namun juga seberapa jelas informasi tersebut disajikan. Sama halnya seperti menguatkan informasi tersebut, penyajian yang baik meningkatkan kemungkinan dimana para otoritas akan memperhitungkan kredibilitasnya.



Kayu yang disita oleh petugas penegak hukum di Brazil. ©Greenpeace

Kejelasan pengajuan akan bergantung pada seberapa baik data mentah digabungkan, dicatat dan diarsipkan selama proses investigasi. Semua data harus disimpan dengan hati-hati (idealnya disertai duplikat) selama investigasi. Suatu dokumen master harus dimanfaatkan untuk memastikan catatan-berjalan mengenai perkembangan, termasuk sumber dari masing-masing bukti dan suatu referensi mengenai dimana bukti tersebut tersimpan. Dokumen ini akan membentuk dasar pengajuan formal.

Pengajuan itu sendiri harus disatukan dalam satu dokumen, dengan data pendukung yang sudah disertakan sebagai lampiran. Seluruh bukti pendukung yang relevan harus disertakan, selama aman untuk mengekspos informasi tersebut. Mungkin saja perlu menghapus nama-nama individu, para informan dan desa-desa. Meskipun lembaga-lembaga penegak hukum harus memperlakukan bukti dengan sensitif, setelah informasi tersebut diteruskan ke pihak ketiga, informasi tersebut menjadi di luar kendali investigator.

Pengumpulan harus dilakukan sedetail mungkin, disajikan dengan jelas dan tepat. Bila mungkin, sebaiknya menyertakan:

- Perusahaan-perusahaan yang terlibat
- Produk-produk yang terlibat
- Spesies yang terlibat
- Negara sumber pasokan
- Hukum yang diduga telah dilanggar, sebisa mungkin spesifik
- Tanggal-tanggal kejadian-kejadian kunci (misalnya pelanggaran-pelanggaran hukum, impor) dipercayai telah terjadi
- Detail kontak untuk individu atau organisasi yang melakukan pengajuan

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kontak lembaga-lembaga penegak hukum yang menerima pengajuan, lihat www.timberinvestigator.info.

Mempublikasikan bukti

Ketika informasi digunakan secara publik, prinsip-prinsip akurasi dan penghindaran spekulasi dan opini tanpa dasar harus diikuti. Meskipun demikian, tujuan dan pembaca biasanya akan memerlukan informasi yang disajikan dalam bentuk yang lebih mudah diakses dan gaya yang menarik perhatian.

Dalam beberapa kasus, publikasi umum kemungkinan merupakan satu-satunya rute untuk merilis informasi. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus dimana publikasi umum dipertimbangkan, merupakan hal yang masuk akal untuk juga menyediakan informasi secara langsung ke lembaga-lembaga penegak hukum atau perusahaan. Jika informasi sudah cukup spesifik sehingga informasi tersebut bisa langsung ditindaklanjuti oleh penegak hukum, maka informasi tersebut harus diberikan ke para petugas sebelum publikasi, untuk memastikan bahwa publikasi apapun yang dilakukan kemudian tidak mengurangi upaya-upaya mereka. Publisitas yang lebih luas seharusnya hanya dilakukan setelah para otoritas diberikan peluang yang memadai untuk bertindak.

Jika informasi tersebut tidak terlalu spesifik – seperti bukti pelanggaran hukum di negara sumber pasokan tanpa adanya koneksi tertentu dengan rantai pasok di UE atau AS – kemungkinan merupakan hal yang sesuai untuk mempublikasikan dan mengajukan ke beberapa otoritas secara bersamaan. Dengan demikian, mengirimkan salinan laporan yang telah dipublikasikan ke otoritas dengan surat pengantar pendek kemungkinan sudah cukup, dari pada memformat ulang bukti tersebut sepenuhnya.

Ketika bukti sangat terperinci namun lembaga-lembaga penegak hukum tidak bisa atau tidak mau mengambil tindakan untuk merespon, atau ketika bukti melampaui jangkauan undang-undang yang ada, maka publikasi bisa menjadi cara untuk menghasilkan berbagai dampak dalam cara lain. Misalnya, publikasi bisa mendorong perusahaan untuk mengambil langkah secara sukarela, membantu mendorong berbagai perbaikan dalam hal niatan politis atau pendanaan untuk penegakan hukum, atau mendorong amandemen terhadap hukum.

Tidak ada aturan yang mutlak bagi ekspose, dan tidak ada jaminan cara untuk memastikan bahwa suatu kasus akan memperoleh perhatian selain kekayaan informasi yang dirilis setiap hari. Namun ada beberapa prinsip kunci yang harus dipertimbangkan.

- **Menjaga fokus: tujuan dan sasaran audiens.** Untuk menjaga agar publikasi tetap pendek dan mudah dibaca, merupakan hal yang penting untuk hanya menyertakan informasi yang relevan dengan tujuan tertentu (seperti membuat perusahaan untuk mencoret pemasok tertentu), mengesampingkan informasi lain yang dikumpulkan bahkan jika hal itu mungkin menarik. Informasi apa yang dimasukkan, dan intonasi dan bahasa yang sebaiknya digunakan ketika menyajikannya, juga sebaiknya tergantung dari apakah target audiens utama adalah masyarakat umum, para pembuat kebijakan atau sektor tertentu dari industri kayu.
- **Agar Terlihat Menonjol: menimbang konten apa yang paling bisa menarik perhatian.** Agar bisa terlihat menonjol, akan membantu jika informasi yang dipublikasikan fokus pada aspek-aspek dari suatu kasus yang baru, menarik atau sangat tajam. Meskipun mungkin tidak sepatutnya untuk menjelaskan secara detail mengenai kerusakan yang disebabkan oleh penebangan liar ketika melakukan pengajuan kepada pihak berwenang agar ditindak-lanjuti, hal yang sebaliknya adalah benar ketika berusaha untuk memperoleh perhatian audiens yang lebih luas. Dampak-dampak dramatis pada masyarakat dan kehidupan liar sering kali merupakan cara yang terbaik untuk menggalang perhatian. Jika ada kemungkinan dimana bukti tersebut akan diterbitkan pada suatu waktu, merupakan hal yang penting untuk mempertimbangkan hal ini ketika merencanakan dan melakukan suatu investigasi. Misalnya, kegiatan lapang kemungkinan berupaya untuk secara spesifik

mendokumentasikan kerugian yang disebabkan oleh tindakan-tindakan yang melanggar hukum, dan tidak hanya pelanggaran-pelanggaran hukum itu sendiri. Ketika menentukan apa yang difilmkan dan difoto, di sisi lain, mungkin perlu memikirkan apa yang terlihat paling dramatis, tidak hanya nilai pembuktian.

- **Penyebutan nama dan memermalukan: resiko hukum.** Ketika perusahaan-perusahaan atau individu-individu disebutkan dalam bukti yang dipublikasikan, hal ini membawa resiko hukum yang harus dipertimbangkan secara hati-hati. Detail-detail spesifik akan bergantung pada hukum pencemaran nama baik di negara yang menerbitkan, dan idealnya saran profesional harus dicari. Meskipun demikian, beberapa prinsip umum berlaku. Berbagai resiko bisa dikurangi jika tuduhan-tuduhan tersebut memiliki bukti pendukung yang jelas, menghindari spekulasi atau opini, dan suatu kasus yang kuat bisa dibuat sehingga penerbitan informasi menjadi kepentingan publik. Merupakan hal yang penting untuk mengingat bahwa yang tersirat dalam suatu publikasi (seperti bagaimana gambar-gambar dan kata-kata disandingkan) merupakan hal yang penting, begitu pula dengan apa yang sebenarnya dikatakan oleh teks tersebut.

Suatu ekspose bisa ditulis menjadi suatu laporan atau dokumen singkat, baik sepanjang satu halaman atau jauh lebih panjang. Seberapapun baiknya pengemasan informasi tersebut, LSM atau individual perlu proaktif dalam mendorongnya ke ranah publik. Ada beberapa cara untuk melakukan hal ini. Informasi bisa diberikan ke media tradisional (seperti surat kabar dan televisi), baik melalui rilis pers atau 'liputan eksklusif' yang telah direncanakan sebelumnya dengan jalur tertentu. Informasi tersebut juga bisa dirilis secara independen dan disebarakan melalui media sosial atau email langsung ke individu-individu kunci.



Protes terhadap kayu ilegal yang diimpor dan ditemukan di pelabuhan Eropa. ©Greenpeace

3.3 Kesimpulan: Tetap Semangat & Selalu Hati-hati

Secara independen, investigasi penebangan liar dan penelusuran kayu melalui rantai pasok bisa sulit dan membuat frustrasi. Di banyak kasus, para investigator juga perlu bersiap-siap untuk frustrasi dengan dampak dari informasi yang mereka miliki. Respon langsung dari otoritas penegak hukum kemungkinan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, dan bahkan kasus-kasus yang disidangkan kemungkinan memiliki pengaruh yang terbatas pada keseluruhan pola perdagangan. Hampir tidak mungkin bahwa satu kasus EUTR atau Lacey akan membawa ke penghentian mutlak terhadap tindakan pelanggaran hukum tertentu di negara sumber pasokan yang terkait dengan kasus tersebut, dan tidak pernah ada kasus yang pernah menghentikan seluruh penebangan liar dalam satu negara.

Agar bisa terus termotivasi, merupakan hal yang penting bagi para investigator untuk memiliki ekspektasi yang realistis mengenai apa yang bisa dicapai. Namun, merupakan hal yang penting untuk mengingat seberapa kuatnya bukti independen, dan bagaimana masing-masing kasus bisa membantu membangun keseluruhan yang lebih luas.

Kasus-kasus yang diinvestigasi oleh LSM memiliki dampak-dampak yang dramatis di masa lalu, termasuk pada tingkatan penebangan liar yang sesungguhnya. Ekspose penebangan liar pada tahun 2005 dan perdagangan internasional terkait dengan merbau dari Indonesia⁴⁵, misalnya, mengantarkan pada operasi penegakan hukum yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya, yang pada akhirnya berhasil membantu mengurangi penebangan liar secara keseluruhan di negara tersebut. Harga-harga merbau terguncang hampir dalam waktu semalam, sehingga industri bahan lantai yang bernilai milyaran dollar di Cina akhirnya bergeser ke spesies lain.

Meskipun dampak-dampak dramatis yang sedemikian jarang terjadi, setiap kasus dan setiap bukti membantu membangun momentum perubahan. Bersama-sama, berbagai investigasi dan kampanye oleh LSM sudah memiliki dampak besar pada tingkat penebangan liar. Selama satu dekade sampai dengan 2009, suatu studi menemukan bahwa penebangan ilegal secara global telah turun hingga hampir seperempatnya. Pemantau independen dan pengembangan kasus oleh LSM disoroti merupakan faktor penyumbang utama di semua negara dimana terlihat ada pengurangan-pengurangan yang cukup besar.⁴⁶

Pekerjaan investigasi oleh para aktivis dan komunitas yang dijelaskan dalam Panduan ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebagaimana halnya dengan melindungi mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak dan melindungi kehidupan liar, hal ini bisa mengurangi korupsi dan konflik, meningkatkan pendapatan pajak dan mengurangi perubahan iklim.

Meskipun demikian, kekuatan ini membawa resiko-resiko yang sangat serius. Penebangan liar dan perdagangan terkait merupakan bisnis yang besar, dan beberapa dari mereka yang terlibat cukup kejam dalam berupaya untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka. Di banyak negara, orang-orang yang melakukan investigasi dan mengekspos penebangan liar sudah pernah dicerai dengan cukup serius atau dibunuh dalam serangan-serangan balasan. Resiko bagi para investigator dan semua orang yang mereka temui harus selalu dianggap serius dan jangan pernah diremehkan. Merupakan hal yang penting untuk mengkaji dan berupaya untuk memitigasi berbagai resiko. Ketika resiko-resiko tidak bisa dikurangi dengan seanyaknya, maka investigasi tidak boleh dilakukan.

Catatan Akhir

1. Lawson, S. 2015. The Lacey Act's Effectiveness in Reducing Illegal Wood Imports. Union of Concerned Scientists, <http://www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2015/10/ucs-lacey-report-2015.pdf>
2. TEREAS-for-S/Topperspective. 2016. Evaluation of the EU FLEGT Action Plan (Forest Law Enforcement Governance and Trade) 2004-2014. Commissioned by the European Commission through the European Forest Institute, <http://www.flegt.org/evaluation>
3. Lawson, S. & MacFaul, L., 2010. Illegal Logging and Related Trade: Indicators of the Global Response, Chatham House, https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Energy%2C%20Environment%20and%20Development/0710pr_illegallogging.pdf
4. Lawson, S. 2014. Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations, Forest Trends, http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4718.pdf
5. ibid.
6. Categories of wood products subject to the Declaration requirement under Lacey have been gradually expanded between 2008 and 2015. At the time of writing, the main product categories which are excluded are products made from wood fibres, dust or chips, including pulp, paper, fibreboard and particleboard. A full list of products which require declaration is available at https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/import-information/SA_Lacey_Act
7. USA v Lumber Liquidators Inc, Plea Agreement, 7th Oct 2015 — https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1396033/000114420415058462/v421764_ex10-1.htm
8. European Commission, EUTR Evaluation, February 2016, http://ec.europa.eu/environment/forests/eutr_report.htm
9. <http://www.euflegt.efi.int/vpa-text-and-annexes>
10. Council on Ethics, The Government Pension Fund Global, Recommendation of 22 February 2010, https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/FIN/etikkk/Recommendation_Samling.pdf
11. <http://conservationdrones.org/2014/09/30/illegal-logging/>
12. <http://www.greenpeace.nl/Global/nederland/2015/documenten/Bossen/GreenpeaceNederland2015-CCTtimbertradefromCameroontoEurope.pdf>
13. <https://eia-international.org/wp-content/uploads/SVLK-Monitoring-Report.pdf>
14. Greenpeace Africa, 'Cut it Out: Illegal Logging in the Democratic Republic of Congo, March 2013, <http://www.greenpeace.org/africa/Global/africa/publications/forests/CutItOut.pdf>
15. http://rem.org.uk/documents/FM_REM_CAGDF_OIFLEG_Briefing_Note_3.pdf
16. Greenpeace International, Conning the Congo, July 2008, <http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2008/7/conning-the-congo.pdf>
17. <https://cites.org/eng/disc/how.php>
18. <https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-Organised-Chaos-FINAL-Ir1.pdf>
19. http://www.greenpeace.org.uk/sites/files/gpuk/gp_amz_silent_crimefile_final_dps.pdf
20. EIA, 'Liquidating the Forests: Hardwood Flooring, Organized Crime, and the World's Last Siberian Tigers, 2013, http://eia-global.org/images/uploads/EIA_Liquidating_Report_Edits_1.pdf
21. <http://www.wri.org/blog/2015/10/13-million-fine-lumber-liquidators-shows-us-lacey-acts-clout>
22. EIA/Telapak Indonesia, 'The Last Frontier: Illegal Logging in Papua and China's Massive Timber Theft', February 2005, <http://www.eia-international.org/wp-content/uploads/The-Last-Frontier.pdf>
23. EIA/Telapak Indonesia, 'Rogue Traders: The Murky Business of Merbau Timber Smuggling in Indonesia', August 2010, http://eia-global.org/images/uploads/Rouge_Traders.pdf
24. Though companies further down the supply chain are required to maintain records
25. www.piers.com; www.panjiva.com
26. Greenpeace International, Partners in Crime: How Dutch timber traders break their promises, trade illegal timber and fuel destruction of the paradise forests, Crime file, April 2007, <http://www.greenpeace.nl/Global/nederland/report/2010/6/partners-in-crime-how-dutch.pdf>
27. WWF, 'What Wood You Choose? Tracking forest products on sale in the UK back to their forest source', February 2011, http://assets.wwf.org.uk/downloads/what_wood_you_choose_feb11.pdf
28. WWF, 'What Wood You Choose? Tracking forest products on sale in the UK back to their forest source', February 2011, http://assets.wwf.org.uk/downloads/what_wood_you_choose_feb11.pdf
29. UN COMTRADE - comtrade.un.org
30. <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>
31. Pillet, N. & Sawyer, M. 'EUTR: Plywood imported from China', National Measurement Office, February 2015, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/402325/Chinese_Plywood_Research_Report.pdf
32. Hanson, C. & Nogueron, R., 'Risk Free? Paper and the Lacey Act', WRI, 15th Nov 2010, <http://www.wri.org/blog/2010/11/risk-free-paper-and-lacey-act>
33. EIA/Telapak, 'The Ramin Racket: The Role of CITES in Curbing Illegal Timber Trade', September 2004, <https://eia-international.org/wp-content/uploads/The-Ramin-Racket-Low-Res.pdf>
34. EIA, 'Liquidating the Forests: Hardwood Flooring, Organized Crime, and the World's Last Siberian Tigers, 2013, http://eia-global.org/images/uploads/EIA_Liquidating_Report_Edits_1.pdf
35. WWF, Do Timber Products in the UK Stack Up?, 2015, Pages 12-14 http://assets.wwf.org.uk/downloads/timber_testing_report_may15.pdf
36. Adam Grant, Ruth Nogueron and Craig Hanson, Q&A Fiber Testing-Paper and The Lacey Act, World Resources Institute blog, 2011 <http://www.wri.org/blog/2011/01/qa-fiber-testing-paper-and-lacey-act>
37. EIA, 'Liquidating the Forests: Hardwood Flooring, Organized Crime, and the World's Last Siberian Tigers, 2013, http://eia-global.org/images/uploads/EIA_Liquidating_Report_Edits_1.pdf
38. Degen, B. & Bouda, H., 'Verifying timber in Africa', ITTO Tropical Forest Update 24/1, 2015
39. Double Helix, The State of DNA Technology for Trees and Wood Products, 2011 <http://www.illegal-logging.info/sites/default/files/uploads/DoubleHelixAppliedGeneticsForForestsReport072011.pdf>
40. Scheliha and Zahnen, Genetic and Isotopic Fingerprinting Methods - Practical Tools to Verify the Declared Origin of Wood, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, 2010, Page 8 http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Fingerprinting_conf_rep_EN.pdf
41. Double Helix, The State of DNA Technology for Trees and Wood Products, 2011 <http://www.illegal-logging.info/sites/default/files/uploads/DoubleHelixAppliedGeneticsForForestsReport072011.pdf>
42. Scheliha and Zahnen, Genetic and Isotopic Fingerprinting Methods - Practical Tools to Verify the Declared Origin of Wood, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, 2010, Page 6 http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Fingerprinting_conf_rep_EN.pdf
43. Based on costs cited by the Thünen Institute on its website as of March 2016.
44. Degen, B. & Bouda, H., 'Verifying timber in Africa', ITTO Tropical Forest Update 24/1, 2015.
45. EIA/Telapak, 'The Last Frontier: Illegal Logging in Papua and China's Massive Timber Theft', <http://www.eia-international.org/wp-content/uploads/The-Last-Frontier.pdf>
46. Lawson, S. & MacFaul, L. 2010. Illegal Logging & Related Trade: Indicators of the Global Response. Chatham House. https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Energy%2C%20Environment%20and%20Development/0710pr_illegallogging.pdf

